

**“ ANALISIS STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK  
DESA MELALUI *SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH* (Studi  
Kasus di Desa Kalipucang, Tutur, Pasuruan)”**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Meraih Gelar Magister Ekonomi**



Oleh :

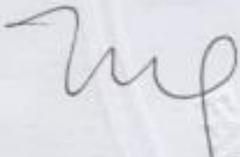
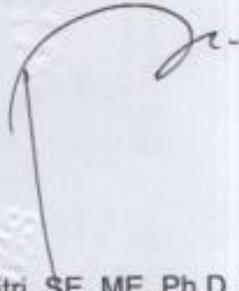
**Noor Zuhdiyaty  
166020101111001**

**PASCASARJANA ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2019**



**T E S I S****ANALISIS STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA  
MELALUI *SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH*  
(Studi Kasus di Desa Kalipucang, Tukur, Pasuruan)**

Oleh :

**NOOR ZUHDIYATY**  
166020101111001Dipertahankan di depan penguji  
Pada tanggal : **20 Mei 2019**  
Dan dinyatakan memenuhi syarat**Komisi Pembimbing,**  
Prof. Dr. Maryunani, SE., MS  
Ketua  
Wildan Syafitri, SE., ME., Ph.D  
AnggotaMengetahui,  
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Brawijaya  
Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi  
Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.  
NIP. 19761003 200112 1 003

## LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

**Judul** : ANALISIS STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI *SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH* (Studi Kasus di Desa Kalipucang, Tukur, Pasuruan)

**Nama Mahasiswa** : NOOR ZUHDIYATY

**Program Studi** : ILMU EKONOMI

### KOMISI PEMBIMBING

**Pembimbing 1** : Prof. Dr. Maryunani, SE., MS

**Pembimbing 2** : Wildan Syafitri, SE., ME., Ph.D.

### TIM PENGUJI

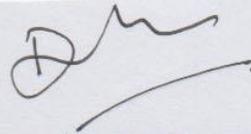
**Dosen Penguji 1** : Dr. Multifiah, SE., MS

**Dosen Penguji 2** : Dias Satria, SE., M.App.Ec., Ph.D

**Tanggal Yudisium** : 20 Mei 2019

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi



Devanto Shasta Pratomo, SE., M.Si., Ph.D.

NIP. 19761003 200112 1 003

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah TESIS dengan judul:

**"ANALISIS STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI *SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH* (Studi Kasus di Desa Kalipucang, Tukur, Pasuruan)"**

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 20 Mei 2019

Mahasiswa,



Nama : NOOR ZUHDIYATY  
NIM : 166020101111001  
PS : MAGISTER ILMU EKONOMI  
PPS FEB UB

## RIWAYAT HIDUP

Noor Zuhdiyaty ([diyahzuhdiyaty@gmail.com](mailto:diyahzuhdiyaty@gmail.com) / 085749469881), lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada tanggal 06 Desember 1993. Putri pertama Bapak Drs.H.Afdholluddin Zuhdi dan Ibu Dra.Hj.Siti Salamah. Menempuh pendidikan dasar pada MI Al Falah Kebonagung (1999-2005), sekolah menengah pertama pada MTs Unggulan Amanatul Ummah Surabaya (2005-2008), sekolah menengah keatas pada MA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya (2008-2011), dan strata satu pada S1 Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur (2011-2015).

Pengalaman kerja pada tahun 2014 pernah menjadi asisten peneliti pada lembaga PKEPK (Pusat Kajian Ekonomi Pembangunan dan Kerakyatan). Pada tahun 2017 dan 2018 pernah menjadi juri pada progam GSF ( *Green School Festival* ) yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang bersama Radar Malang. Pada tahun 2017-2018 pernah menjadi *technical asisten* pada progam PADI (*Pendidikan Agrobisnis Desa Iovatif*) I dan II oleh Komunitas Averroes Malang yang bekerjasama dengan pihak Sampoerna Indonesia. Pada tahun 2018-2019 pernah menjadi finance staff pada progam PADI *Pendidikan Agrobisnis Desa Iovatif*) III oleh Komunitas Averroes Malang yang bekerjasama dengan pihak Sampoerna Indonesia.

Malang, Mei 2019

Noor Zuhdiyaty

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur atas kehadiran, keridhoan dan keberkahan Allah SWT, yang telah memberikan segala kelimpahan rahmat dan berkat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proses pembelajaran pada perkuliahan pasca ilmu ekonomi serta tersusunnya tesis ini. Tidak lupa serta salam selalu terpanjatkan kepada Nabi besar Muhammada SAW beserta sahabat dan keluarganya, atas segala kasih saying beliau kepada umatnya.

Penulis menyadari dalam kesempatan menulis tesis ini memerlukan proses yang panjang. Pada perjalanannya begitu banyak pihak yang memberikan dukungan, motivasi serta masukan yang bermanfaat agar terselesaikannya tesis dengan baik dan lancar. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang terhormat:

1. Rektor Universitas Brawijaya Malang, Bapak Prof.Dr.Ir. Nuhfil Hanani AR.,MS yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Magister Ilmu Ekonomi pada Progam Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Nurkholis, SE., M.Bus.(Acc.), Ak., Ph.D. beserta jajaran civitas akademika yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Pendidikan Magister Ilmu Ekonomi pada Progam Pascasarjana Fakultas ekonomi dan Bisnis.
3. Ketua Jurusan Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bapak Dr.Devanto, atas dorongan dan kesempatan yang diberikan selama menempuh Pendidikan pascasarjana ilmu ekonomi.
4. Bapak Prof. Dr. Maryunani., SE., MS. selaku Promotor yang telah banyak memberikan saran, masukan, motivasi, dorongan serta bimbingan dalam proses perjalanan penyusunan tesis serta menyelesaikan studi magister ilmu ekonomi.
5. Bapak Wildan Syafitri SE., ME., Ph.D selaku Promotor yang telah banyak memberikan saran, masukan, motivasi, dorongan serta bimbingan dalam proses perjalanan penyusunan tesis serta menyelesaikan studi magister ilmu ekonomi.
6. Ibu Dr Multifiah selaku Penguji I yang telah banyak memberikan masukan serta motivasi sehingga terselesaikannya progam ini dengan baik.
7. Bapak Dias Satria SE., M.App.Ecc., Ph D. selaku Penguji I yang telah banyak memberikan masukan serta motivasi sehingga terselesaikannya progam ini dengan baik.
8. Bapak Hariyono selaku Kepala Desa Kalipucng beserta jajarannya yang telah memberikan banyak informasi dan dukungan terkait kondisi lapangan pada lokasi penelitian progam ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kedua orang tuaku Drs. Afdholluddin Zuhdi dan Dra.Siti Salamah atas segala motivasi, dukungan, dan doanya sehingga Ananda dapat menyelesaikan kuliah magister dan progam ini dengan baik. Semoga selalu diberikan kesehatan bagi keduanya.
10. Suamiku Nukman Adhim terimakasih atas supportnya yang tak pernah berhenti memberikan dukungan agar segera terselesaikannya progam ini dengan baik.
11. Adik-adikku Noor Imatuzzahidah dan Ni'matul izzah atas doa dan dukungannya dalam penyelesaian progam ini, terus semangat meraih mimpi dan semoga diberikan kemudahan.

12. Segenap anggota Komunitas Averroes yang telah menjadi keluarga kedua di Malang, terimakasih atas semua dukungan, tambahan wawasan pengetahuan, pengalaman serta doa sehingga terselesaikannya progam ini dengan baik.
13. Sahabatku serta adikku Chintya di pink house, terimakasih sudah setia menemani hari-hari dan memberikan motivasi serta doa untuk penyelesaian progam ini.
14. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 progam magister ilmu ekonomi Visi, Agatha, Teddy, Naila, Ricky, Kaffa, dll yang tak bias kusebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi teman sekaligus motivator seperjuangan yang berbagi suka duku selama penyelesaian progam ini. Semoga sukses selalu.
15. Teman-teman desa Kalipucang Riska Eva, Rizki, Ega, Rudi, terimakasih atas waktunya dan dukungannya agar terselesaikannya progam ini dengan baik.
16. Mbak Wiwin dan Cak Ucup beserta keluarga yang sudah seperti kelluarga sendiri. Terimakasih atas waktu dan tempat serta dukungannya selama penelitian berlangsung sehingga progam ini dapat terselesaikan dengan baik.
17. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sehingga terselesaikannya progam ini dengan baik.



Malang, Mei 2019

Noor Zuhdiyaty



**KATA PENGANTAR**

Dengan rahmat Allah SWT penulis dapat menyajikan Tesis ini dengan judul “ Analisis Strategi pembentukan “ANALISIS STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI *SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH* (Studi Kasus di Desa Kalipucang, Tuter, Pasuruan)”. Pada penelitian ini terdapat hal-hal mengenai Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan sebutan BUMDesa, yang merupakan sebuah lembaga untuk menaungi usaha masyarakat yang berada di desa. Penelitian ini menggunakan pisau analisis SLA (*Sustainable Livelihood Approach*) / Pembangunan berkelanjutan untuk mengupas mengenai kasus pendirian BUMDesa dengan studi kasus di Desa Kalipucang, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan ini masih terdapatnya keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, Mei 2019

Penulis.

**ABSTRACT**

**Noor Zuhdiyaty, Master Program in Economics, Faculty of Economics and Business, Brawijaya University. An Analysis of the Establishment Strategy of Village-owned Enterprises based on Sustainable Livelihood Approach (A Case Study in Kalipucang Village, Tukur, Pasuruan).**

The emergence of Acts of Village No. 6 of 2014 strengthen a point where a village has the authority to manage its own business while supporting the independence of the village. After all this time, a lot of villages that are not yet independent, including Kalipucang village, Tukur, Pasuruan. It is located at the under of the slopes of Bromo mountain which makes Kalipucang has its natural beauty, however there are no benefit from Bromo mountain yet. Moreover, Kalipucang is only used as a road towards Bromo mountain. There are also numerous of great amount of potential that can be found at Kalipucang village which are the 12,000 litres of pure milk that are being produced everyday, many beautiful areas that can be utilized as tourists attractions and also various of plants grow in this area such as durian, banana, etc. Although, these potentials are yet to be utilized optimally. The existence of village-owned enterprises is expected to be an institution or place where these potentials can be developed further. Village-owned enterprises itself is one of the solutions to mobilize the village economy that stands based on people initiative. Therefore, this research wants to see the village-owned enterprises that stands on based on the potentials that exist within five capitals in the Sustainable Livelihood System (SLA) which are natural capital, physical capital, human capital, financial capital and social capital. Hence the researcher goes with the title **“AN ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT STRATEGY OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES BASED ON SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH (A Case Study in Kalipucang Village, Tukur, Pasuruan)”**.

The purposes of this research are as follows: 1). To discover the use of the funds of the village in relation with the economic activities of Kalipucang village; 2). To discover the strong and the weak factors in the Sustainable Livelihood System (SLA) (natural capital, human capital, physical capital, financial capital and social capital) that exists in Kalipucang; 3). To arrange the strategy that will be implemented on the establishment of village-owned enterprises in Kalipucang village.

This research uses sequential mixed method approach and the research location is located at Kalipucang village, Tukur sub-district, Pasuruab regency. The results of the research show that the utilization of village fund in Kalipucang village are mostly used for the village development rather than the empowerment of the people of the village. Amongst the five capitals in SLA, the strongest capital is financial capital with 60.65%, the second is physical capital with 56.0%, the third is natural capital with 54.8%, the fourth is social capital with 53.4% and the last is human capital with 41.8%. Meanwhile the strategy that being applied first is the strategy that focus on the strongest capital and the weakest capital on the financial capital and human capital, then it will focusing on the other three capitals. Furthermore, the village-owned enterprises also needs to be able to deal with any kind of susceptibility that might occur in the future therefore it is expected to have its sustainability. The establishment of village-owned enterprises have several stages and they are as follows: (i) based on the initiative of the people, (ii) the identification of potentials based on 5 capitals of SLA, (iii) village meetings, (iv) the establishment of



articles of association/memorandum, (v) the proposal of village regulations, (vi) the establishment of village-owned enterprises.

**Keywords: village-owned enterprises, SLA, local village economic development, village**



**ABSTRAK**

**Noor Zuhdiyaty, Pascasarjana Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Analisis Strategi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Melalui Sustainable Livelihood Approach (Studi Kasus di Desa Kalipucang, Tukur, Pasuruan).**

Terbitnya UU Desa No.6 Tahun 2014 menguatkan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus serta mengatur urusannya sendiri serta mendukung adanya kemandirian desa. Selama ini masih banyak desa yang belum mandiri termasuk Desa Kalipucang, Tukur, Pasuruan. Letaknya yang di bawah lereng Gunung Bromo membuat Kalipucang memiliki keindahan alam nan indah, namun demikian belum ada manfaat yang dirasakan dari adanya Bromo. Selama ini Kalipucang hanya digunakan sebagai jalan atau lalu lalang menuju Bromo. Banyaknya potensi juga di temukan di Desa Kalipucang diantaranya susu murni sebesar 12.000 liter dihasilkan setiap harinya, banyaknya kawasan indah yang berpotensi untuk dijadikan tempat wisata, banyak tanaman juga tumbuh disana seperti durian, pisang, dll. Namun demikian adanya potensi yang ada masih belum dimanfaatkan secara optimal. Keberadaan BUM Desa diharapkan dapat menjadi suatu lembaga atau tempat untuk mengembangkan potensi yang ada. BUM Desa sendiri merupakan salah satu jalan untuk menggerakkan perekonomian desa yang beridiri atas prakarsa dan inisiatif masyarakat, sehingga pada penelitian ini ingin melihat BUM Desa berdiri berdasarkan potensi yang ada menggunakan lima modal yang ada dalam sustainable livelihood sistem (SLA) yaitu modal alam, modal fisik, modal manusia, modal keuangan dan modal sosial. Dengan demikian penulis mengambil judul **“ANALISIS STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH (Studi Kasus di Desa Kalipucang, Tukur, Pasuruan)”**.

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah 1) mengetahui penggunaan dana desa kaitannya dengan aktivitas ekonomi Desa Kalipucang; 2) untuk mengetahui faktor-faktor yang kuat dan lemah dalam *sustainable livelihood sistem* (SLA) (modal alam, modal manusia, modal fisik, modal keuangan dan modal sosial) yang ada di Kalipucang; 3) untuk menyusun strategi yang digunakan pada pembentukan BUM Desa di Desa Kalipucang. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode berurutan campuran (*sequential mixed method*). Lokasi peelitian di Desa Kalipucang Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Hasil studi memperlihatkan bahwa penggunaan dana desa di Kalipucang selama ini masih banyak digunakan untuk pembangunan desa daripada untuk pemberdayaan masyarakat. Adapun diantara kelima modal dalam SLA, modal paling kuat yaitu pada modal keuangan sebesar 60,65, kedua modal fisik 56,0%, ketiga modal alam sebesar 54,8%, keempat modal sosial sebesar 53,4%, dan modal manusia sebesar 41,8%. Sementara strategi yang digunakan adalah dengan fokus pada modal yang paling kuat dan lemah terlebih dahulu yaitu pada modal keuangan dan modal manusia, kemudian baru difokuskan pada ketiga modal lainnya, selian itu BUM Desa nanti juga harus mampu menghadapi segala bentuk kerentanan yang mungkin terjadi sehingga diharapkan dapat memiliki keberlanjutan usaha, pembentukan BUM Desa sendiri juga memiliki beberapa tahapan, yaitu (i) atas prakarsa masyarakat, (ii) identifikasi potensi berdasarkan lima modal SLA, (iii) musdes, (iv) pembuatan AD/ART, (v) pengusulan penetapan perdesa, (vi) pembentukan BUM Desa.

Kata Kunci: BUM Desa, SLA, Pembangunan ekonomi lokal desa, desa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR IDENTITAS KOMISI PENGUJI DAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penulisan .....	10
1.4 Manfaat Penulisan .....	11
1.5 Batasan Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
2.1 Definisi Desa .....	12
2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) .....	12
2.2.1 Macam-macam BUM Desa .....	15
2.2.2 BUM Desa sebagai Bisnis Sosial dan	
Komersial .....	16
2.2.3 Kiat – kiat Kesuksesan BUM Desa .....	17
2.3 Sustainable Livelihood (SL) .....	18
2.4 Sustainable Livelihood Approach (SLA) .....	19
2.5 Pembangunan Perdesaan dan Desa .....	26
2.6 Modal Sosial .....	27
2.7 Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) .....	29
2.8 Need Assesment .....	30
2.9 Peran Pemerintah dalam Masyarakat .....	31
2.10 Sumber Daya Bersama menurut Selanov Ostrom .....	32
2.11 Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN</b>	
3.1 Kerangka Pemikiran .....	39
3.2 Kerangka Analisis .....	41
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	
4.1 Pendekatan Penelitian .....	43
4.2 Lokasi Penelitian .....	44
4.3 Informan Penelitian .....	44
4.4 Teknik Pengumpulan Data .....	44
4.5 Metode Analisis .....	47
<b>BAB V GAMBARAN UMUM</b>	
5.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan .....	51
5.2 Gambaran Geografis Desa Kalipucang .....	52
5.2.1 Kondisi Demografis .....	52
5.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi .....	53
5.2.3 Potensi Unggulan Desa .....	54

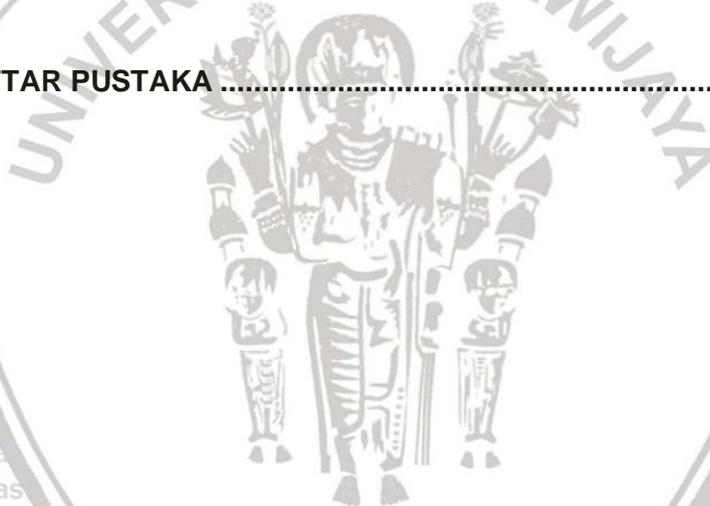
**BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN**

6.1	Hubungan Dana Desa dengan Aktivitas Ekonomi Desa Kalippucang	57
6.2	Hasil Analisis Statistik	61
6.2.1	Modal yang Paling Kuat dan Lemah diantara lima modal dalam SLA	63
6.2.1.1	Modal Keuangan	64
6.2.1.2	Modal Fisik	73
6.2.1.3	Modal Alam	76
6.2.1.4	Modal Sosial	82
6.2.1.5	Modal Manusia	86
6.2.2	Strategi Pembentukan BUM Desa berbasis SLA (Sustainable Livelihood Approach)	88

**BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN**

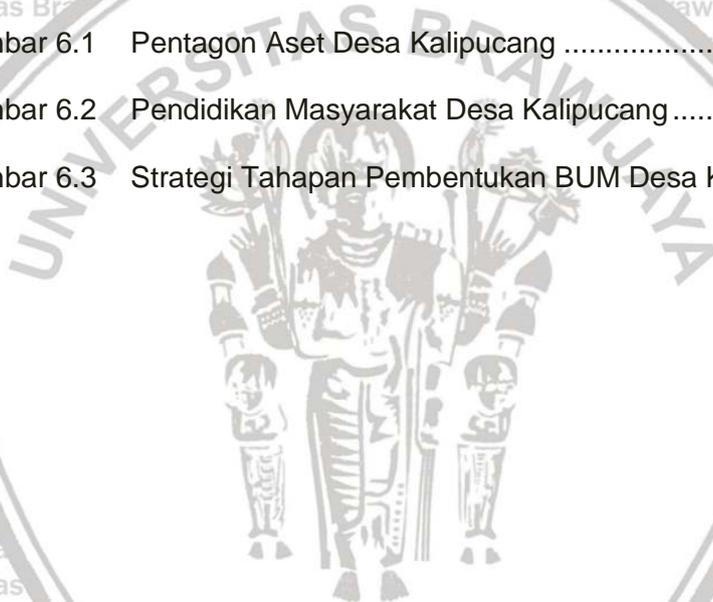
7.1	Kesimpulan	109
7.2	Rekomendasi	110

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>114</b>
-----------------------	------------



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Analisis Gap Kemandirian Desa di Sektor Pendidikan (2015).....	5
Gambar 1.2. Analisis Gap Kemandirian Desa di Sektor Kesehatan (2015).....	5
Gambar 1.3. Analisis Gap Kemandirian Desa di Sektor Ekonomi (2015).....	5
Gambar 1.4. Analisis Gap Kemandirian Desa di Sektor Infrastruktur (2015).....	6
Gambar 2.1 Gambar Pentagon Aset Sustainable Livelihood Approach .....	24
Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran .....	40
Gambar 3.2 Kerangka Analisis .....	42
Gambar 6.1 Pentagon Aset Desa Kalipucang .....	63
Gambar 6.2 Pendidikan Masyarakat Desa Kalipucang .....	86
Gambar 6.3 Strategi Tahapan Pembentukan BUM Desa Kalipucang .....	107



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Jumlah Desa Mandiri dan Tidak Mandiri di Indonesia Berdasarkan Provinsi ..... 2

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012 - 2017 ..... 4

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu ..... 35

Tabel 4.1. Definisi Operasional Variabel ..... 45

Tabel 5.1. Jumlah Peternak Desa Kalipucang ..... 53

Tabel 6.1. Nilai KMO Pada Analisis Faktor ..... 62

Tabel 6.2. Perbandingan Koperasi dan BUM Desa ..... 72

Tabel 6.3. Tabel Potensi dan Rekomendasi Usaha pada BUM Desa Kalipucang ..... 96



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini desa mendapat kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri, sehingga desa dapat mengatur sendiri kebutuhannya. Hal itu diperjelas dengan diterbitkannya UU Desa No.6 Tahun 2014. Tujuan UU desa tersebut tidak lain adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat di desa.

Sebenarnya sebelum adanya UU desa tersebut, desa telah lama memiliki otonominya sendiri yang disebut otonomi asli. Otonomi asli adalah kewenangan pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus desanya berdasarkan hak asal usul dan nilai budaya masyarakat setempat serta masih mengikuti aturan administrasi pemerintahan yang mengikuti jaman, hal tersebut tertuang dalam PP No.72 Tahun 2005 tentang desa. (Eko et al., 2014).

Namun demikian UU Desa No. 6 Tahun 2014 tidak mengenal istilah otonomi desa dan lebih mengenal kemandirian desa. Mengingat hal tersebut di Indonesia masih banyak desa tertinggal, sehingga belum banyak desa yang menyanggah status desa mandiri. Tabel 1.1 di bawah menggambarkan bahwa jumlah desa mandiri di Indonesia tidak begitu banyak, begitu juga dengan berbagai provinsi yang ada di Indonesia masih memiliki jumlah desa mandiri yang sangat kecil, bahkan ada beberapa provinsi yang tidak memiliki desa mandiri. Selain itu jumlah desa tertinggal di Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar yaitu sebesar 33.529 dari keseluruhan jumlah desa sebesar 73.709, yang berrati hampir 50% dari jumlah desa yang ada di Indonesia masih tertinggal.

**Tabel 1.1 Jumlah Desa Mandiri dan Tidak Mandiri di Indonesia Berdasarkan Provinsi 2015**

No.	Provinsi	Mandiri	Maju	Berkembang	Tertinggal	Sangat tertinggal	Jumlah
1	Aceh	5	105	1226	4211	963	6510
2	Sumatera Utara	0	39	1063	3019	1285	5406
3	Sumatera Barat	7	119	377	332	51	886
4	Riau	0	9	278	888	428	1603
5	Jambi	0	14	345	839	191	1389
6	Sumatera Selatan	0	18	553	1990	290	2851
7	Bengkulu	0	22	386	768	180	1356
8	Lampung	1	57	912	1302	151	2423
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	7	127	169	6	309
10	Kepulauan Riau	0	5	54	187	26	272
11	Jawa Barat	39	726	3141	1355	60	5321
12	Jawa Tengah	21	868	4335	2535	50	7809
13	DI Yogyakarta	32	136	175	49	0	392
14	Jawa Timur	33	929	4458	2262	39	7721
15	Banten	4	53	396	674	110	1237
16	Bali	27	248	279	78	4	636
17	Nusa Tenggara Barat	3	63	553	364	12	995
18	Nusa Tenggara Timur	0	7	274	2206	464	2951
19	Kalimantan Barat	0	30	225	752	1002	2009
20	Kalimantan Tengah	0	8	118	643	658	1427
21	Kalimantan selatan	1	16	411	1184	252	1864
22	Kalimantan Timur	0	8	140	393	295	836
23	Kalimantan Utara	0	4	33	117	290	444
24	Sulawesi Utara	0	15	554	852	84	1505
25	Sulawesi Tengah	0	15	508	1084	202	1809
26	Sulawesi Selatan	1	28	876	1181	154	2240
27	Sulawesi Tenggara	0	3	228	1410	250	1891
28	Gorontalo	0	14	265	348	30	657
29	Sulawesi Barat	0	4	151	286	134	575
30	Maluku	0	16	120	431	483	1050
31	Maluku Utara	0	10	150	557	349	1066
32	Papua Barat	0	5	63	364	1060	1492
33	Papua	0	7	108	762	3900	4777
34	Rata2 nasional RI	174	3608	2282	33592	13453	73709

Sumber : Indeks Desa Membangun 2015

Pembangunan desa sendiri merupakan bagian dari pembangunan Nasional, dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Adanya tujuan pembangunan salah satu wujudnya adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang nanti diharapkan dapat mengembangkan perekonomian rakyat. Perekonomian rakyat yang kokoh dan kuat dapat membuat masyarakat lebih mandiri karena memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, dengan demikian akan tercipta kemandirian lokal yakni suatu daerah dapat mengembangkan daerahnya sendiri (Adisasmita, 2013).

Pada konsep pembangunan Desa ditemukan beberapa permasalahan, antara lain permasalahan sosial, ekonomi, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan dalam negeri (Muhi, 2011). Pembangunan yang ada selama ini juga lebih cenderung berorientasi pada pertumbuhan perkotaan sehingga sumber daya ekonomi yang ada di desa dimanfaatkan oleh kekuatan yang lebih besar dan hal tersebut mengakibatkan habisnya sumberdaya desa yang akhirnya menimbulkan urbanisasi (Sitorus, 2007).

Masalah kemiskinan juga lebih sering dijumpai di desa daripada kota, Hal tersebut terlihat pada tabel 1.2 dibawah ini, pada tahun 2012 sampai 2017 kemiskinan di daerah perDesaan memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan perkotaan, yakni mencapai dua kali lipat dari jumlah perkotaan. Meskipun setiap tahunnya kemiskinan di perdesaan mengalami penurunan namun jumlahnya relatif kecil.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk di Indonesia Tahun 2012 - 2017

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam juta)		
	Perkotaan	Perdesaan	% Kota terhadap Desa
2012	10,647	18,485	7,84
2013	10,481	17,831	7,35
2014	10,432	17,572	7,14
2015	10,637	17,917	7,28
2016	10,413	17,473	7,06
2017	10,674	17,098	6,42

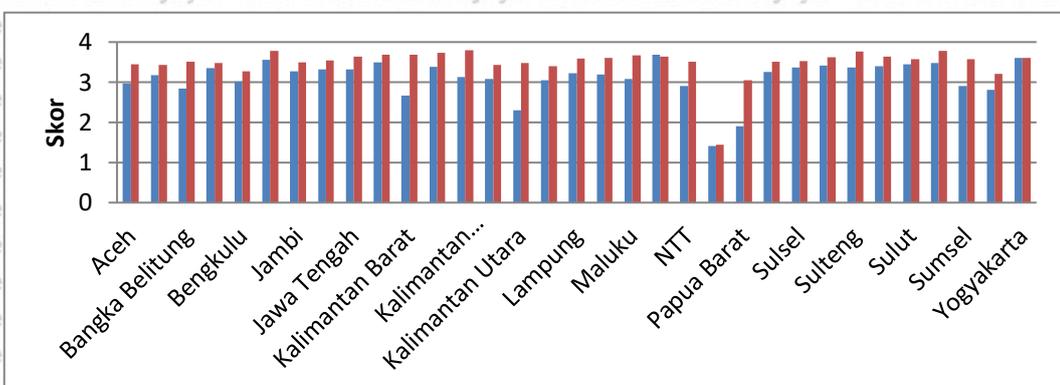
Sumber : BPS Indonesia

Perlu diketahui juga bahwa kemiskinan tidak selesai hanya di tingkat angka yang mengecil, penanggulangan kemiskinan seharusnya hadir menjadi cerita warga yang berhasil memperoleh kuasa atas hak memiliki, hak mengelola dan hak memanfaatkan aset untuk sumber penghidupan. (Zamroni, Anwar, Yulianto, Rozaki, 2015). Selain kemiskinan, ada beberapa masalah yang sering di hadapi oleh desa, antara lain: *pertama* tradisi berdesa yang masih lemah, tradisi berdesa yang dimaksud disini adalah identitas desa yang dapat dimulai dari pemetaan sosial dan pengambilan keputusan secara kolektif, *kedua* Kepala desa yang tidak mempunyai imajinasi atau prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat/mengonsolidasi aset ekonomi lokal, *ketiga* pemerintah desa dan masyarakat sibuk mengurus dana bantuan dari pemerintah yang umumnya tidak diarahkan untuk membangun ekonomi kolektif, *keempat* pemerintah desa cenderung bias fisik, yang umumnya tidak sensitif pada pergerakan ekonomi, dan *kelima* desa tidak mempunyai dana memadai sebagai modal investasi lokal (Eko et al., 2014).

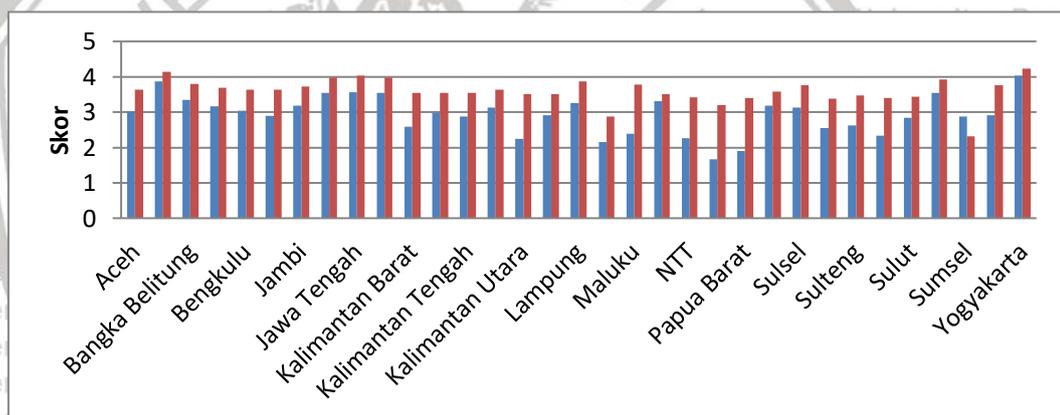
Hal tersebut juga diperjelas oleh Putra (2016) pada bukunya yang berjudul *Indonesia Village Reform and Development Outlook 2019* tentang analisis gap kemandirian Desa berdasarkan kondisi faktual dengan kondisi idealnya dilihat dari empat sektor yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan insfrastruktur. Garis yang

bewarna merah menggambarkan kondisi idealnya sementara garis yang bewarna biru menggambarkan kondisi faktualnya.

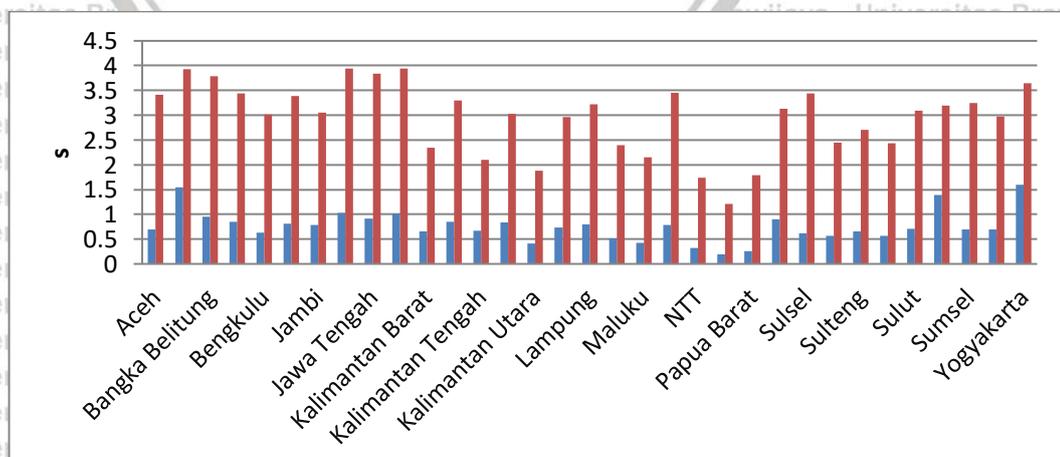
Grafik 1.1 Analisis Gap Kemandirian Desa di Sektor Pendidikan (2015)



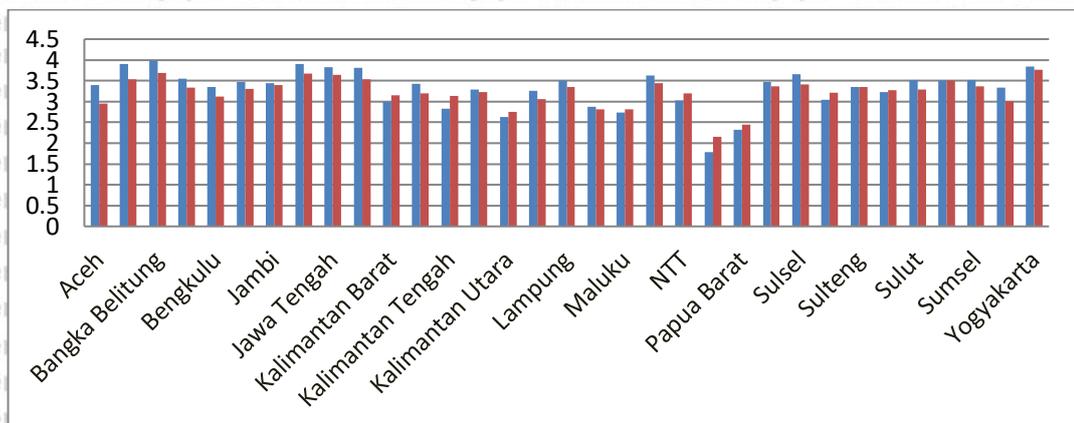
Grafik 1.2 Analisis Gap Kemandirian Desa di Sektor Kesehatan (2015)



Grafik 1.3 Analisis Gap Kemandirian Desa di Sektor Ekonomi (2015)



Grafik 1.4. Analisis Gap Kemandirian Desa di Sektor Insfrastruktur (2015)



Sumber : Buku *Indonesia Village Reform and Development Outlook 2019* (Kemendesa 2016)

Pada keempat grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada sektor pendidikan dan kesehatan memiliki gap yang relatif kecil antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan, sektor insfrastruktur sendiri memiliki gap relatif lebih kecil dibanding tiga sektor lainnya dimana kondisi faktual dan ideal hampir sama.

Sementara pada sektor ekonomi terlihat bahwa adanya gap yang tajam yang memiliki jarak cukup jauh antara kondisi faktual dan idealnya, yang berarti pada sektor ekonomi perlu adanya perhatian lebih dari pelbagai pihak dengan tetap memerhatikan pada sektor yang lain.

Dewasa ini pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dana desa untuk mengembangkan perekonomian desa dengan tujuan antara lain: (i) peningkatan pelayanan publik di desa; (ii) memajukan perkonomian desa; (iii) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa; serta (iv) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Putra, 2016)

Alokasi dana desa telah disalurkan sejak tahun 2014 ke semua provinsi yang ada di Indonesia termasuk Jawa Timur. Jawa Timur mendapatkan dana desa sebesar 1,16 triliun dengan jumlah kabupaten/kota berjumlah 30 (Kemenkeu : 2014). Pasuruan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang telah

menerima dana desa dan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 215,692

Milyar lebih yang bersumber dari dana desa. Kalipucang sendiri adalah salah satu desa di Kabupaten Pasuruan yang telah menerima dana desa tersebut.

Letak Desa Kalipucang yang berada di lereng gunung Bromo membuat tanahnya subur dan kaya akan potensi alamnya, baik dari segi pertanian, perkebunan, peternakan serta hutan dan kondisi alamnya. Lahan perkebunan juga memiliki luas sebesar 361,071 Ha lebih besar dibandingkan dengan luas pemukiman warga yang hanya sebesar 61,205 Ha.

Meski letak desa yang berada di bawah lereng Bromo, selama ini Kalipucang belum merasakan adanya manfaat yang dirasakan oleh keberadaan Bromo itu sendiri. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Bromo dan hanya menjadikan Desa Kalipucang sebagai tempat yang dilalui begitu saja, sehingga tidak ada yang mengenalnya. Kalipucang sendiri masih tergolong desa yang belum mandiri atau miskin, hal itu terlihat masih adanya warga desa yang membutuhkan bantuan MCK (Mandi, cuci, dan Kakus).

Meski demikian tanahnya yang subur membuat banyak tanaman yang dapat tumbuh disana, salah satunya yaitu buah-buahan, diantaranya buah durian, alpukat, pisang, langsung dan manggis. Desa Kalipucang sendiri juga terkenal akan peternakan sapi dimana peternakan tersebut menghasilkan susu sapi merah yang melimpah, dalam satu hari Desa Kalipucang mampu menghasilkan sejumlah 12.000/liter susu sapi murni.

Selain itu potensi alam yang indah mempercantik keberadaan Desa Kalipucang. Banyak kawasan yang dapat dijadikan wisata seperti perbukitan, sumber mata air, kebun kopi, dsb. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi Desa Kalipucang untuk dijadikan tempat wisata. Namun demikian, belum diketahui dengan jelas apakah adanya berbagai potensi yang ada di Kalipucang khususnya

potensi alam telah dimanfaatkan secara optimal atau belum pada kegiatan pengembangan ekonomi lokal desa.

Adanya berbagai aset yang dimiliki oleh Kalipucang diharapkan akan dapat mengembangkan perekonomian desa. Desa sebagai penggerak ekonomi lokal dapat memanfaatkan aset lokal serta konsolidasi lahan subsisten menjadi lahan produktif (Eko et al., 2014). Organisasi ekonomi juga memiliki peran penting dalam memikul beban untuk menggerakkan aktivitas ekonomi desa dimana organisasi tersebut harus memiliki ketangkasan dan kecakapan dalam menjalankan usaha serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kemanfaatan secara sosial (Putra, 2016).

Berbagai macam organisasi di desa diantaranya PKK desa, karangtaruna, usaha kecil menengah, usaha keuangan mikro, koperasi dan BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa). Hadirnya BUM Desa dianggap sebagai institusi serta penggerak ekonomi berbasis Desa. Selain itu BUM Desa dapat menjadi bagian dari peningkatan ekonomi regional dan nasional (Ridwan : 2014).

Zulkarnaen (2016) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa BUM Desa dapat mewujudkan kemandirian desa yang nantinya akan mampu bersinergi antar lembaga untuk kesejahteraan masyarakat. BUM Desa dimaksudkan sebagai wadah usaha desa, dengan spirit kemandirian, kebersamaan dan kegotongroyongan antara pemerintah desa dan masyarakat, yang mengembangkan aset lokal. BUM Desa tentu juga bermaksud memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat (Eko et al., 2014).

BUM Desa menjadi salah satu wadah atau jalan untuk membangun ekonomi desa dari masyarakat desa itu sendiri. Salah satu contoh desa yang berhasil atau tumbuh dengan adanya BUM Desa yaitu Desa labbo yang terletak di Kabupaten Bantaeng. Kelangkaan akan air bersih menjadi masalah utama pada

desa ini, adanya dana hibah dialokasikan untuk modal awal BUM Desa dalam pengembangan unit usaha pengelolaan air bersih. Seiring berjalannya waktu BUM Desa labbo memiliki 415 pelanggan yang tersebar di empat dari enam dusun, setiap bulannya juga mendapatkan laba yang dapat menunjang pendapatan asli desa. (Eko et al., 2014).

Modal yang digunakan untuk mendirikan sebuah BUM Desa dapat berasal dari adanya dana desa. Namun, meski setiap desa telah mendapatkan dana desa dari pemerintah tetapi tidak serta merta dapat secara langsung mendirikan BUM Desa. Pada pendirian BUM Desa sebenarnya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah desa. Hal tersebut diatur dalam Permendagri No.39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Kalipucang memiliki segudang potensi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian potensi tersebut masih terus perlu digali dan dikembangkan agar berdampak nyata terhadap kemajuan desa ataupun kesejahteraan masyarakat setempat. Sehingga Kalipucang dianggap menjadi lokasi yang tepat guna melakukan penelitian dengan beberapa pertimbangan diantaranya: *pertama*: banyaknya potensi yang ada di desa khususnya pada sumberdaya alam, *kedua*; terdapatnya Dana Desa yang dapat dimanfaatkan untuk penggunaan modal awal jika ingin mendirikan BUM Desa, *ketiga*; BUM Desa di Kalipucang baru berdiri dan masih proses berjalan.

Kalipucang dirasa masih membutuhkan berbagai masukan guna mendukung proses berjalannya BUM Desa kedepannya. Adanya BUM Desa sendiri tidak dapat dengan mudah dibentuk kemudian langsung berjalan karena sebelum pembentukannya sendiri masih membutuhkan *assessment* terkait aset, potensi dan kebutuhan desa. Eko et al (2014) dalam bukunya menjelaskan bahwa gerakan ekonomi desa dapat dilakukan bertahap dan sembari mengalir seperti halnya dimulai dari hal kecil yaitu penanaman pohon produktif yang kemudian

dapat berkembang ke pertanian kolektif, ketika sudah mulai canggih dan maju dapat mendirikan industry lokal.

Adapun dari paparan diatas, adanya berbagai masalah yang dihadapi oleh desa serta mengingat berbagai pertimbangan yang ada di Desa Kalipucang, maka dari itu penulis ingin melihat dimana BUM Desa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi yang masyarakat miliki dengan pendekatan *Sustainable Libelihood Approach* (SLA) yang terdiri dari lima modal yaitu modal alam, modal fisik, modal manusia, modal keuangan dan modal sosial.. Tujuan dari penggunaan

pendekatan ini juga ingin melihat lebih dalam agar BUM Desa yang ada nantinya bisa *sustainable* atau memiliki keberlanjutan yang jelas terhadap penghidupan masyarakat kedepannya. Dengan demikian, penulis mengambil judul **“ANALISIS**

**STRATEGI PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI SUSTAINABLE LIVELIHOOD APPROACH (Studi Kasus di Desa Kalipucang, Tutur, Pasuruan)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penggunaan dana Desa untuk modal pengembangan ekonomi lokal Desa Kalipucang ?
2. Faktor-faktor apa yang kuat dan lemah dalam SLA (modal alam, modal manusia, modal fisik, modal keuangan dan modal sosial) yang berada di Desa Kalipucang dan kaitannya dengan BUM Desa?
3. Bagaimana strategi pembentukan BUM Desa di Desa Kalipucang?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penggunaan dana Desa kaitannya dengan aktivitas ekonomi Desa Kalipucang.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang kuat dan lemah dalam SLA (modal alam, modal manusia, modal fisik, modal keuangan dan modal sosial) yang ada di Kalipucang.

3. Untuk menyusun strategi yang digunakan pada pembentukan BUM Desa di Desa Kalipucang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu menjadi pedoman pemerintah khususnya pemerintah desa jika akan membentuk sebuah BUM Desa di Desa Kalipucang.

##### 2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan sebagai bentuk pengembangan ekonomi lokal desa yang berkaitan dengan pembentukan BUM Desa. Selain itu juga menambah khasanah bacaan tentang alat SLA sebagai bentuk pendekatan.

##### 3. Bagi Masyarakat

Menjadi sumber pengetahuan pada masyarakat dalam pertimbangan pembentukan BUM Desa.

#### 1.5 Batasan Penelitian.

Pada penelitian ini hanya sampai pada tahap pembentukan BUM Desa, tidak sampai ke tahap pengelolaan BUM Desa. Selain itu penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Definisi Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU NO.6 2014, UU No.2 2016).

Sedangkan menurut BPS desa adalah wilayah administrasi terendah dalam hierarki pembagian wilayah administrasi Indonesia di bawah kecamatan. Desa juga dapat dimaknai sebagai sebuah arena yang inklusif yang didalamnya terdapat beraneka komunitas dan kelas (Putra, 2016), sementara dalam pemaknaan yang sempit desa dimaknai sebagai sebuah teritori yang memiliki kewenangan dan struktur pemerintahan tertentu.

Menurut Dharmawan dalam Zamroni (2015) desa juga dapat dipahami sebagai sebuah kawasan dengan entitas sosial dan ekologi di dalamnya, dimana setiap penduduknya secara sendiri-sendiri ataupun kelompok membina system penghidupan (system nafkah atau *livelihood system*) melalui pertukaran alam dengan sekitarnya.

### 2.2 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desaa sebenarnya bukan nama baru, meskipun baru beberapa tahun terakhir nomenklaturnya dikeluarkan oleh pemerintah, dulu lebih dikenal dengan istilah institusi sosial dan keuangan mikro yang dibentuk oleh pemerintah seperti BKD, BIN, MAS, KUPEDES, KIK, KCK, BUUD, KUD, UEDSP, LPD di Bali sejak

1985, UPK dan SPP dalam PNPM Mandiri (Eko *et al.*, 2014). BUM Desa adalah wadah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Permendagri, 2010). BUM DESA juga bermaksud memberikan sumbangan terhadap penanggulangan kemiskinan dan pencapaian kesejahteraan rakyat.

Sementara dalam pasal 1 UU no.6 tahun 2014 yang dimaksud BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa juga bisa diartikan sebagai lembaga/badan perekonomian desa yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat, dikelola secara ekonomis, mandiri professional (Sukasmanto, 2014). BUM Desa memiliki tujuan, diantaranya (Syafitri:2017):

- Meningkatkan perekonomian Desa
- Mengoptimalkan aset desa
- Meningkatkan usaha masyarakat
- Mengembangkan rencana kerja
- Menciptakan peluang dan jaringan pasar
- Membuka lapangan kerja
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Pembuatan BUM Desa sendiri juga memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh desa, sehingga bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan belum dapat mendirikan BUM Desa, sehingga disebutkan dalam UU No.6 tahun 2014 bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan bukan harus

mendirikan. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut pasal 5 ayat 1 (Permendagri, 2010) :

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
2. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat
3. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi, dan
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatn asli desa.

Sementara untuk sumber permodalan BUM Desa berasal dari lima sumber yaitu: (a) pemerintah desa, (b) tabungan masyarakat, (c) bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, (d) pinjaman; dan (e) kerjasama usaha dengan pihak lain ( pasal 14 dalam permendagri no 39 Tahun 2010.

BUM Desa menjadi salah satu jalan untuk memajukan desa, ketika desa kebingungan untuk mewadahi potensi yang dimiliki maka BUM Desa dapat menjadi sebuah wadahnya. Adanya BUM Desa juga akan memperkuat secara kelembagaan dimana secara struktur garisnya juga jelas membawahi beberapa unit jenis usaha, selain itu juga akan diperkuat oleh adanya peraturan desa terkait pengaturan

BUM Desa. Ketika suatu BUM Desa sudah mulai berdiri dan berjalan dimana pengurus dan pengelola BUM Desa diwajibkan berasal dari anggota masyarakat yang ada di desa terkait, maka secara tidak langsung BUM Desa turut serta mengurangi pengangguran di desa dan meminimalisir adanya migrasi ke luar desa, karena adanya lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa.

### 2.2.1 Macam-macam BUM Desa

Adapun berdasarkan jenisnya menurut BUM Desa dibagi menjadi tujuh jenis usaha, antara lain :

1. **Bisnis Sosial (Serving)** : memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh finansial, contoh : air minum desa, usaha listrik desa, lumbung pangan, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
2. **Penyewaan (Renting)** : melayani kebutuhan masyarakat desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa, contoh : alat transportasi, perkakas pesta, gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa, barang sewaan lainnya.
3. **Perantara (Brokering)** : memberikan jasa pelayan kepada warga, contoh: jasa pembayaran listrik, pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat, dan jasa pelayanan lainnya.
4. **Berdagang (Trading)**: memproduksi atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala yang lebih luas, contoh : pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, sumur bekas tambang, dan kegiatan bisnis produktif lainnya.

5. **Bisnis Keuangan (Banking)** : memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, dapat berupa akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses masyarakat desa.

6. **Usaha Bersama (Holding)** : induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa baik dalam skala lokal desa maupun kawasan perdesaan yang dapat berdiri sendiri dan diatur/dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama. Contoh pengembangan kapal desa berskala besar untuk mengorganisasikan nelayan kecil agar usahanya lebih ekspansif atau desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok lainnya. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasi usaha lokal lainnya.

7. **Contracting**: jasa CS dan kontraktor bangunan. (Syafitri: 2017).

### **2.2.2. BUM Desa sebagai Bisnis Sosial dan Komersial**

Bisnis sosial adalah sebuah usaha atau organisasi yang dioptimalkan untuk menguntungkan seluruh elemen dalam usaha tersebut seperti konsumen, karyawan, pemilik ataupun mitra, dengan cara menciptakan kolaborasi, berbagai informasi dan keterlibatan aktif kedalam pengoperasian usaha dan budaya ([www.advs.com](http://www.advs.com)). Pada UU Desa yaitu UU No.6 Tahun 2014 telah memberikan gambaran bahwa BUM Desa bukanlah sebuah badan usaha yang hanya terfokus pada kegiatan komersial tetapi juga sosial. Sehingga BUM Desa memiliki dua fungsi yaitu sebagai badan usaha komersial untuk mencari dan memperoleh keuntungan dan juga badan usaha sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan melayani demi kesejahteraan masyarakat.

BUM Desa sendiri merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan sekaligus komersial (commercial institution). BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada

kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan (laba) dari berbagai usaha/bisnis yang dijalankannya (Hastowiyono dan Suharyanto : 2014).

Zamroni,dkk (2015) juga menjelaskan bahwa BUM Desa sebagai institusi sosial bisnis. Sehingga BUM Desa dapat mendorong proses pelebagaan relasi sosial kemasyarakatan yang humanis serta turut mempromosikan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis atau dapat juga dikatakan bahwa BUM Desa sebagai pelestari nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal yang dibutuhkan masyarakat komunal Desa.

Perlu diketahui bahwa di BUM Desa mekanisme operasionalisasi sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat desa diharapkan dapat memahani gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yang bersifat sosial dan komersial, dua fungsi tersebut ada pada diri badan BUM Desa (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan : 2007).

### **2.2.3. Kiat – Kiat Kesuksesan BUM Desa**

BUM Desa adalah sebuah badan usaha yang dapat mengalami kegagalan layaknya usaha-usaha pada umumnya. Terlebih lagi BUM Desa dikelola secara bersama oleh sejumlah masyarakat yang ada di sebuah desa terkait (desa yang memiliki BUM Desa). Namun demikian tidak menutup kemungkinan desa dapat maju karena keberhasilan dari BUM Desa yang dimiliki. Menurut Eko,et all ( 2014) ada beberapa hal yang dapat dilakukan guna menunjang keberlanjutan dan keberhasilan suatu BUM Desa, antara lain :

1. Kepemimpinan, manajerial dan tata kelola merupakan faktor kunci pembuka pada setiap jenis usaha BUM Desa. Manajerial dan tata kelola

yang baik merupakan faktor dasar yang mendukung dan menyokong keberlanjutan serta kesehatan BUM Desa.

2. Setiap jenis usaha yang dipilih pada BUM Desa tidak berdiri sendiri melainkan memiliki mata rantai dengan sector-sektor lainnya yang dapat mempengaruhi sector usaha, sehingga antar sector memiliki keterkaitan untuk saling mendukung.
3. Keberlanjutan suatu BUM Desa sangat dipengaruhi oleh skala dan jangkauan usaha. BUM Desa yang menjalankan bisnis internal (melayani kebutuhan warga setempat seperti kebutuhan pokok, air bersih, kompos, saprotan) dengan jangkauan dan berskala lokal, umumnya menghadapi risiko yang rendah sehingga bisa berjalan sehat dan berkelanjutan.
4. BUM Desa sebaiknya tumbuh dari emansipasi masyarakat lokal, karena jika demikian BUM Desa jauh lebih kuat dan berkelanjutan daripada BUM Desa yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas. Ini sudah terbukti pada banyak daerah baik di Lombok Barat, Dompu, Bantaeng, Gowa, Bandung, Gunungkidul dan daerah-daerah lain.
5. Adanya tradisi berdesa yang paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik. Hal ini merupakan faktor yang sangat memengaruhi daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa.

### 2.3 Sustainable Livelihood (SL)

Penghidupan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan sebutan *Sustainable Livelihood* (SL) Gagasan penghidupan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh Brundtland Komisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan sebagai cara menghubungkan pertimbangan sosioekonomi dan ekologis secara kohesif, relevan dengan kebijakan struktur. SL lebih berfokus pada daerah

perdesaan dan situasi dimana orang adalah petani atau mencari nafkah dari berbagai swadaya produksi.

Menurut Chambers dan dan Conway dalam (Krantz, 2001) mata pencaharian dalam penghidupan berkelanjutan terdiri dari ( toko, sumberdaya, klaim dan akses) dan kegiatan yang dibutuhkan untuk sarana hidup: pembangunan berkelanjutan dapat mengatasi stress dan guncangan, mempertahankan atau meningkatkan asetnya, dan memberikan peluang mata pencaharian berkelanjutan bagi generasi penerus, dan memberikan kontribusi manfaat bersih bagi penghidupan lainnya di tingkat lokal dan global baik dalam jangka pendek ataupun panjang.

#### 2.4 SLA (*Sustainable livelihood Approach*)

Pembangunan perdesaan telah mengalami kemajuan, yang kemudian pada tahun 1997 SLA hadir sebagai konsep pembangunan yang relevan diterapkan pada daerah berkembang. Menurut Allison (2003), SLA diterapkan untuk menginformasikan desain intervensi kebijakan dan pengembangan yang bertujuan mengurangi kemiskinan. Selain kemiskinan SLA juga dapat digunakan untuk merumuskan tujuan peningkatan livelihood masyarakat miskin, sebagai panduan tentang prinsip pengentasan kemiskinan serta model dalam pendekatan pembangunan.

Pada SLA terdapat beberapa prinsip. Adapun Prinsip SLA menurut Ashley dan Carney 1999 dalam (Carney, 2003)/DFID :

- People – centred: memahami perbedaan kelompok yang ada pada manusia dan bekerja bersama mereka pada sebuah jalan dimana kongruen dengan strategi penghidupan mereka, lingkungan sosial dan kemampuan untuk beradaptasi.

- Responsif dan partisipatif: masyarakat miskin adalah kunci aktor untuk mengidentifikasi dan menangani prioritas penghidupan, serta menyediakan proses bagi orang luar untuk mendengar dan merespon orang miskin.

- Multi – level: pengurangan kemiskinan adalah tantangan besar yang dapat diatasi dengan berkerja pada berbagai tingkatan atau level. Memastikan bahwa aktivitas pada mikro level memberikan info pada pembangunan terkait kebijakan lingkungan yang efektif. Dan pada makro level struktur dan proses yang mendukung orang untuk membangun atas kekuatan diri mereka.

- Dibangun berdasarkan kerjasama/kemitraan: Bekerjasama dengan pemerintah, publik, sektor swasta ataupun pendonor.

- Berkelanjutan: ada empat dimensi kunci untuk berkelanjutan, ekonomi, kelembagaan, sosial dan keberlanjutan lingkungan. Semua dianggap penting, menyeimbangkan antara temuan empat tersebut.

- Dinamis: dukungan luar harus mengakui sifat dinamis dari strategi penghidupan, respon yang flexibel pada perubahan situasi manusia, dan pembangunan pada komitmen jangka panjang.

Sementara prinsip SLA menurut DFID antara lain:

- People – centred: pengurangan kemiskinan menghargai kebebasan dan pilihan manusia. Manusia meliputi sumberdaya, fasilitas atau pelayanan yang mereka gunakan adalah sebuah prioritas. Yang berrati dukungan manajemen sumberdaya atau pemerintah yang baik.

- Pemberdayaan: perubahan sebaiknya berdasarkan hasil dari penguatan suara, kesmepatan dan ketersediaan untuk masyarakat miskin.

- Responsif dan pastisipasif: masyarakat miskin menjadi aktor kunci untuk mengidentifikasi dan menandai prioritas penghidupan. Orang luar

dipersilahkan berproses untuk mendenagr dan dan merespon orang miskin.

Berkelanjutan: ada empat dimensi kunci untuk berkelanjutan, ekonomi, kelembagaan, sopsial dan keberlanjutan lingkungan. Semua dianggap penting, menyeimbangkan antara temuan empat tersebut.

Multi level dan holistik: aktivitas tingkat mikro dan outcome sebaiknya menginfokan pembangaunan dari berbagai kebijakan dan lingkungan pemerintahan yang efektif. Tingkatan struktur makro dan meso dan proses sebaiknya mendukung pembangunan atas kekuatan yang mereka miliki.

Dibangun secara kebersamaan/kemitraan: kerjasama daapat dibentuk bersama masyarakat miskin dan organisasi mereka, juga dapat dilakukan dengan sektor publik ataupun private (swasta). Kerjasama sebiaknya berdasarkan transparansi persetujuan bersama.

- Terpilah-pilah: sangat penting untuk memahami bagaimana asset, kerentanan, suara dan strategi penghidupan berbeda antara kelompok yang kurang beruntung serta antara laki laki dan perempuan pada grup tsb. Stakeholder dan analisis gender adalah sebuah alat kunci.

Jangka panjang dan flexibel: pengurangan kemiskinan memerlukan komitmen jangka panjang dan pendekatan yang felxibel untuk memberikan dukungan

Pada Pembangunan sistem kehidupan masyarakat berdasarkan pendekatan *sustainable livelihood system* memiliki lima modal. Kelima modal tersebut adalah: (i) modal manusia (*human capital*); (ii) modal alam (*natural capital*); (iii) modal sosial (*social capital*); (iv) modal fisik (*physical capital*); dan (v) modal keuangan (*finacial capital*). Setiap modal tersebut mempunyai derajat atau posisi yang sama. Adapun penjelasan kelima modal tersebut antara lain :

### 1. *Human Capital*

"Manusia merupakan modal ketrampilan, pengetahuan, kemampuan tenaga kerja dan kesehatan yang baik, yang memungkinkan masyarakat bersama-sama mengejar berbagai strategi dalam matapencaharian dan dalam pencapaiannya.

### 2. *Natural Capital*

sumberdaya alam yang mengalir dan layanan yang sudah tersedia (seperti: tanah, air, hutan, kualitas udara, perlindungan erosi, keaneka-ragaman hayati, dll). Hal ini berguna dalam persediaan sumber mata pencaharian yang ada.

### 3. *Financial Capital*

Modal keuangan menandakan keuangan sumberdaya manusia yang mereka gunakan untuk mencapai mata pencaharian, hal ini dikaitkan dengan kas atau setara kas yang dimana hal ini akan sangat memungkinkan masyarakat dalam mengadopsi berbagai strategi mata pencaharian.

### 4. *Phisycal Capital*

Modal fisik terdiri dari modal dasar infrastruktur dan produsen barang yang diperlukan untuk mendukung dalam pencapaian mata pencaharian yang ada, seperti transportasi yang terjangkau dan aman, serta bangunan tempat penampungan, pasokan air yang cukup dan bersih, serta energi yang terjangkau untuk akses informasi.

### 5. Modal sosial

Modal sosial terkait dengan penggunaan sumberdaya manusia dalam artian pencarian matapencaharian mereka. Hal ini mirip seperti jaringan. Bahwa hal ini lebih kepada peningkatan kepercayaan rakyat dan kemampuan untuk bekerja sama atau lebih diformalisasikan keanggotaan

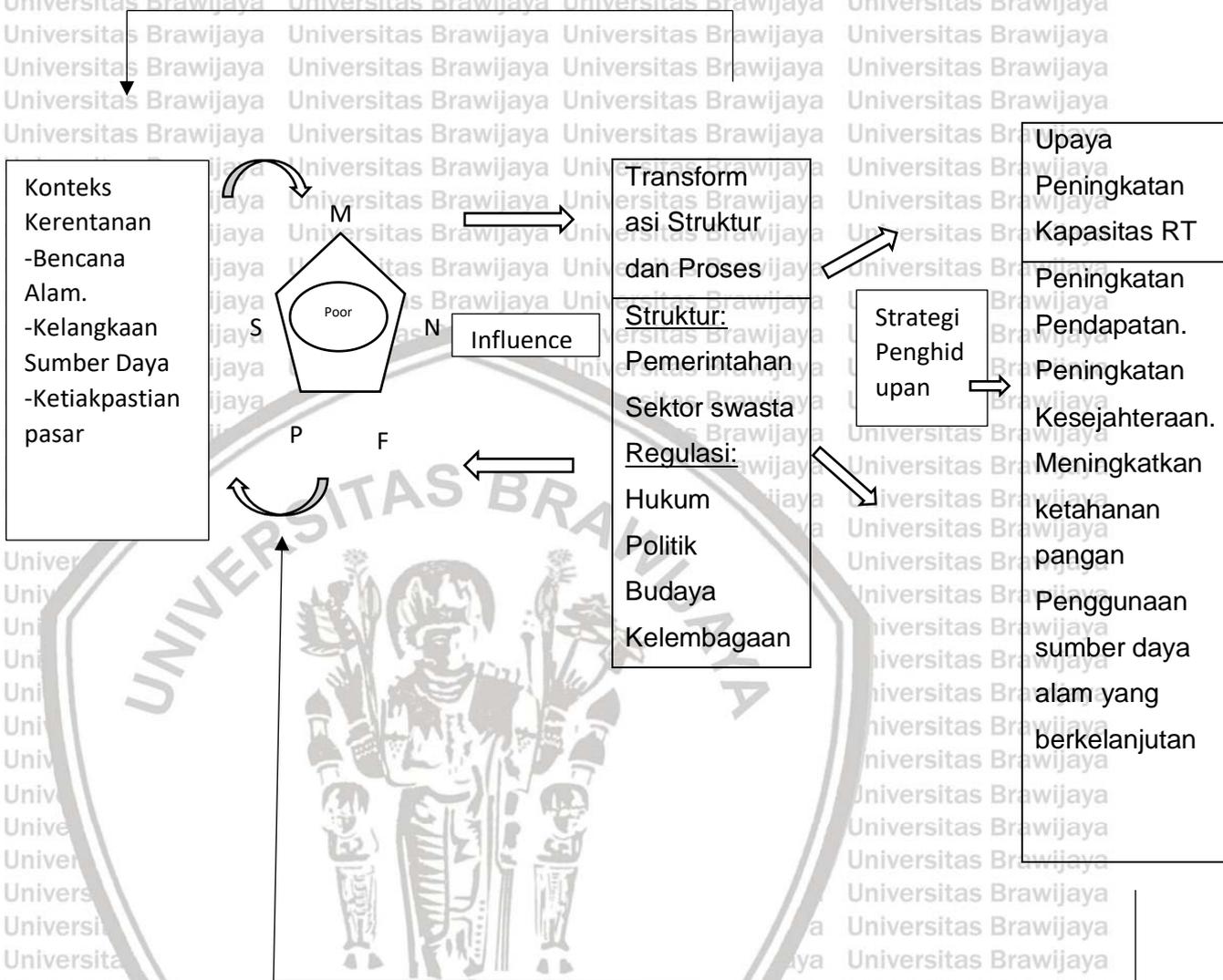
dalam kelompok dan hubungannya dengan norma dan sanksi. Modal sosial juga dapat menimbulkan efek yang terbatas untuk pembangunan.

Pada gambar 2.1 dijabarkan terkait kerangka penghidupan berkelanjutan untuk memahami sistem manajemen pengelolaan sumber daya yang ada. Penghidupan dibangun diatas platform dari aset modal dimana individu atau rumah tangga dapat menggambarkan aset tersebut. Aset digambarkan dalam lima kategori yang disebut pentagon aset.

Penghidupan berkelanjutan terancam dari adanya guncangan eksternal seperti bencana alam, kelangkaan sumber daya alam dan ketidakpastian pasar, selain itu juga dapat berupa adanya trend seperti inovasi teknologi yang semakin maju, (konteks kerentanan). Transformasi struktur dan regulasi yang ada merupakan cara masyarakat untuk mengakses dan menggunakan aset tersebut diatur oleh adanya regulasi dari kebijakan yang ini dapat berasal dari pemerintahan seperti dibentuknya sebuah peraturan ataupun undang-undang terkait; atau kelembagaan, baik formal (Pemerintah) ataupun informal (Sektor swasta).

Masyarakat mencari penghidupan berdasarkan tanggapan mereka terhadap konteks kerentanan dan ketersediaan aset yang ada dalam batasan yang diberikan oleh lingkungan kelembagaan yang ada (Strategi penghidupan). Agar penghidupan tetap berkelanjutan maka sebaiknya perlu ada pengembangan standart hidup dan pengurangan kerentanan sembari mempertahankan sumber daya alam yang ada (keluaran pnghidupan).

2.1 Gambar Pentagon Aset Sustainable Livelihood Framework



Keterangan :

- M: Modal Manusia
- S : Modal Sosial
- N : Modal Alam
- P : Modal Fisik
- F : Modal Keuangan

Sumber: DFID dalam (Morse, McNamara and Acholo, 2009)

Sementara dalam konsep *Sustainable Livelihood Sistem* mengenal istilah keberlanjutan dari berbagai sisi yang dianggap semuanya merupakan hal yang penting. Adapun ukuran keberlanjutan menurut pendekatan sustainable livelihood dalam (Saragih,dkk : 2007) untuk BUM Desa, yaitu :

- Mempertahankan produktivitas jangka panjang sumberdaya alam, dan
- Tidak merugikan penghidupan dari, atau mengorbankan pilihan-pilihan penghidupan yang terbuka bagi orang lain.
- Cara lain untuk mengkonseptualisasikan berbagai dimensi keberlanjutan adalah dengan membedakan antara aspek-aspek lingkungan, ekonomi, sosial dan institutional dari system-sistem yang sustainable, yaitu:

- o Lingkungan dan Ekologis:

Produktivitas sumber daya alam yang menopang kehidupan dilestarikan atau ditingkatkan penggunaannya oleh generasi mendatang.

- o Ekonomi:

Tingkat satuan ekonomi tertentu meningkat (RT) mempertahankan tingkat pengeluaran tertentu secara stabil.Tingkat dasar kesejahteraan ekonomi dapat tercapai dan dipertahankan.

- o Sosial:

Persamaan sosial dimaksimalkan atau pengucilan diminimalkan. Adanya kesenjangan yang ditekan. Sosial capital juga mengalami peningkatan.

- o Kelembagaan:

Ketika struktur-struktur dan proses yang berlangsung mampu terus menjalankan fungsinya dan berkontribusi secara positif terhadap kehidupan masyarakat pada jangka panjang.

- Elastis dalam menghadapi kejadian-kejadian yang mengejutkan dan tekanan-tekanan dari luar;

- Tidak tergantung pada bantuan dan dukungan luar (atau jika bergantung, bantuan itu sendiri secara ekonomis dan kelembagaan harus sustainable).

## 2.5. Pembangunan Perdesaan dan Desa

Pembangunan daerah perdesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Dimana dalam proses pemabangunan tersebut diupayakan nantinya akan ada pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan ekonomi sosial yang telah terbentuk di dalam masyarakat yang nantinya dari adanya pemberdayaan tersebut akan berdampak terhadap perekonomian rakyat yaitu perekonomian yang menyangkut pelaku ekonomi di masyarakat bawah yang jumlahnya sangat besar dan menyangkut bidang yang cukup luas, di harapkan dari perekonomian rakyat itu akan tercipta kemandirian lokal (Adisasmita, 2013).

Tujuan dari pembangunan desa yakni seperti apa yang sudah tertuang dalam UU Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan ekonomi potensi lokal dan pemanfaatan sumberdaya lingkungan secara berkelanjutan (Kementerian Koordinator pembangunan dan kebudayaan RI, 2016).

Sejak diberlakukannya UU Desa No.6 Tahun 2014 diketahui bahwa terdapat penguatan fungsi dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dan peran kelompok perempuan yang bisa mengakses an berpartisipasi aktif daalam proses pembangunan desa, serta pembelajaran dari kearifan lokal desa yang mndukung proses pembangunan desa menjadi gambaran akan kembaliknya semangat untuk membangun desa (Nugroho dkk, 2017). Adapun contoh konkret dari adanya pembangunan desa menurut (Eko *et al.*, 2014) adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah desa, khususnya kepala desa mengambil prakarsa dan melakukan konsolidasi gerakan desa membangun ekonomi.
2. Pemerintah desa bersama masyarakat melakukan kasi kolektif (kebersamaan ) membangun ekonomi lokal desa.
3. Kolektivitas itu memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi aset lokal yang tersedia dan tentu layak jual.
4. Pengambilan keputusan tentang komoditas, modal, mekanisme , gerakan dan bagi hasil dilakukan melalui musyawarah desa. Dengan adanya dana desa yang lebih besar, bisa digunakan sebagai sumber daya investasi bagi desa untuk membangun ekonomi lokal.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam pembangunan perdesaan (Adisasmita, 2013), yaitu:

1. Natural resource: berbasis sumber daya alam melalui penyediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kegiatan agrobisnis dan kerajinan/industri kecil, serta pembangunan kelembagaan untuk memperkuat penerapan teknologi serta pemanfaatan sumberdaya alam.
2. Mempercepat perbaikan perekonomian dalam perekonomian perdesaan, melalui perencanaan tata ruang (spasial), baik aspek fisk maupun aspek sosial ekonomi, yang diharapkan dapat menciptakan pemerataan pertumbuhan daerah khususnya daerah daerah yang terbelakang.
3. Perencanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.

## 2.6 Modal Sosial

Menurut Putman dalam Yustika (2012) modal sosial adalah gambaran organisasi sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan. Modal sosial baru dikatakan ada ketika terjadi interaksi denfan orang lain yang dipandu oleh

struktur sosial (Yustika:2012). Adapun bentuk – bentuk modal sosial adalah sebagai berikut:

1. Struktur kewajiban (obligation), ekpektasi (expektations), dan kepercayaan (trusworthiness): modal sosial bergantung pada dua hal, yaitu kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan nyata dari pemenuhan kewajiban.
2. Jaringan informasi (Information channels): informasi sebagai basis dari tindakan.
3. Norma dan sanksi yang efektif (norms and effective sanctions): norma yang dapat memeberikan sebuah bentuk penghargaan atau pengaruh kepada orang orang

Selain itu ada tiga bentuk modal sosial yang sering dijumpai, antara lain: **pertama** Ikatan sosial (*sosial bonding*) : bentuk dan level modal sosial dalam komunitas lokal yang paling rendah, dimana hubungan sosial (kerjasama dan kepercayaan) dibangun berdasarkan kesamaan identitas yang homogen atau berdasarkan ikatan parokhial (keagamaan, kekerabatan, kesukuan, dan lain lain) yang lebih banyak berorientasi ke dalam secara eksklusif.

**Kedua**, jembatan sosial (*Sosial bridging*): bentuk modal sosial dalam komunitas lokal yang lebih terbuka, heterogen, melampaui ikatan parokhial, sangat cocok untuk membangun kerukunan dan perdamaian. **Ketiga**, Jaringan sosial (*social lingking*): modal sosial yang melampaui komunitas lokal, berorientasi keluar dan berjaringan lebih luas dengan dunia luar).

Selain itu modal sosial yang berbeda-beda di miliki oleh desa, hal tersebut dapat dilihat dari empat institusi lokal desa sebagai berikut:

1. Institusi parokhial: sebuah institusi asli di ranah desa yang terbentuk dan memiliki ikatan sosial (*social bonding*) berdasar kesamaan suku, agama, aliran ,kerabat dan unsur unsur bawaan lain, contohnya: paguyuban, arisan keluarga, perkumpulan keagamaan.

2. Institusi asli (indigenous institution): bentuk modal sosial yang berbasis pada adat.
3. Institusi korporatis : institusi yang dibentuk oleh negara pada ranah desa. Seperti RT, RW, Taruna, Musrenbang.
4. Institusi dan desa sipil yang dibangun oleh kemandirian dan emansipasi warga secara kolektif. Seperti komunitas peduli seni, komunitas peduli lingkungan, serikatn tani.

### 2.7 Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi adalah terjalinnnya kerja sama kolektif baik antar pemerintah, dunia usaha sektor-sektor non pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan secara optimal sumberdaya yang dimiliki dalam upaya merangsang dan menciptakan perekonomian lokal yang kuat, amndiri, dan berkelanjutan (Rahma, 2012). Sementara menurut Balekely dan Bradshaw dalam (Susanti, 2013) pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat yang terlibat mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurut (Rahma, 2012) ada dua kata kunci yang perlu diperhatikan pada pengembangan ekonomi lokal yaitu kerjasama antar komponen dan pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal. Pada jangka panjang sasaran PEL yaitu pengentasan kemiskinan serta adanya perbaikan terus menerus dan berkelanjutan dalam kualitas kehidupan dari suatu komunitas lokal disuatau daerah/wilayah. Adapun tujuan PEL menurut Rahma (2012), antara lain:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah
2. Menciptakan dan pemeratakan kesempatan kerja

3. Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat.
4. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap daerah atau negara lain.
5. Membangun dan mengembangkan kerja sama yang positif antar daerah.

Sementara menurut BAPPEDA (2015) terdapat 10 fokus pada PEL, diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan kandungan lokal
2. Perlibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis
3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi
4. Pembangunan berkelanjutan
5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal
6. Pengembangan usaha kecil dan menengah
7. Pertumbuhan ekonomi
8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah.
10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan.

## 2.8 *Need Assesment*

*Need Assesment* sering disebut sebagai proses mengoleksi informasi untuk mengidentifikasi sebuah kebutuhan, hal tersebut dapat dilakukan baik secara formal (interview atau survey) dan informal (memberi beberapa pertanyaan). Menurut (Messner, 2009) *need assesment* yakni proses mengidentifikasi kebutuhan kinerja dan prioritas kebutuhan. Sebutan lain dari *need assesment* adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan untuk

mengetahui perbedaan antara berbagai kemungkinan yang ada serta potensi yang dimiliki.

Sementara menurut witkin dalam Ministry of Education and Sports Serbia (2007) need assesment adalah penilaian kebutuhan yang terdiri dari serangkaian prosedur sistematis yang diterapkan dengan tujuan menyiapkan prioritas dan membuat keputusan tentang perbaikan program/organisasi serta pengalokasian sumberdaya prioritas berdasarkan pada kebutuhan yang teridentifikasi. Adapun tujuan dari need assesment menurut (Ministry of Education and Sports Serbia, 2007) yaitu:

1. Ofering fondasi yang dibutuhkan (basis informasi) untuk pengembangan atau perbaikan dari sebuah program pendidikan atau sosial.
2. Struktur ulang dari organisasi untuk mengembangkan kinerja pada kaitannya dengan tujuan yang telah diterapkan.
3. Menyiapkan kriteria untuk layanan kontrak pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan.
4. Identifikasi solusi untuk masalah yang kompleks.

## 2.9 Peran Pemerintah dalam Masyarakat

Secara umum dalam perekonomian modern ,peran pemerintah diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu:

### 1. Peranan Alokasi

Tidak semua barang dapat disediakan oleh pihak swasta. Adapun barang tersebut lebih dikenal dengan istilah barang publik, yaitu barang yang tidak disediakan oleh pasar atau adanya kegagalan pasar. Hal ini dikarenakan adanya manfaat dari barang tersebut yang hanya dirasakan secara pribadi tetapi juga secara keseluruhan oleh masyarakat. Contoh : jalan. Tidak ada pihak yang mampu mengeluarkan biaya tinggi untuk penyediaan barang

tersebut. Mengusahakan alokasi sumber-sumber ekonomi yang ada secara efisien

### 2. Distribusi

Distribusi pendapatan tergantung pada pemilihan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, system warisan serta kemampuan memperoleh pendapatan. Pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan melalui pajak, subsidi .

### 3. Stabilisasi.

Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan oleh pihak swasta , akan sensitif terhadap guncangan keadaan yang berakibat pada ketidakstabilan ekonomi, sehingga perlu adanya bantuan pemerintah. Adanya gangguan pada satu sector juga dapat mempengaruhi sector lain, ketika tidak ada campur tangan pemerintah maka masalah akan berlanjut secara terus menerus, adanya masalah yang dapat ditimbulkan seperti inflasi, deflasi, dan pengangguran.

#### 2.10 Sumber Daya Bersama menurut Selanov Otrom.

Sumber daya bersama atau disebut *Common-Pool Resource* (CPR) mengacu pada sumberdaya alam secara natural ataupun buatan manusia yang cukup besar dan mahal biaya pembuatannya (tapi bukan tidak mungkin) untuk mengecualikan penerima manfaat dari penggunaan sumber daya tsb. Untuk memahami proses pengorganisasian dan pengaturan CPR, penting untuk membedakan antara sistem sumber daya dan aliran sumber daya yang dihasilkan oleh sistem, sambil tetap mengakui ketergantungan satu dengan yang lain.

Sistem sumberdaya merupakan pemikiran terbaik sebagai variabel stok yang mampu , dalam kondisi menguntungkan , menghasilkan jumlah maksimum dari aliran variabel tanpa merusak stok atau system sumberdaya itu sendiri.

Sontoh sistem sumberdaya: daerah pemancingan, cekungan air tanah, grazi, area, saluran irigasi, jembatan, garasi parkir, komputer mainframe, dan aliran air, danau, lautan, dan badan air lainnya.

Unit sumberdaya adalah apa yang pantas atau digunakan individu dari sistem sumber daya. Unit sumberdaya dicirikan oleh berton-ton ikan yang dipanen dari penangkapan ikan, meteran air yang ditarik dari air tanah atau saluran irigasi, berton-ton makanan ternak yang dikonsumsi oleh hewan dari daerah penggembalaan. dll.

Perbedaan antara ketersediaan sumberdaya dengan hasil penggunaan sumberdaya per unit sebagai aliran yang sangat berguna kaitannya dengan sumber daya terbarukan, yang memungkinkan dilakukan pengisian ulang.

Selama tingkat penggunaan rata-rata tidak melebihi tingkat pengisian rata-rata, maka sumberdaya yang dapat diperbarui dapat dipertahankan seiring waktu.

Akses ke CPR dapat dibatasi untuk satu individu atau perusahaan atau beberapa individu atau tim individu yang menggunakan sistem sumber daya pada saat yang sama.

Pada CPR mengenal istilah appropriation sebagai proses pengalokasian atau pengalokasian sumber daya dari sistem sumberdaya, dan appropriator sebagai subyek atau orang yang menarik atau mengalokasikan sumber daya.

Sistem sumber daya dapat disediakan atau diproduksi oleh lebih dari satu individu/perusahaan. Sementara Proses aktual untuk mengalokasikan unit sumber daya dari CPR dapat dilakukan oleh beberapa appropriator secara bersamaan atau berurutan, akan tetapi unit sumberdaya bukan untuk digunakan bersama.

Seperti ikan yang dipanen satu perahu tidak untuk orang lain, air yang menyebar di ladang seorang petani tidak dapat disebarkan ke ladang orang lain.

Dengan demikian unit sumberdaya tidak digunakan bersama, tetapi sistem sumberdaya tunduk pada penggunaan bersama.

Apropriator rasional dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti. Pilihan perilaku seseorang dalam situasi tertentu akan tergantung pada bagaimana individu tersebut belajar tentang, memandang, dan menimbang manfaat dan biaya tindakan serta keterkaitan mereka dengan hasil yang juga melibatkan campuran manfaat dan biaya. Mengorganisir appropriator untuk tindakan kolektif mengenai CPR biasanya merupakan upaya yang tidak pasti dan kompleks.

Ketidakpastian juga banyak yang bersumber dari eksternal, seperti kuantitas, waktu curah hujan, suhu dan jumlah sinar matahari, vector-vector pembawa penyakit, dan harga pasar dari berbagai input atau produk akhir. Sumber ketidakpastian lainnya yaitu berasal dari internal CPR dan appropriator yang menggunakan CPR. Sumber utama dari ketidakpastian sendiri adalah kurangnya pengetahuan. Struktur yang tepat dari sistem sumber daya itu sendiri, karakteristik batas dan internalnya, harus ditetapkan.

Memastikan struktur sistem sumber daya dapat muncul sebagai produk sampingan dari penggunaan yang lama dan pengamatan yang cermat. Selain itu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat ini harus dilestarikan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Appropriator dalam banyak situasi sangat termotivasi untuk menemukan solusi yang lebih baik untuk masalah mereka, jika mereka bisa. Mata pencaharian ekonomi appropriator tergantung pada kecerdikan mereka dalam memecahkan masalah individu bersama.

## 2.11 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu di bawah ini terbagi menjadi empat bagian.

Ada yang terkait pendekatan SLA (*Sustainable Livelihood Approach*) namun digunakan sebagai pendekatan untuk pemberdayaan. Selain itu ada juga beberapa penelitian terkait pendirian BUM Desa, contoh dari penelitian BUM Desa yang masih belum berhasil dan BUM Desa yang sudah berhasil.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

Tema	Temuan	Penulis
SLA dan BUM Desa	SLA sebagai metode pemberdayaan yang melibatkan masyarakat melalui tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pelembagaan (BUM Desa)	Sumantra,dkk (2016)
	BUM Desa dalam pengembangannya dijelaskan harus bertumpu pada tiga hal diantaranya ketersediaan potensi yang prospektif, adanya embrio kegiatan ekonomi produktif dan kegiatan ekonomi yang dapat memenuhi kehidupan orang banyak.	
Pendirian BUM Desa	Sumberdaya alam yang dimiliki desa rentan terjadi intervensi modal dan pasar di perdesaan maka BUM Desa dapat mengacu pada Perdes yang di dasarkan pada Perda	Ramadhana (2013)
	sosialisasi tentang pembentukan BUM Desa yang kurang mengakibatkan munculnya keenganan dari masyarakat. Utamanya pemdes yang menganggap bahwa BUM Desa adalah hal yang rumit	Zulkarnaen (2016)
	Perlu adanya penyuluhan terstruktur terkait potensi yang dimiliki desa dan harus melibatkan seluruh masyarakat yang berkepentingan, adapun yang disebut potensi disini bukan hanya dari sumber ekonomi tetapi juga apa yang menjadi keluhan masyarakat, sehingga menjadi peluang untuk berdirinya BUM Desa	
	Bum Desa haru dibangun atas prakarsa masyarakat dan berdasarkan potensi yang dikembangkan di desa	
	BUM Desa didirikan sesuai karakter lokal, potensi dan SD yang dimiliki, Adanya perencanaan terpadu	Ridlwan (2014)
Upaya untuk pengembangan dan pengelolaan BUM Desa harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana dan terpadu	Djaha dan Denghu (2017)	

	Pembentukan BUM Desa butuh waktu dan proses yang cukup lama hingga terlihat hasilnya	Al Kahdafi (2015)
	BUM Desa sebagai wadah untuk menampung potensi yang ada di desa	
	Kurangnya modal menjadi kendala operasional BUM Desa	Ramadhana (2013)
	Belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat	
<b>BUM Desa yang masih belum berhasil</b>	BUM Desa masih dimanfaatkan untuk penduduk luar desa, dan hanya orang tertentu yang memiliki relasi dengan pengelola BUM Desa, selain itu ditemukan adanya perekrutan yang tidak transparan.	Anggreini (2016)
	BUM Desa sudah memiliki omset yang cukup besar tapi adanya hubungan yang tidak harmonis antara pengelola BUM Desa dan masyarakat menjadi salah satu sebab masyarakat belum menikmati hasil BUM Desa secara maksimal.	
<b>BUM Desa yang berhasil</b>	BUM Desa masih belum memiliki keuntungan sehingga belum ada yang dapat disalurkan ke masyarakat.	
	Desa Bonto Biraeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Postama (Pos Tabungan Masyarakat) merupakan sebuah produk yang dinaungi oleh BUM Desa yang berhasil dan tumbuh di Desa Bonto Biraeng. Ada empat faktor yang membuatnya berhasil yaitu: 1. Postama bekerja dalam ranah politik inklusif yang mampu menembus batas-batas politik parokhial. Kepala desa membentuk dan mengontrol Postama secara inklu sif, mengabaikan ikatan parokhial yang ia yakini bisa merusak Postama. 2. Kepemimpinan yang kuat dari kades dan pengurus postama. 3. Kapasitas manajerial internal postama yang baik. 4. Postama biraeng membangun jaringan keluar yang lebih luas, termasuk dukungan dari dana bank syariah.	Eko,dkk (2014)
	Pengelolaan air bersih di Desa Labbo, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Air bersih yang dahulu swadaya masyarakat sekarang dapat dikelola lebih professional.	Eko,dkk (2014)
	BUM Desa pada Desa Labbo, selain pengelolaan air bersih ada juga jasa angkutan dan pengelolaan hutan desa. Adanya jasa angkutan dirasa sangat membantu masyarakat dalam hal operasional dan pemasaran hasil bumi. dan pengelolaan hutan desa juga turut membantu dalam pelestarian hutan dimana hutan digunakan masyarakat untuk mengambil lebah madu, selain itu juga agar sumber mata air yang ada di desa tetap terjaga.	Syamsir (2016)

	Desa Bleberan, Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta . Pembuatan destinasi wisata di bawah payung BUM Desa, wisata ini adalah inisiatif dari seorang warga yang tidak lain adalah kepala desa yang pernah menjabat kala itu. Pengembangan wisata digunakan sebagai sustainable livelihood warga. setiap kegiatan yang ada seperti studi banding ke Desa Bleberan juga melalui BUM Desa	Zamroni,dkk (2015)
	Desa Bleberan telah menjadi desa wisata terbaik tahun 2015 tingkat DIY, telah mampu meraup pendapatan Rp,1.06 Miliar di tahun 2012, dan mampu menyumbang PAD sekitar 60juta rupiah tiap tahunnya.	Sidik (2015)

Sumber: diolah penulis dari berbagai sumber

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu yang mendukung pada penelitian ini yaitu dari penelitian terkait pendirian BUM Desa seperti yang dijelaskan oleh Ramadana ( 2013 ) bahwa adanya sumberdaya alam yang dimiliki rentan terjadi intervensi maka sebaiknya dibuatlah sebuah perdes untuk melindungi asset desa tersebut. Hal ini juga yang terjadi di Desa Kalipuang, ketika orang luar desa tahu bahwa Kalipuang merupakan salah satu desa yang berpotensi tinggi akan sumberdaya yang dimiliki ada berbagai pihak yang hendak menyalurkan modal atau berinvestasi pada Kalipuang baik dari perorangan ataupun lembaga salah satunya yaitu dari pihak Sukofindo. Namun sampai sekarang masih menjadi pertimbangan oleh pemerintah Desa Kalipuang.

Sementara pada BUM Desa Kalipuang sendiri sudah membuat Perdes.

Begitu halnya yang dikatakan oleh Ridlwan (2014), Djaha dan Denghu (2017) dan Al Kahdafi (2015) bahwa itu juga menjadi pandangan terkait penelitian ini yakni BUM Desa harus berasal dari prakarsa masyarakat lokal, dimana BUM Desa didirikan sesuai dengan karakter dan potensi lokal yang ada sebagai wadah untuk menampung potensi tersebut, maka dalam penelitian menoba menelaah hal tersebut dengan pendekatan SLA melalui lima modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadana (2013) dan Anggreini (2016) juga memberikan pandangan bahwa keberadaan sebuah BUM Desa harus disertai

adanya transparansi dan keharmonisan antara pengurus BUM Desa dan masyarakat. Maka pada penelitian ini yaitu dapat ditekankan pada pandangan masyarakat nantinya ketika BUM Desa mulai berjalan.

Sementara pada temuan Eko,dkk (2014) ada empat hal yang membuat BUM Desa berhasil dari segi unit postama (pos tabungan masyarakat) di Desa Labbo membuat pandangan baru bahwa ketika menginginkan keberhasilan suatu BUM Desa kurang lebih harus melalui tahapan tersebut. Selain itu juga diperkuat oleh pernyataan syamsir (2016) BUM Desa di Desa Labbo unitnya berdasarkan dari kebutuhan masyarakat setempat.

Demikian juga dengan temuan Zamroni (2015) bahwa adanya inovasi pada potensi yang dimiliki dapat embuat penghidupan bagi masyarakat seperti adanya iar terjun yang semula hanya sebuah pemandangan alam yang kemudian disulap menjadi wisata dibawah payung BUM Desa kini dapat dilihat hasilnya. Wisata tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga seperti pemandu, pedagang makan, souvenir, tenaga administrasi, dll. Pada temuan Sisik (2015) juga dijelaskan bahwa BUM Desa Bleberan memberikan sumbangan kepada PAD (Pendapatan Asli Desa) pada setiap tahunnya.



## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Pemikiran

Dana desa merupakan salah satu anggaran yang dikelurakan pemerintah pusat melalui APBDes yang berfungsi untuk membantu pengembangan dan kemajuan desa. Setiap Desa mendapatkan dana desa termasuk Desa Kalipucang, *Pertama* penelitian ini ingin melihat apakah ada hubungan antara dana desa dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang ada di Kalipucang. *Kedua* dengan banyaknya potensi sumberdaya yang ada di desa apakah termanfaatkan secara maksimal utamanya untuk kehidupan ekonomi masyarakat.

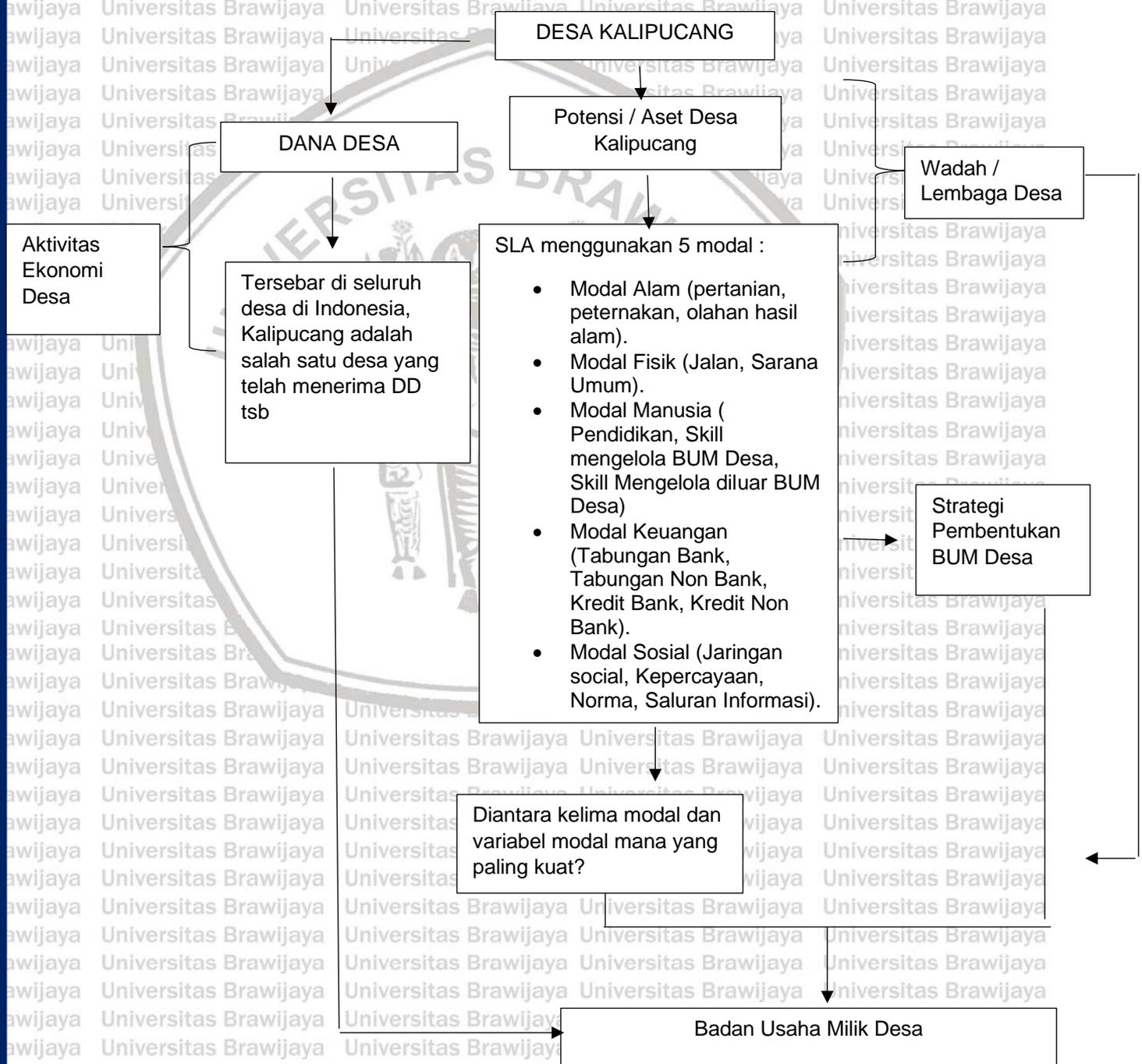
Diketahui salah satu cara untuk memajukan dan memanfaatkan potensi desa secara maksimal yaitu dengan di bentuknya organisasi desa. Adapun salah satu organisasi yang bisa dijadikan tumpuan adalah (BUM Desa). Pendekatan sustainable livelihood approach (SLA) melalui lima yang digunakan untuk mengetahui potensi desa.

Penelitian ini ingin melihat dari kelima modal tersebut mana modal yang terkuat dan terlemah, setelah itu dilanjutkan dengan mengidentifikasi dari masing masing modal, mana variabel terkuat dan terlemah. Tahapan strategi pembentukan BUM Desa juga dilakukan untuk mengetahui strategi apa nantinya yang akan dilakukan dan dibutuhkan masyarakat untuk BUM Desa.

Sehingga diharapkan nantinya BUM Desa terbentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya hasil dari kelima modal tersebut disinkronkan dengan pemahaman dan strategi apa yang akan digunakan masyarakat untuk memajukan desanya. Mengingat sebuah organisasi masyarakat untuk menaungi aspirasi masyarakat dan potensi yang ada di desa.

Terbitnya UU No.6/2014 juga meyakini adanya *endogen development* pada desa, yaitu desa menjadi subyek pembangunan, dimana mereka lebih tahu tentang masalah dan kebutuhan mereka. Mereka pula yang memiliki pengetahuan dan teknologi untuk mengatasinya. (Zamroni,dkk. 2015).

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Pemikiran**

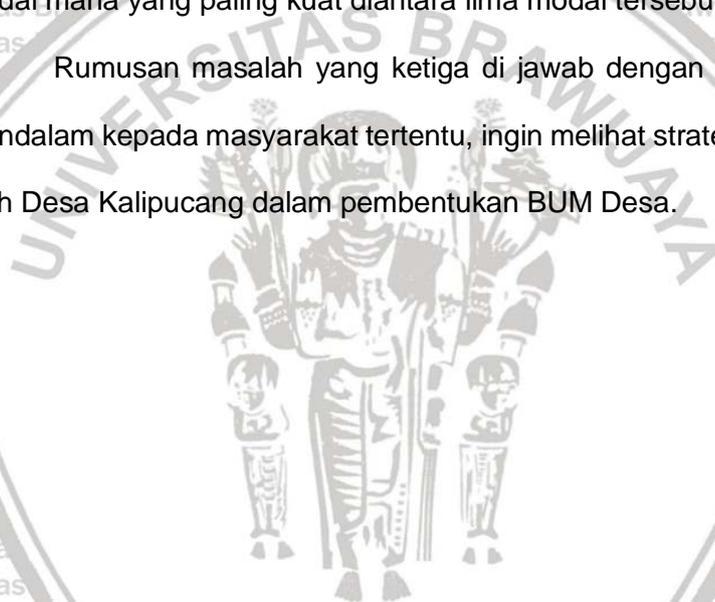


### 3.2 Kerangka Analisis

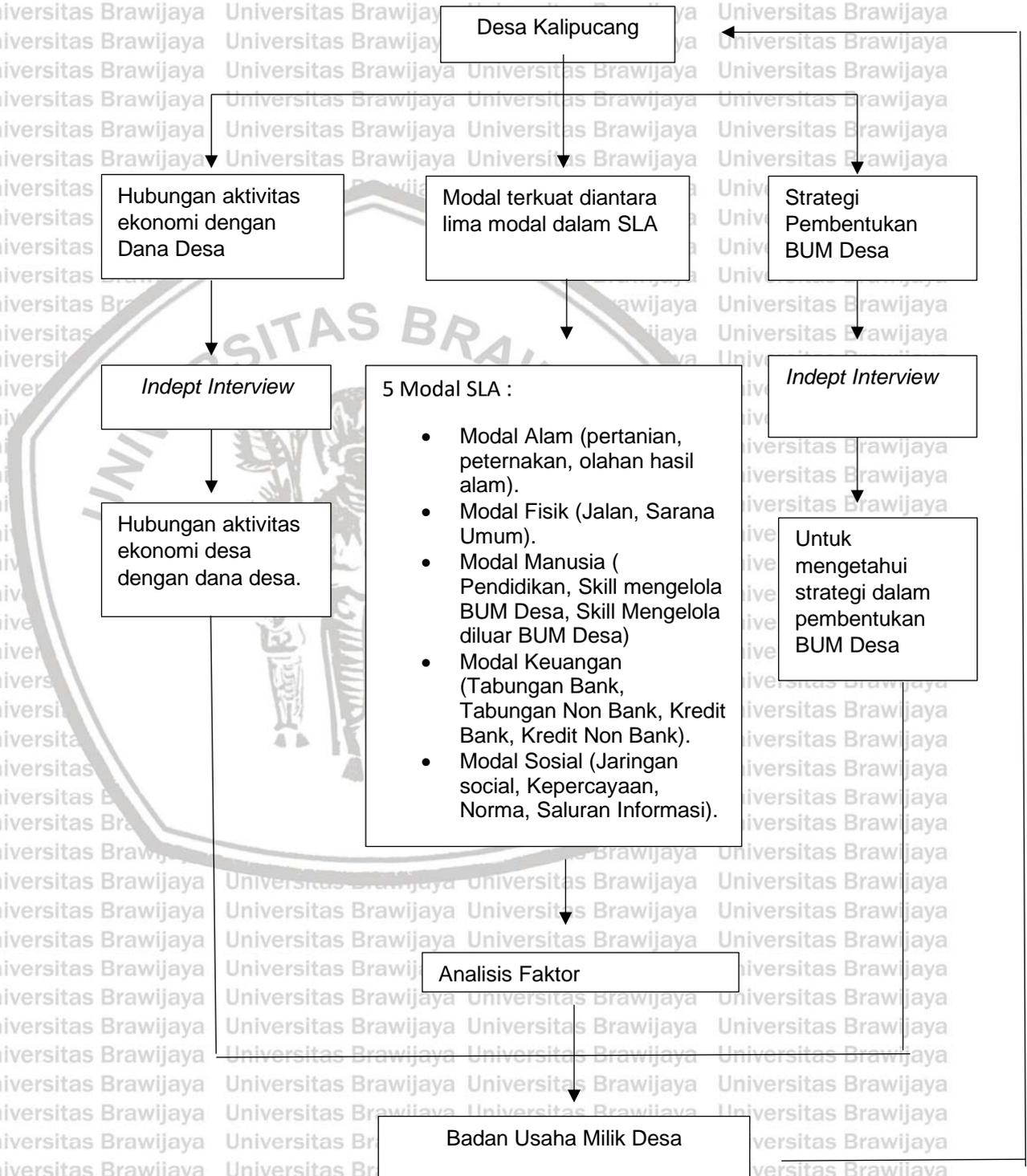
Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, untuk menjawab rumusan masalah pertama digunakan alat analisis *indept interview* sehingga nanti keluarannya diketahui hubungan antara aktivitas ekonomi dengan dana desa yang sudah tersalurkan di Desa Kalipucang.

Sementara pada rumusan masalah kedua ingin melihat modal dan variabel mana yang paling kuat diantara lima variabel berikut: modal alam, modal manusia, modal fisk, modal sosial, dan modal keuangan. Adapun alat analisis yang digunakan pada tahap ini adalah analisis faktor yang digunakan untuk melihat modal mana yang paling kuat diantara lima modal tersebut.

Rumusan masalah yang ketiga di jawab dengan melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat tertentu, ingin melihat strategi apa yang digunakan oleh Desa Kalipucang dalam pembentukan BUM Desa.



**Gambar 3.2**  
**Kerangka Analisis**



## BAB IV METODE PENELITIAN

### 4.1 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method) yaitu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif digabungkan untuk menjadi data yang lebih besar atau hasil yang didapatkan dari tahap demi tahap, kualitatif pada tahap penelitian ini digunakan untuk mendukung hasil uji daripada kuantitatif.

Penelitian ini menggunakan metode berurutan campuran (*Sequential Mixed Method*). Dimulai dengan metode kualitatif yaitu interview untuk mengeksplere tujuan penelitian, kemudian dilanjut dengan metoed kuantitatif yaitu melakukan survey pada sample yang lebih besar dimana peneliti dapat mengeneralisir hasil dari total populasi. Alternatifnya bahwa studi dimulai dari kuantitatif method dimana teori atau konsep telah diujikan /dicoba. Kemudian diikuti oleh metode kualitatif untuk mendetailkan dan mengeksplere dengan kasus yang lebih sempit atau individu (Creswell, 2009).

Lebih ringkasnya dijelaskan oleh Sugiyono (2011) bahwa sequential explonatory yaitu penelitian dengan melakukan pengumpulan data serta analisis secara kuantitatif terlebih dahulu pada tahapan pertama, kemudian tahapan kedua diikuti dengan pengumpulan serta analisis data secara kualitatif, hal ini bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahapan pertama.

Pada penelitian ini sendiri untuk menjawab rumusan masalah pertama digunakan pendekatan kualitatif, sementara pada rumusan masalah kedua dan ketiga menggunakan pendekatan campuran berurutan yaitu data kuantitatif yaitu menggunakan analisis faktor untuk mengetahui modal mana yang paling kuat dan

lemah kemudian dikuatkan dan didukung oleh data kualitatif berupa hasil wawancara dengan masyarakat yang berkepentingan.

#### 4.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak pada Desa Kalipucang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan. Desa Kalipucang memiliki enam dusun yaitu dusun kuntul utara, kuntul selatan, cikur, jelag dan dodokan. Hal ini didasarkan pada banyaknya potensi yang di temukan di desa tersebut namun belum dimanfaatkan secara optimal.

#### 4.3 Informan Penelitian

1. Pemerintah Desa : masyarakat yang bekerja sebagai pejabat desa atau staff desa kalipucang sebagai perwakilan.
2. Tokoh masyarakat : orang yang terpandang dan memiliki pengaruh serta jaringan yang luas dikehidupan bermasyarakat.
3. Warga yang berkepentingan: masyarakat yang hidup dan tinggal di desa Kalipucang baik kaum laki-laki, perempuan ataupun pemuda desa, khususnya mereka yang memiliki kepentingan terhadap desa. Pemilihan informan ini dilakukan untuk melihat apakah data yang berasal dari pemerintah desa dengan yang ada di masyarakat sudah sesuai dengan realita yang ada.

#### 4.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui perantara berbagai sumber yang sudah ada. Sementara Data primer adalah sumber data yang didapat langsung melalui observasi. Adapun definisi operasional yang akan ditanyakan pada responden yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian adalah sebagai berikut :

Modal Manusia: aset sumberdaya manusia yang ada di desa, kemampuan

manusia untuk melangsungkan dan mempertahankan hidup.

Modal Alam: aset sumberdaya alam yang ada di desa, segala

Sumberdaya alam seperti air, pemandangan, dll.

Modal Keuangan: kemampuan keuangan/kekayaan/aset yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.

Modal Fisik: Sarana prasarana yang ada di desa yang dapat menunjang kehidupan masyarakat.

Modal Sosial: Interaksi sosial atau cara dimana orang bekerja sama baik dalam rumah tangga maupun organisasi/komunitas masyarakat yang lebih luas.

**Tabel 4.1 Definisi Operasional Variabel**

Modal	Variabel	Definisi Operasional
Alam	Pertanian	Meliputi kepemilikan lahan dan komoditas apa yang ditanam
	Peternakan	Kepemilikan hewan ternak dan jumlah produksi susu yang diperah.
	Olahan hasil alam	Olahan hasil alam baik berupa hasil pertanian, peternakan, dll.
Manusia	Pendidikan	Pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat
	Skill Pengelolaan BUM Desa	Keterampilan atau kemampuan yang dimiliki masyarakat terkait pengelolaan BUM Desa
	Skill Pengelolaan diluar BUM Desa	Keterampilan atau kemampuan yang dimiliki masyarakat terkait pengelolaan diluar BUM Desa
Sosial	Jaringan sosial	Jaringan yang dimiliki masyarakat atau yang ada di desa seperti organisasi, asosiasi, dsb.
	Kepercayaan	Tingkat kepercayaan yang ada di masyarakat.
	Norma	Norma apa saja yang ada di desa yang nantinya akan terhubung dengan BUMDesa.
	Saluran informasi	Saluran yang akan mentransfer informasi dan satu posisi dalam struktur sosial untuk memberikan informasi tertentu

<b>Keuangan</b>	Tabungan	adanya akses tabungan dari sisi perbankan atau non perbankan
	Kredit	adanya akses kredit baik sisi perbankan atau non perbankan
<b>Fisik</b>	Jalan	adanya ketersediaan jalan untuk menunjang keebhlangsungan hidup
	Sarana umum	Adanya sarana umum seperti balai desa yang dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat

Sumber: diolah oleh penulis

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara :

#### **Dokumentasi**

Menurut Djaelani (2013) Dokumen adalah fakta serta data tersimpan dalam berbagai bahan dokumentasi, sebagian besar data berupa surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan.

#### **Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data secara langsung datang ke lapangan, sehingga tidak hanya manusia yang menjadi objek, tetapi juga objek lainnya seperti alam sekitar.

#### **Wawancara**

Menurut Herdiyansayah (2013) wawancara merupakan sebuah proses interaksi berupa komunikasi yang dilakukan oleh minimal dua orang, atas dasar kesadaran dan secara alami. Berlandaskan kepercayaan dan mengacu pada tujuan yang sudah di tetapkan sebelumnya.

#### **Kuesioner**

Daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti.

#### 4.5 Metode Analisis

Melihat rumusan masalah yang ada, untuk menjawabnya maka penelitian ini menggunakan pendekatan SLA dengan analisis faktor. SLA adalah sebuah pendekatan penghidupan berkelanjutan yang mengutamakan lima modal, yaitu modal manusia, modal alam, modal sosial, modal keuangan dan modal fisik. SLA dianggap paling tepat sebagai pisau analisis karena tujuan SLA sendiri pada dasarnya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan pembangunan pada suatu wilayah. Konsep SLA ini tepat jika digunakan pada wilayah yang sedang berkembang.

Selain itu lima modal yang terdapat pada SLA sinkron ataupun sesuai jika digunakan untuk pengelompokan pada asset/potensi desa. Seperti yang dijelaskan oleh Putra (2016) Aset desa dapat dilihat dari lima hal yaitu manusia, alam, sosial, finansial, dan fisik, kelima asset tersebut sebaiknya mulai di petakan, yang kemudian disusun perencanaanya agar dapat dikelola dengan baik oleh desa. Sementara pada penelitian ini ingin melihat modal mana yang paling kuat dan lemah diantara kelima modal tersebut, sehingga analisis faktor dianggap tepat untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut.

Analisis faktor digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel untuk melihat variabel mana yang terkuat. Adapun tujuannya yaitu untuk menemukan sejumlah faktor yang mendasari sejumlah pengukuran yang besar, dimana hal ini nantinya bertujuan untuk menyederhanakan deskripsi data dengan mengurangi jumlah variabel atau dimensi. Tujuan lain yaitu untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi berbagai indikator independent yang diobservasi. Hal ini senada dengan tujuan penelitian yang ingin melihat modal mana yang paling kuat dan lemah diantara kelima modal dalam SLA mengingat semua modal dalam SLA merupakan variabel independent.

Pada analisis faktor penelitian ini, metode yang digunakan adalah *Confirmatory Factor Analysis* atau disebut CFA. CFA secara sengaja digunakan berdasarkan teori yang sudah ada, sehingga variabel baru ataupun faktor yang mewakili beberapa item/sub-variabel sudah ditentukan. Maka pada penelitian ini CFA dilakukan pada lima modal yang terdapat pada SLA, jenis variabelnya telah diolah dari berbagai sumber berdasarkan pendekatan SLA itu sendiri,

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Modal Alam (X1)

Modal alam terdiri dari tiga variabel yaitu pertanian, peternakan dan olahan hasil alam dengan rincian variabel sebagai berikut:

- X1.1 = Pertanian
- X1.2 = Peternakan
- X1.3 = Olahan Hasil Alam

#### 2. Modal Fisik (X2)

Modal fisik terdiri dari jalan dan sarana umum desa. Adapun rinciannya sebagai berikut :

- X2.1 = Jalan
- X2.2 = Sarana umum

#### 3. Modal Manusia (X.3)

Modal manusia terdiri dair pendidikan, skill untuk pengelolaan BUM Desa, dan skill untuk pengelolaan diluar BUM Desa. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- X3.1 = Pendidikan
- X3.2 = Skill Pengelolaan BUM Desa
- X3.3 = Skill Pengelolaan diluar BUM Desa

#### 4. Modal Keuangan (X4)

Modal keuangan terdiri dari tabungan baik bank dan non bank, begitu juga dengan kredit baik bank dan non bank. Adapun rinciannya sebagai berikut :

X4.1 = Tabungan Bank

X4.2 = Tabungan Non Bank

X4.3 = Kredit Bank

X4.4 = Kredit Non Bank

#### 5. Modal Sosial (X5)

Modal sosial terdiri dari jaringan sosial, kepercayaan, norma, dan saluran informasi. Adapun rinciannya sebagai berikut:

X5.1 = Jaringan Sosial

X5.2 = Kepercayaan

X5.3 = Norma

X5.4 = Saluran Informasi

Adapun proses analisis yang akan di lewati tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Penentuan variabel
2. Pengujian variabel yang cocok untuk masuk tahap analisis faktor.
3. Pengujian menggunakan Bartlett test of sphericity dan pengukuran MSA (measure of sampling adequacy).
4. Variabel yang memenuhi syarat kemudian di analisis faktor.
5. Interpretasi data
6. Validasi, melakukan perbandingan, kemudian melakukan CFA.

Adapun untuk menjawab rumusan masalah yang pertama untuk mengetahui kaitannya penggunaan dana desa dengan ekonomi Desa Kalipucang digunakan metode wawancara mendalam pada stakeholder terkait, seperti perangkat desa. Sehingga nantinya dari wawancara ini diharapkan dapat diketahui Apakah dana desa yang ada selama ini digunakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang ada di desa atau bukan.

Sementara untuk menjawab rumusan masalah selanjutnya yaitu analisis pembentukan BUM Desa digunakan analisis faktor dan *indept interview*. Analisis faktor digunakan untuk menganalisis SLA dengan pendekatan lima modal dalam

satu desa, sehingga nantinya akan terlihat modal yang paling kuat dan lemah di antara lima modal tersebut. Sementara indept interview juga dilakukan sebagai penguatan data yang ada.



## BAB V

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 5.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan terletak antara  $7,30^{\circ}$  -  $8,30^{\circ}$  lintang selatan dan  $112^{\circ}30'$  -  $113^{\circ}30'$  bujur timur. Perbatasan wilayah kabupaten pasuruan meliputi:

- Sebelah utara: Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, dan Selat Madura.
- Sebelah timur: Kabupaten Probolinggo,
- Sebelah barat: Kabupaten Mojokerto
- Sebelah selatan: Kabupaten Malang

Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan dan terbagi menjadi 365 desa/kelurahan dengan luasan wilayah sebesar 1.474,02 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan dan pegunungan. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl ada 14 kecamatan diantaranya Kejayan, Wonorejo, Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso, Winongan, Grati, Lekok, dan Nguling. Wilayah dengan ketinggian sekitar 100-500 mdpl ada enam kecamatan yaitu Purwodadi, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Sukorejo dan Pandaan. Sementara wilayah dengan ketinggian diatas 500 mdpl ada empat kecamatan yaitu Puspo, Tosari, Prigen, dan Kecamatan Tuter.

Kecamatan Tuter memiliki 12 Desa yang meliputi Bilarang, Kayukebek, Ngadirejo, Andonosari, Wonosari, Gendro, Tlogosari, Tuter, Pungging, Kalipucang, Sumberpitu dan Ngemba. Kalipucang merupakan sasaran lokasi dalam penelitian ini, dengan luas wilayah 671,178 ha sebagai milik masyarakat sebesar 590,178 ha dan sebagian lagi milik perhutani sebesar 81 ha.

## 5.2 Gambaran Geografis Desa Kalipucang

Desa Kalipucang merupakan salah satu desa dari Kecamatan Tukur yang meliputi enam dusun yaitu dusun kuntul selatan, kuntul utara, dodogan, cikur, mucangan, dan jelag. Sementara batas wilayah Desa Kalipucang yaitu sebelah utara Desa Sumberpitu, sebelah timur desa Janjangwulung, sebelah selatan Desa Tukur, dan sebelah barat yaitu desa dawuhan, sengan kecamatan purwodadi.

Desa Kalipucang yang terletak pada lereng gunung Bromo memiliki kondisi iklim dengan curah hujan sebesar 3650mm/tahun, suhu rata-rata harian sebesar 25 derajat celcius dengan ketinggian tempat dari permukaan laut sebesar 700 Mdpl (Meter diatas permukaan laut). Sementara jarak tempuh Desa Kalipucang menuju ibu kota kecamatan sejauh 6 km, sementara jarak ke ibu kota kabupaten sejauh 28 Km, dan jarak menuju ibu kota provinsi sejauh 108 Km.

### 5.2.1 Kondisi Demografis

Penduduk Desa Kalipucang rata-rata dan kebanyakan adalah tamatan Sekolah Dasar (SD), sebagian kecil tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sebagian lagi tamatan Sekolah Menengah Keatas (SMA), sedangkan tamatan pada Perguruan Tinggi hanya beberapa orang. Masyarakat mayoritas menganut agama islam dan sebagian bear terdiri dari dua etnis yaitu jawa dan Madura. Penggunaan perpaduan bahasa atau campuran antara bahasa Jawa Timur dan Madura menjadi khas bahasa sehari-hari pada desa ini.

Sementara untuk mata pencaharian penduduk Kalipucang yaitu terdiri dari PNS, pertukangan, petani/peternak, pedagang, buruh tani, Buruh lainnya dan pensiunan. Mata pencaharian utamanya yaitu peternak/petani, hampir 70% masyarakat mencari penghidupan dari beternak/bertani. Adapun ternak yang dikelola adalah peternakan susu sapi perah. Jumlah peternak dapat terlihat pada table di bawah ini;

**Tabel 5.1 Jumlah Peternak Desa Kalipucang.**

Kelompok	Dusun	Perwakilan	Jumlah Anggota	Populasi Sapi
1	Kuntul Selatan	Ma'ruf	73	223
2	Kuntul Utara	Sumantri	80	415
3	Kuntul Utara	Supardi	135	279
4	Dodokan	Senedi	120	211
5	Jelag	Hariono	185	432
6	Cikur	Hartono	100	288
7	Mucangan	Hanjoyo	89	229
Jumlah			782	2077

Sumber : Profil Desa Kalipucang.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa persebaran peternak menyeluruh pada satu desa dan setiap dusun memiliki perwakilan ternak masing-masing. Mulai dari dusun kuntul selatan memiliki anggota sebanyak 73 dengan populasi sebanyak 223, kuntul utara sebanyak 215 dengan populasi sapi sebanyak 694, dodokan sebanyak 120 anggota dengan populasi sapi sebanyak 211, jelag sebanyak 185 anggota dengan populasi sapi sebanyak 432, Cikur sebanyak 100 anggota dengan populasi sapi sebanyak 288, dan Mucangan sebanyak 89 anggota dengan populasi sapi sebanyak 229. Total keseluruhan satu desa beranggotakan sebanyak 782 dengan jumlah populasi sapi sebanyak 2077.

### 5.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi

Kehidupan ekonomi masyarakat Kalipucang selain dari susu sapi perah juga mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan. Adapun komoditas buah-buahan yang ada yaitu buah alpukat, durian, apel, pisang dan manggis. Sementara hasil kebun yaitu cengkeh dan kopi baik kopi arabika ataupun robusta, sedangkan untuk hasil hutan berupa kayu-kayu seperti kayu mindi, kayu sengon, getah pinus dan bambu juga cukup tersedia. Beberapa jenis bunga juga telah dikembangkan oleh sebagian penduduk seperti bunga mawar, krisan, dan seribu bintang.

Beberapa kelompok tani yang ada di desa Kalipucang yang cukup bertahan, aktif dan berkembang baik hanya terdapat dua kelompok tani yaitu kelompok tani dwi tunggal dan kelompok tani dodokan makmur. Kelompok tani tersebut mengembangkan komoditas kopi mulai dari proses penanaman hingga pengolahan pasca panen. Namun perlu diketahui seiring berjalannya waktu karena jumlah ternak yang semakin bertambah juga telah membuat pertanian kopi sedikit mulai sedikit bergeser ke pertanian rumput karena kurangnya lahan untuk pakan ternak, sehingga lahan kopi dialihfungsikan menjadi lahan rumput.

Peralihan ini juga telah merubah budaya sosial yang ada di masyarakat mengalami penurunan. Keberadaan upacara adat atau hal-hal yang berkaitan dengan pertanian seperti wiwidan, upacara sebelum panen, tumpengan atau upacara adat yang lain lama lama sudah mulai luntur dan tidak lagi diselenggarakan. Selain itu faktor perubahan cuaca yang tidak menentu juga menjadi salah satu penyebabnya.

### **5.2.3 Potensi Unggulan Desa Kalipucang**

Banyak potensi yang dimiliki oleh Desa Kalipucang. Ada tiga komoditas unggulan desa yaitu, kopi, pisang dan susu. Hasil panen kopi yang cukup tinggi menjadikan kopi sebagai salah satu komoditas unggulan dan potensi desa.

Sebagian besar pertanian yang ada di Kalipucang adalah pertanian kopi dengan dua jenis kopi yaitu arabica dan robusta. Selain dijual dalam bentuk gelondongan basah dan kering, sebagian petani juga telah mengolah kopi menjadi kopi bubuk yang siap dipasarkan.

Sementara pisang jumlahnya cukup melimpah berbanding lurus dengan jumlah lahan rumput yang semakin luas, pisang adalah tanaman tumpang sari yang di tanam di sela-sela lahan rumput. Pertanian rumput semakin bertambah luas setiap tahunnya dikarenakan kebutuhan pakan ternak yang terus meningkat. Penanaman pisang sendiri sebenarnya bertujuan untuk tanaman alternative atau

tanaman pengganti rumput di kala musim kemarau. Pada musim kemarau para peternak sering kekurangan jumlah rumput untuk pakan ternak, sehingga pelepah pisang digunakan sebagai gantinya.

Namun seiring berjalannya waktu masyarakat mulai sadar bahwa selain pelepah pohon pisang, buah pisang yang cukup banyak dan belum termanfaatkan juga dapat menjadi potensi unggulan desa yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa. Sehingga buah pisang juga mulai mendapat perhatian dan dijadikan salah satu komoditas unggulan desa.

Selain kopi dan pisang, susu sapi perah adalah komoditas yang paling banyak di temukan, Hampir setiap rumah memelihara sapi perah untuk dimanfaatkan susunya. Hasil susu murni disetorkan oleh para peternak kepada pihak koperasi, adapun jasa koperasi yang digunakan adalah koperasi setia kawan. Selebihnya sebagian diolah menjadi produk desa seperti susu rasa-rasa, stick susu, permen susu, coklat susu, dll.

Potensi lain yang ada di Desa Kalipucang adalah terkait pemandangan atau panorama alamnya yang indah sehingga ada beberapa tempat yang dapat dijadikan objek wisata. Adapun objek wisata yang dikelola saat ini ada lima yaitu kebun kopi, bukit tumang, kampung susu, tujuh sumber telaga dan air terjun sumber nyonya.

Kebun kopi adalah wisata yang berada di Dusun Cikur. Pada kebun kopi wisata yang ada berisikan edukasi kopi baik dari penanaman, pembibitan, pemetikan, serta pengolahan. Selain itu juga diajak langsung berkunjung menikmati kebun kopi yang ada. Bukit tumang adalah wisata yang terletak di Dusun Kuntul Utara yang berbentuk perbukitan dan digunakan untuk menikmati pemandangan pegunungan dari ketinggian , disana juga menyajikan wahana seperti persewaan sepeda motor trail dan sepeda motor APV.

Sementara kampung susu berisikan tentang edukasi perawatan sapi perah dan pemerah susu serta beberapa pengolahan terkait susu, wisata ini terletak di Dusun Kuntul Utara. Wisata tujug sumber terletak di Dusun Dodokan, wisata ini mengajak wisatawan untuk menikmati asrinya air alami atau langsung dari sumbernya yang berjumlah tujuh mata air. Sedangkan air terjun sumber nyonya adalah sebuah air terjun yang berada di Dusun Jelag, pada wisata ini wisatawan diajak menikmati air terjun yang mengalir di tengah-tengah perkebunan warga.



## BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

### 6.1 Hubungan Dana desa dengan Aktivitas Ekonomi Desa Kalipucang.

Secara umum menurut penelitian Meutia and Liliana (2017) bahwa ada empat prioritas penggunaan dana desa. Pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, contohnya dana desa digunakan untuk mengembangkan pos kesehatan desa dan poskesdes. Kedua Perbaiki sarana dan prasarana umum seperti pemeliharaan jalan desa. Ketiga Pengembangan potensi ekonomi lokal desa seperti pendirian dan pengembangan BUM Desa, pembuatan pupuk dan pakan organik. Keempat Pemanfaatan sumberdaya lingkungan yang berkelanjutan seperti pembuatan energi terbarukan, namun untuk pemanfaatan prioritas yang keempat ini masih cukup jarang dilakukan karena masih belum banyaknya masyarakat utamanya kepala desa, yang belum memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa hal tersebut bukan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

Dana desa merupakan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat dimana pemanfaatan dan pengelolaan administrasi dipertanggung jawabkan oleh kepala desa (Tangkumahat, et al 2017). Dana desa juga berfungsi sebagai implementator kebijakan pemerintah desa dengan sasaran kebijakannya yaitu masyarakat desa setempat (Chasanah et al. 2017).

Pada tahun 2014 dana desa mulai turun dan diterima oleh masyarakat desa, Namun karena dana desa ini adalah hal baru bagi masyarakat, mereka masih mengalami kebingungan dalam mengelola dana desa.

Masyarakat Kalipucang selama ini hanya memanfaatkan dana desa untuk keperluan sarana infrastruktur, hal itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Hariyono selaku kepala Desa Kalipucang

“ Kalau yang paling besar untuk fisik memang, karena itu yang paling diperlukan oleh masyarakat seperti guna perbaikan jalan lingkungan”, ucap Pak hariyono.

Hal itu juga dipertegas oleh sekretaris desa Bapak Didik bahwa penggunaan dana desa masih seputar keperluan pembangunan insfratsruktur desa seperti jalan, dsb.

“ Kebanyakan masih digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekitar 75%, karena di rasa yang paling buruk adalah bagian insfratraktur”, tutur Pak Didik.

Adanya pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan rusak hampir merata dilakukan pada enam dusun yang berada di Desa Kalipucang, meski demikian akhir tahun 2018 sudah mulai berkurang dan hanya tinggal beberapa jalan yang perlu perbaikan. Rupanya hal ini juga dilakukan oleh beberapa desa lain yang ada di Indonesia, pembangunan fisik merupakan hal pertama yang mudah dilakukan dan dianggap penting untuk kemajuan desa.

Hal senada juga diungkapkan oleh sofiyanto,dkk. (2017) bahwa untuk pembangunan fisik, adanya dana desa sangat membantu dan cukup berperan utamanya dalam hal pembuatan jalan desa seperti rapat betton, jalanan yang masih macadam, serta perbaikan aspal. Selain untuk infrastruktur pembangunan fisik di Kalipucang juga digunakan untuk pembuatan sarana kesehatan seperti pembangunan jamban atau MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus) kepada masyarakat miskin, pembuatan jamban ini juga hampir merata ada di setiap dusun yang ada di Desa Kalipucang.

Pembangunan fisik masih menjadi prioritas utama ketika dana desa mulai turun ke masyarakat, Hal tersebut dapat dilihat dari progam pemerintah terhadap pembangunan fisik yang semakin meningkat seiring besarnya dana yang ada. Pada Desa kalipucang penyaluran dana desa untuk pembangunan fisik juga lebih besar dibandingkan untuk persoalan pemberdayaan, hal ini diperjelas oleh pernyataan Bapak Sekertaris Desa:

“Di Desa Kalipucang, Dana desa masuk sekitar tahun 2014/2015, dan selama ini dana desa masih digunakan untuk pengelolaan sarpras, jadi masih dianggarkan untuk kebutuhan fisik, sementara untuk pemberdayaan masyarakat masih berkisar 10-15%” Terang Pak Sekdes.

Adanya pembangunan fisik tersebut, masyarakat desa secara umum berpandangan bahwa hal tersebut akan memberikan manfaat berupa kelancaran perekonomian masyarakat guna mempermudah mendapatkan pemerataan pendapatan, kesempatan

kerja, serta usaha dalam pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa.

(Tangkumahat, Panelewen, and Mirah 2017). Namun demikian pilihan pembangunan fisik

desa sebagai akibat dari kondisi geografis desa memang tidak bias terhadap proses

perencanaan pembangunan desa, namun bias terhadap upaya pemberdayaan

masyarakat yang nantinya berimplikasi pada implementasi kebijakan dana desa

(Chasanah et al. 2017).

Sementara penyaluran dana desa dari segi pemberdayaan masih cukup kurang

dan sedikit. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Desa Kalipucang berdasarkan hasil dari

dana desa memiliki prosentase yang cukup rendah sebesar 10-15% seperti yang

disebutkan di atas oleh pak sekdes (sekertaris desa). Adapun contoh pemberdayaan yang

dilakukan di Kalipucang yaitu digunakan untuk pembinaan, pelatihan, dan bentuk

pemberdayaan lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Pak Hariono selaku Kepala Desa

Kalipucang:

“ Kalau yang paling besar fisik, dan sebagian kecil diguakan untuk pembinaan, pelatihan dan bentuk pemberdayaan lainnya”, Terang Pak Hariono.

Adapun pelatihan-pelatihan yang ada biasanya ditujukan untuk organisasi-

organisasi yang ada di desa seperti LINMAS, PKK, dan POKDARWIS (Kelompok Sadar

Wisata). Hal ini diungkapkan oleh Pak Sekdes:

“ sisanya itu untuk pelatihan-pelatihan kepada LINMAS, PKK, POKDARWIS, dll),  
Jelas Pak Sekdes”.

Dana desa sendiri baru mulai terfokus kepada pemberdayaan khususnya ketika akhir tahun 2018 atau memasuki tahun 2019 nanti, dimana menurut Hariono selaku Kades menuturkan bahwa pembangunan fisik desa tahun 2014-2018 sudah hampir selesai dilakukan. Adapun bentuk pemberdayaan yang akan dilakukan berupa pelatihan-pelatihan baik kepada UKM (Usaha Kecil Menengah), Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), pembinaan masyarakat, pembinaan ibu-ibu PKK, serta mengembangkannya wisata yang ada.

Menurut Sofiyanto,dkk (2017) Penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dirasa juga memberikan dampak positif yang cukup baik, adanya kegiatan berupa pelatihan-penyuluhan ataupun pembinaan baik untuk perangkat ataupun masyarakat desa secara umum dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat agar semakin kreatif kedepannya.

Adapun perkembangan dana desa untuk kegiatan ekonomi yang terbaru yaitu sebagian pembangunan fisik untuk pembuatan Gedung yanntinya akan ditempati oleh BUM Desa, selain itu juga untuk fasilitas keperluan BUM Desa seperti computer, infrastruktur, printer, meja, lemari, kursi, dll. DANA DESA juga digunakan sebagai penyertaan modal awal berdirinya BUM Desa sebesar Rp.30.000.000. Pada BUM Desa Desa Kalipucang sendiri modal bukanlah menjadi kendala utama dalam pendiriannya, namun adanya DANA DESA ini lebih memudahkan dan membantu. Harapannya penyertaan modal dari DANA DESA ini dapat dipergunakan untuk menunjang perkembangan BUM Desa.

Keberadaan DANA DESA sendiri ini tidak menjadi alasan masyarakat Desa Kalipucang untuk mendirikan BUM Desa. Pendirian BUM Desa sendiri dimaksudkan untuk mengembangkan potensi yang ada dan agar desa menjadi lebih mandiri dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut Hariono "Desa itu ibarat negara, jika pada sebuah

negara memiliki BUMN (Badan Usaha Milik Negara) masak desa tidak punya, jadi desa bisa punya BUM Desa”.

Harapan didirikannya BUM Desa sendiri adalah agar Desa Kalipucang dapat menjadi desa mandiri dan tidak bergantung pada dana atau bantuan pemerintah. Desa yang sudah maju tidak bergantung dari adanya dana pemerintah, jadi seperti DANA DESA ada atau tidak bukan menjadi persoalan utama karena sudah tidak lagi bergantung. Maka ketika PADes (Pendapatan Asli Desa) dapat lebih besar daripada DANA DESA atau bantuan pemerintah lainnya, maka keberadaan DANA DESA tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup tinggi.

Sementara di sisi lain ketika desa menjadi mandiri juga harapannya masyarakat turt mandiri, sehingga tidak lagi bergantung kepada pemerintah desa seperti masih butuhnya bantuan dari permdes berupa pembuatan jamban atau MCK kepada masyarakat miskin yang tidak memiliki sarana kesehatan untuk bersi diri, contoh lain yaitu berupa santunan pendidikan bagi warga miskin. Sehingga kedepannya segala apa yang menjadi kebutuhan desa dapat dibiayai sendiri, dan desa dapat bergerak sendiri tanpa perlu menunggu bantuan dari pemerintah.

## 6.2 Hasil Analisis Statistik

Pada penelitian ini total variabel yang digunakan adalah 16 variabel, kendati demikian tidak semua variabel lolos dalam pengujian. Adapun varibael yang lolos adalah sebagai berikut :

- X1.3 (olahan hasil alam baik pertanian atau peternakan)
- X2.1 (jalan)
- X2.2 (sarana umum)
- X3.1 (pendidikan)
- X3.2 (kemampuan pengelolaan BUM Desa)

- X3.3 (Kemampuan pengelolaan diluar BUM Desa)
- X4.1 (Tabungan Bank)
- X4.3 (Kredit Bank)
- X4.4 (Kredit Non Bank)
- X5.1 (Jaringan Sosial)
- X5.2 (Kepercayaan)
- X5.3 (Norma)
- X5.4 (Saluran Informasi)

Sementara variabel yang tidak lolos dalam pengujian ada tiga variabel yaitu X1.1 (Pertanian), X1.2 (Peternakan), dan X4.2 (Tabungan Non Bank), variabel tidak lolos uji dikarenakan nilai tidak memenuhi syarat.

**Tabel 6.1 Nilai KMO Pada Analisis Faktor**

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.776
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	382.718
	Df	78
	Sig.	.000

Sumber: diolah oleh Penulis

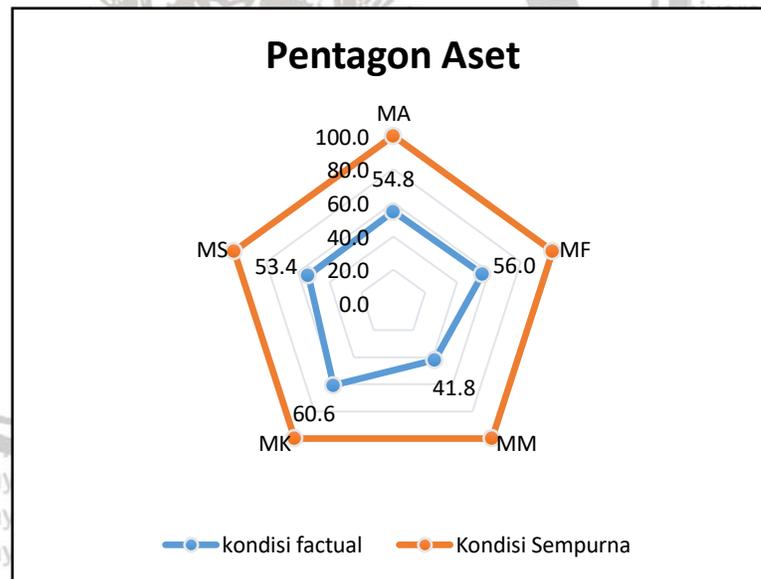
Tabel diatas menunjukkan nilai KMO (Keiser-Meyer-Olkin) yaitu indeks jarak perbandingan koefisien korelasi dengan korelasi parsialnya. Pada tabel terlihat bahwa nilai KMO sebesar 0.776 menunjukkan bahwa angka tersebut sudah lebih dari 0.5 (>0,5) sementara signifikasnsi sebesar 0.000 yang berarti kurang dari 0.5 (<0,5), Nilai KMO dianggap memenuhi ketika sudah lebih dari 0,5. Maka dengan demikian dapat dipastikan pengujian ini layak dilakukan. Sehingga variabel atau sampel yang ada tersebut dapat dilanjutkan untuk pengujian lanjutan.

### 6.2.1 Modal Yang Paling Kuat dan Lemah diantara lima modal dalam SLA (Sustainable Livelihood Approach)

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan SLA yang mengacu pada lima modal yaitu, modal alam, modal fisik, modal manusia, modal keuangan, dan modal sosial.

Pada gambar pentagon Aset di bawah ini dapat terlihat modal mana yang paling tinggi, gambar tersebut menggambarkan dua pentagon Aset yang satu kondisi sempurna dimana semua modal memiliki nilai 100. Sementara gambar pentagon Aset satunya menggambarkan kondisi faktual yang ada di Desa Kalipucang terkait Aset pembentukan BUM Desa. Adapun pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa modal tertinggi adalah modal keuangan, kedua modal fisik, ketiga modal alam, keempat modal sosial, dan kelima modal manusia.

**Gambar 6.1** Pentagon Aset Pembentukan BUM Desa Kalipucang



Sumber: diolah penulis

Keterangan :

- MA = Modal Alam
- MF = Modal Fisik
- MM = Modal Manusia
- MK = Modal Keuangan
- MS = Modal Sosial

Pentagon Aset merupakan upaya secara realistik untuk melihat kekuatan-kekuatan masyarakat (Aset/sumberdaya/modal) dan bagaimana mereka berusaha mentransformasi kekuatan-kekuatan tersebut menjadi aktifitas yang menghasilkan hasil atau capaian-capaian yang berlanjut. (Saragih,dkk ; 2007). Sementara pentagon diatas berusaha untuk menggambarkan kondisi factual yang ada di Desa Kalipucang terkait kekuatan –kekuatan yang dimiliki ataupun ada di masyarakat yang mengacu pada pembentukan BUM Desa. Pada gambar di atas dapat terlihat bahwa yang paling tinggi dan kuat adalah modal keuangan memiliki nilai sebesar 60.6 % yang itu berarti kemampun masyarakat dalam mengakses modal keuangan sebesar 60,6%. , kedua modal fisik memiliki nilai sebesar 56.0% yang itu berarti kemampuan masyarakat dalam mengakses modal fisik yaitu sebesar 56.0% , ketiga modal alam memiliki nilai sebesar 54.8% yang berarti kemampuan dalam mengakses modal alam sebesar 54,8%, keempat modal sosial memiliki nilai sebesar 53.4% yang berarti kemampuan masyaarakt dalam mengakses modal sosial sebesar 53,4% dan terakhir modal manusia memiliki nilai sebesar 41.8% yang berarti kemampuan masyarakat dalam mengakses modal manusia sebesar 41,8% . Adapun keterangan lebih lanjut dari kelima modal tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Keterangan akan dimulai dari modal yang paling kuat hingga yang paling lemah yaitu akan dimulai dari modal keuangan, modal fisik, modal alam., modal sosial dan modal manusia.

#### 6.2.1.1 Modal Keuangan

Modal keuangan adalah modal yang berasal dari segala sesuatu yang ada kaitannya dengan keuangan seperti tabungan, utang-piutang, kredit, asuransi, dll. Pada penelitian ini variabel penyusun modal keuangan terdiri dari empat variabel yaitu X4.1 (Tabungan Bank), X4.2 (Tabungan Non Bank), X4.3 (Kredit Bank), dan X4.4 (Kredit Non Bank). Meskipun pada penelitian ini variabel tabungan non bank

tidak masuk dalam pengujian, namun penulis akan tetap mencoba memberikan penjelasan terkait hal tersebut.

Desa Kalipucang memiliki modal keuangan yang bersumber dari tabungan baik bank ataupun non bank, begitu pula dengan kredit baik yang bersumber dari bank ataupun non bank. Modal keuangan memang lebih kuat dibandingkan dengan keempat modal lainnya, hal itu terlihat dari kebiasaan masyarakat Kalipucang selama ini yang menjadikan sektor keuangan sebagai perhatian utama, selain itu perputaran uang yang ada di Kalipucang juga terhitung cukup besar dimana setiap harinya Desa Kalipucang kurang lebih mampu menghasilkan susu sapi perah sebanyak 12.000liter/hari, dengan setoran 5500/liter kepada koperasi, yang itu berarti kurang lebih dalam sehari ada uang sejumlah Rp.66.000.000 yang masuk ke masyarakat, itu belum termasuk pada bentuk pemasukan lainnya.

Desa Kalipucang sendiri memiliki beberapa lembaga keuangan, baik dari dalam desa ataupun luar desa. Adapun lembaga keuangan yang ada di desa yaitu ada koperasi wanita, koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah Al Barokah Sejahtera Mandiri, dan lain-lain. Sementara itu banyak juga lembaga keuangan yang berasal dari luar desa seperti bank Mandiri atau BRI atau Koperasi Setia Kawan yang merupakan koperasi peternak sapi perah (KPSP) Kecamatan Tutur dan lain lain.

*Pertama*, variabel X4.1 (Tabungan Bank). Selama ini masyarakat lebih memanfaatkan menabung pada Bank BRI ataupun Mandiri dibandingkan pada lembaga keuangan bukan bank atau non bank. Menabung pada kedua bank tersebut dirasa aman oleh masyarakat, selain itu juga ketika masyarakat terdaftar menjadi nasabah dan memiliki tabungan, maka jika dikemudian hari mereka ingin melakukan pinjaman akan dipermudah, selain itu uang tabungan juga dapat

diambil kapanpun ketika ada kebutuhan mendadak. Bahkan terkadang ketika menabung pada bank ini diberikan beberapa masukan ataupun saran terkait pengaturan perihal keuangan.

Jika masyarakat menabung di bank, kedepannya kehidupan masyarakat akan lebih terjamin. Penyimpanan uang yang cukup dirasa aman saat ini adalah di bank, selain itu jika masyarakat memiliki tabungan di bank secara tidak langsung mereka telah memiliki modal keuangan tambahan yang tersimpan dalam bentuk tabungan pada bank tersebut. Namun kesadaran masyarakat akan manfaat tabungan masih lemah. Begitu pula dengan desa, selama ini pihak desa masih belum bekerjasama dengan pihak.

Menyimpan uang atau menabung pada lembaga bukan bank sendiri sebenarnya juga jauh lebih mudah dilakukan, sama seperti halnya ketika menabung pada lembaga bank. Terlebih lagi jika hal tersebut dilakukan pada lembaga keuangan yang sering keliling ke kampung ataupun rumah-rumah warga. Lembaga keuangan bukan bank yang sering melakukan keliling ini sebutan lainnya yaitu bank *thitil*. Bank *Thitil* adalah orang/perorangan ataupun lembaga yang menawarkan kredit mikro jangka pendek tanpa adanya syarat dan jaminan, serta memiliki bunga yang cukup tinggi sekitar 10-30% setiap periode pinjaman, bank *thitil* biasanya juga menjaga hubungan kekerabatan dengan masyarakat yang menjadi nasabahnya baik lewat interpersonal ataupun sosial –cultural (Ariyanto, 2005).

Pada bank *thitil* sendiri masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke bank untuk menabung, namun hal ini jarang masyarakat lakukan, masyarakat lebih mememanfaatkannya untuk penggunaan kredit. Menabung hanya di awal sebagai syarat agar terdaftar sebagai anggota namun setelahnya bank hanya dimanfaatkan untuk pengambilan kredit, karena masyarakat Desa kalipucang

lebih suka melakukan kredit ataupun pinjaman dibandingkan dengan menabung ataupun investasi.

Selain bank *thitil* ada juga lembaga keuangan yang sering digunakan yaitu koperasi. Koperasi peternak sapi perah seperti simpanan pada koperasi Setia kawan tidak digunakan masyarakat dalam hal menabung, mereka yang tergabung dalam anggota koperasi hanya menunggu turunnya SHU (Sisa Hasil Usaha) setiap setahun sekali, adanya koperasi hanya digunakan untuk penyeteroran susu yang nantinya hasil dari setor susu akan keluar pada setiap sepuluh hari sekali. Selain itu masyarakat lebih memanfaatkan adanya koperasi tersebut untuk pengambilan kredit ataupun pinjaman. Pada beberapa penjelasan diatas telah menguatkan alasan kenapa variabel non bank tidak masuk dalam pengujian, karena pada realitanya masyarakat hamjir tidak pernah menabung pada lembaga non bank.

*Kedua*, variabel X4.3 (Kredit Bank). Pada kredit bank tidak jauh berbeda dengan tabungan bank dimana masyarakat kebanyakan juga menggunakan jasa bank BRI dan Mandiri. Bank umum yang dikenal masyarakat memang hanya kedua Bank ini dimana juga lokasinya paling mudah mereka jangkau. Manfaat yang didapat dari bank ini antara lain peminjaman yang mudah dan memiliki jangka waktu sehingga masyarakat juga belajar disiplin.

Selain itu pada kedua bank ini masyarakat juga dapat menerima pinjaman dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga peminjaman dari bank ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk biaya pendidikan atau pun menambah modal usaha. Jika bagi para peternak penambahan modal usaha adalah pembelian tambahan sapi untuk di perah. Sementara bagi yang non peternak untuk tambahan modal usaha sampingan seperti berdagang,dsb.

Ketiga, variabel X4.4 (Kredit Non Bank). Jika dibandingkan dengan lembaga bank, pengkreditan yang dilakukan lembaga non bank jauh lebih banyak digunakan oleh masyarakat. bisa dikatakan hampir semua masyarakat mengambil kredit dari lembaga keuangan bukan bank baik dari bank thitil atau koperasi. Adapun lembaga keuangan non bank yang paling sering digunakan yaitu bank bank mawar, bank mawar, bank mekar dan MBK ( Mitra Bisnis Keluarga) dimana ketiganya merupakan salah satu jenis bank *thitil*. Istilah bank *thitil* digunakan sebagai bentuk tidak lain pembayaran dilakukan dengan cara mencicil setiap waktunya, baik harian ataupun mingguan.

Ketiga bank tersebut ada yang beroperasi mingguan, atau bahkan setiap seminggu tiga kali dan ada juga pada hari-hari tertentu, pegawainya berkunjung ke desa dan keliling di sekitar rumah masyarakat. Adanya bank *thitil* ini seakan telah menjadi candu di masyarakat, mereka cukup bergantung dan tidak terasa terus melakukan kredit ataupun hutang pada bank tersebut. Pada kenyataannya keberadaan bank *thitil* telah menjadi fenomena pada masyarakat khususnya masyarakat kecil (Zuhroh dan Elisa. 2017).

Kredit rata-rata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembelian sembako sehari-hari, biaya pendidikan. Sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan mendadak dan juga modal usaha. Modal yang dimaksud disini adalah modal untuk membeli sapi perah, sehingga harapannya dengan bertambahnya jumlah sapi yang ada juga akan menambah jumlah produksi susu sapi perah yang dihasilkan, namun ini hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat.

Seperti halnya kredit yang dilakukan pada bank thitil. Kredit yang dilakukan kepada koperasi juga sudah menjadi makanan sehari-hari masyarakat Kalipucang. Jika pada lembaga perbankan ketika menjadi nasabah akan mendapatkan pelayanan lebih mudah begitu juga dengan yang dilakukan di

koperasi. Masyarakat yang dapat mengajukan kredit hanya bagi mereka yang secara sah terdaftar sebagai anggota koperasi aktif yaitu mereka yang terdaftar sebagai anggota koperasi dan aktif untuk menyetorkan susu sapi setiap hari.

Adapun besaran kredit juga ditentukan dari jumlah literan susu yang disetor setiap harinya. Semakin banyak jumlah setoran maka akan memiliki kesempatan mendapatkan kredit atau pinjaman yang semakin besar. Sehingga kepemilikan sapi yang banyak tidak memberikan jaminan akan mendapatkan kredit yang besar. Adapun pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan bayaran atau upah atas hasil setoran yang dilakukan setiap sepuluh hari sekali. Pembayaran yang seperti ini membuat masyarakat nyaman dan bergantung pada kredit koperasi, karena pembayaran bukan secara tunai melainkan potongan dari penyeteroran susu.

Sehingga masyarakat tidak merasa terbebani dan tidak menyadari jika itu mengurangi uang yang harusnya mereka terima. Jika hal ini terjadi terus menerus, maka yang terjadi adalah seperti istilah *gali lubang tutup lubang*. Jadi ketika kredit sudah selesai dan terbayar, selanjutnya akan mengambil kredit lagi untuk menutupi kekurangan sebelumnya, dan begitu seterusnya. Hal menarik lainnya adalah ketika pada koperasi masyarakat sudah tidak dapat melakukan kredit, maka mereka akan mencari cara untuk melakukan kredit di tempat lain salah satunya di bank thitil tersebut.

Terkadang kredit ataupun hutang juga dilakukan pada perseorangan ataupun kelompok baik kelompok temak ataupun kelompok keagamaan. Contohnya yaitu pada kelompok dibaan, kelompok ini ada pada setiap dusun, bahkan ada satu dusun memiliki dua-tiga kelompok dibaan. Acara rutusnya berjalan seminggu sekali dimana didalamnya terdapat arisan yang selalu diputar setiap kegiatannya.

Diketahui pada struk hasil setor susu sapi sendiri terdiri dari berbagai rincian, selain berisi jumlah literan susu yang disetor, harga satuan liter susu, terus juga ada beberapa bentuk simpanan wajib seperti simpanan mana suka ( tabungan untuk hari raya), dapenma (tabungan untuk kesehatan ternak, seperti suntik hewan dll), serta dka ( dana kematian anggota). Selain itu disana juga tertulis jumlah kredit yang harus dikeluarkan masyarakat sebagai bentuk potongan ketika mereka memiliki pinjaman di koperasi. Maka dicontohkan jika seharusnya mereka mendapatkan uang sebanyak Rp 1.000.000, karena harus membayar potongan sebesar Rp.200.000 dari maka uang yang diterima itu sebesar Rp.800.000, belum lagi pada struk tersebut juga tertulisakan bahwa masyarakat memberi concetrat (pakan sapi) yang itu juga berasal dari potongan dari penghasilan penysetoran susu terebut. Namun besaran jumlah concetrat yang didapatkan pada masing-masing orang berbeda tergantung banyaknya literan susu yang tersetor, semakin banyak setoran susu maka akan konsetrat yang di dapat juga semakin banyak, begitu pula uang yang dikeluarkan untuk pembayaran konsetrat tsb.

Tidak sampai pada potongan koperasi, bagi masyarakat yang memiliki pinjaman di desa baik kelompok pengajian ataupun lainnya juga memotong dari penghasilan susu tersebut. Jadi sebelum struk sampai ke masyarakat, biasanya nanti di potong dulu oleh pihak kelompok piutang. Sehingga meneruskan contoh diatas jika uang Rp.800.000 yang harusnya sampai karena masih ada tanggungan hutang kepada kelompok sebesar Rp.300.000, maka akan dipotong kembali dan tersisa Rp.500.000 yang diterima oleh masyarakat. Terkadang jika masih memiliki hutang lagi maka akan terpotong lagi, karena satu orang terkadang bisa memiliki satu, dua bahkan lebih pinjaman.

Hal tersebut yang tidak jarang ditemukan banyak orang yang mengeluh karena ketika harusnya mendapatkan uang bayaran dari jerih payah mereka memerah susu malah nihil, karena uang sudah habis hanya untuk membayar hutang. Ada yang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan , ada juga yang hanya tersisa Rp.10.000 – Rp.5.000 atau habis. Sehingga hal ini yang kemudian menyebabkan masyarakat mengambil hutang baru lagi.

Maka dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perputaran uang yang ada di Desa Kalipucang cukup tinggi, dimana kredit juga sudah seperti menjadi makanan setiap harinya. Sebagian masyarakat yang sudah menjamur dan fanatic serta tergantung akan kredit berharap jika di Kalipucang ada BUM Desa dapat membuat unit usaha kredit mikro dan simpan pinjam agar mereka memiliki tempat pinjaman baru, karena ketika pinjaman pada tempat A telah habis limitnya, maka mereka akan berusaha mencari pinjaman ke tempat lain.

Sementara sebagian lainnya bagi mereka yang tidak bergantung akan kredit dan prihatin melihat kondisi desanya, mengharapkan keberadaan BUM Desa dengan unit usaha simpan pinjam untuk mengurangi adanya Bank Thitil yang dirasa merugikan warga. Selain itu dirasa perlu adanya juga manajemen keuangan keluarga peternak agar kedepannya para peternak lebih dapat memaangement pengeluarannya secara stabil mengingat upah yang mereka dapat yaitu setiap sepuluh hari sekali.

**Tabel 6.2 Perbandingan antara BUM Desa dan Koperasi**

No	BUM Desa	Koperasi
1	Fokus pada satu desa	Banyak desa atau sekecamatan
2	Semua masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan BUM Desa	Hanya anggota yang dapat meraskan manfaat dari keberadaan koperasi
3	Kepemilikan Aset Desa	Kepemilikan swasta



4	Dapat menampung, kreativitas, keterampilan dan potensi baik yang ada di Desa ataupun yang dimiliki oleh masyarakat	Tidak dapat menampung aspirasi masyarakat
5	Dapat mendirikan berbagai jenis usaha sesuai kebutuhan masyarakat	Tidak dapat dengan mudah mendirikan usaha atau yang sesuai kebutuhan masyarakat
6	Bisnis sosial ekonomi	Bisnis Ekonomi
7	Didirika berdasarkan musdes	Tidak berdasarka musdes

Sumber : Diolah oleh Penulis

Adapun keberadaan koperasi selama ini hanya untuk mensejahterakan anggotanya saja seperti yang tertulis di tabel atas. Meskipun masyoritas masyarakat Kalipucang adalah peternak namun masih ada sebagian kecil yang bukan peternak, ataupun ternak tapi dengan kepemilikan jumlah sapi sedikit dan juga masih mengandalkan penghidupan dengan cara lain meskipun hanya sampingan.

Selain itu koperasi sendiri adalah lembaga yang menangani banyak desa atau bisa dikatakan satu kecamatan tutur. Sehingga sangat kecil jika koperasi digantungkan oleh masyarakat sebagai lembaga yang harus focus menangani satu desa. Desa Kalipucang sendiri ingin menjadi desa yang berdidaya serta mandiri nantinya dimana tidak bergantung pada bantuan, sehingga BUM Desa dianggap salah satu usaha desa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut.

Pada koperasi sendiri masyarakat masih mengalami ketergantungan kredit dimana ketika kredit kurang akan mencari pihak lain yang dapat memberikan kredit tsb. Perputaran uang yang tinggi ini, akses uang yang cukup mudah didapatkan masyarakat akan dirasa baik jika hanya dari satu pintu yaitu BUM Desa. Sehingga adanya BUM Desa nantinya mampu meminimalisir keberadaan rentenir, atau



bank thitil, selain itu agar uang juga tetap keluar dan kembali ke desa jadi manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Selain itu koperasi juga merupakan usaha yang berorientasi pada profit, sementara BUM Desa tidak hanya profit meliankan juga sisi sosial yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Secara kepemilikan sendiri juga berbeda, jika koperasi dimiliki oleh swasta dan BUM Desa oleh desa. Sementara pada BUM Desa masyarakat juga lebih bebas berekspresi karena mereka lebih dapat meneksplere keterampilan, kreativitas serta bakat yang dimiliki, sementara pada koperasi tidak, sehingga di BUM Desa adanya potensi lebih dapat terwadahi dan tertampung dengan baik.

#### 6.2.1.2 Modal Fisik

Modal fisik adalah modal yang kasat mata atau berupa hal dan benda fisik seperti transportasi, infrastruktur, dll. Pada penelitian ini modal fisik yang diambil adalah bersumber dari dua variabel yaitu X2.1 (Jalan) dan variabel X2.2 (Sarana dan Prasarana Umum). Jalan yang dimaksud disini adalah jalan yang ada di desa baik jalan desa ataupun jalan kabupaten yang berada di Desa Kalipucang. Begitu juga dengan sarana prasarana umum, yaitu segala sarana umum yang ada di desa seperti Balai Desa Kalipucang.

Tidak mengherankan jika modal fisik menempati posisi kedua setelah modal keuangan, karena selama ini masyarakat Desa Kalipucang masih memiliki pemikiran seperti masyarakat desa pada umumnya yang memandang sebuah kemajuan dari segi pembangunan fisik. Mereka lebih memperhatikan pembangunan jalan yang ada di desa apakah sudah diperbaiki ataupun belum, dibandingkan dengan memperhatikan kondisi alam yang ada di desa contohnya.

*Pertama*, variabel X2.1 (Jalan Desa). Adapun pada kenyataannya tidak semua kondisi jalan yang di Desa Kalipucang sudah bagus, ada beberapa yang

masih mengalami kerusakan. Namun itu hanya sebagian kecil dan kerusakan hanya ditemukan di dusun jelag. Jalan di Dusun Jelag sendiri merupakan bagian dari jalan kabupaten dan bukan jalan desa. Sehingga desa tidak memiliki wewenang untuk memperbaikinya.

Sedangkan untuk jalan desa sendiri secara keseluruhan sudah dalam kondisi yang bagus, hanya ada beberapa jalan yang masih memerlukan tindak lanjut pembangunan. Salah satunya yaitu jalan-jalan kecil yang ada di dusun-dusun ataupun jalan menuju perkebunan. Seperti pada sub bab sebelumnya juga diketahui bahwa penggunaan DANA DESA selama ini juga lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik salah satunya perbaikan jalan. Maka dapat dilihat bahwa baik pemerintah desa ataupun masyarakat masih memfokuskan kemajuan desa harus dimulai dari pembangunan fisik terlebih dahulu.

Namun demikian, secara keseluruhan masyarakat cukup mudah untuk mendapatkan akses menuju ataupun menggunakan jalan desa. Bahkan pada dusun-dusun yang letaknya masuk ke dalam juga sudah terdapat jalan yang layak untuk dilewati. *Contour* daerah pegunungan yang membuat orang mendirikan rumah secara berkelompok terjadi di Desa Kalipucang, sehingga terkadang untuk mencapai rumah warga tertentu masih harus melewati perkebunan.

Jalan sendiri merupakan akses pertama yang harus dilewati ketika masyarakat luar hendak menjelajahi desa, maka cukup mendukung ketika pembangunan jalan sudah membaik dan mulai ada ide untuk focus juga terhadap pemberdayaan masyarakat. Desa Kalipucang sendiri memiliki banyak anugerah alam berupa pemandangan yang indah yang mampu menyihir orang luar desa ataupun wisatawan untuk turut menikmatinya. Maka ketika Kalipucang mendirikan wisata, hal ini akan memberikan dampak positif karena akan mendukung bagi wisatawan untuk mengakses tempat wisata tersebut.

Selama ini jalan desa hanya digunakan untuk aktivitas sehari-hari, yaitu sebagai lalu lalang masyarakat dalam menjalankan kehidupan, sementara dari pihak luar desa hanya memanfaatkan jalan Desa Kalipucang sebagai jalan menuju Bromo jalur Nongkojajar. Tidak terfikir oleh masyarakat jika keberadaan jalan desa yang telah bagus dapat memperlancar jalannya perekonomian yang ada di desa.

Maka hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih, sehingga akan terlihat nantinya ketika kondisi jalan yang bagus dimanfaatkan untuk menggerakkan roda ekonomi desa salah satunya yaitu melalui BUM Desa.

Ketika dikaitkan dengan BUM Desa, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa jalan memiliki kaitan yang erat untuk turut serta mendukung BUM Desa. Bagi mereka adanya jalan yang semakin bagus diharapkan mampu mempermudah akses ataupun mobile dalam pengelolaan BUM Desa kedepannya, dimana wisata sendiri juga dapat menjadi bagian dari unit yang didirikan oleh BUM Desa.

Kedua, variabel X2.2 (Sarana dan Prasarana Umum). Secara Keseluruhan dalam kondisi yang bagus, hal tersebut dapat dicontohkan seperti keberadaan balai desa yang cukup terawat. Selain itu letak balai desa sendiri berada di Dusun Dodokan yang cukup mudah dijangkau oleh masyarakat desa. Bahkan masyarakat luar desa yang ingin berkunjung juga cukup mudah untuk menemukan balai desa tersebut, dimana letaknya dusun tersebut cukup dekat dengan jalan kabupaten ataupun jalan yang dari kecamatan tutur.

Namun ada sarana yang keberadaannya tidak dimanfaatkan ataupun pemakaiannya masih kurang optimal seperti poskesdes (pos kesehatan desa). Poskesdes tidak buka setiap hari untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, sehingga penggunaannya pun kurang efektif. Lokasi yang cukup jauh

dari rumah penduduk menjadi alasan kenapa poskesdes tidak buka setiap hari, karenanya dari segi fisikpun tempat ini agak kurang terawatt.

Selain itu para tenaga medis juga tidak berkunjung setiap hari, melainkan hanya beberapa waktu sesekali. Poskesdes ini juga tidak memiliki penjaga karena faktor lokasi yang sepi dari keramaian sehingga tidak ada warga yang berani tinggal dan menjaganya. Hal tersebut juga telah mengakibatkan adanya beberapa barang yang hilang akibat tidak adanya penjagaan pada poskesdes. Sisi pelayanan yang kurang baik ini perlu adanya peninjauan ulang, dan ini sinkron dengan dengan temuan bahwa modal manusia di Desa Kalipucang menempati modal paling lemah karena masih memiliki pendidikan yang rendah.

Jadi yang perlu diperhatikan selain aksesibilitas menuju dan mengunjungi sarana umum dengan nyaman, namun juga aksesibilitas untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Maka masyarakat mendukung adanya sarana umum yang bagus khususnya yang berkaitan dengan BUM Desa nantinya. Adanya sarana umum yang bagus dan pelayanan yang efektif di BUM Desa diharapkan dapat memberikan kenyamanan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat percaya penuh serta mendapatkan pelayanan yang maksimal untuk kebutuhan mereka.

#### **6.2.1.3 Modal Alam**

Modal Alam adalah modal yang berasal langsung dari alam seperti lahan, tanah, air, tumbuhan, hewan, pemandangan yang bagus, dll. Pada Desa Kalipucang adapun modal alam yang diambil terdapat tiga variabel yaitu X1.1 (Pertanian), X1.2 (peternakan), dan X1.3 (Olahan hasil alam baik dari pertanian, peternakan, dll).

*Pertama*, variabel X1.1 (Pertanian). Pada pertanian banyak tumbuhan yang tumbuh di Kalipucang diantaranya ada berbagai tanaman sayuran seperti wortel, labu, dll, ada juga buah-buahan seperti durian, apel, pisang. Selain itu

tumbuh juga disana cengkeh dan kopi. Kopi adalah komoditas utama masyarakat Desa Kalipucang, bahkan sebelum ternak hadir, kopi sudah lebih dulu menjadi mata pencaharian utama masyarakat Kalipucang. Namun seiring berjalannya waktu dengan masuknya ternak, lambat laun kopi menjadi prioritas kedua setelah ternak. Sebagian besar masyarakat pun beralih dan berpindah ke ternak dan menjadikan kopi sebagai penghasilan tambahan, sedangkan ternak adalah penghasilan utama masyarakat.

Panen kopi hanya berlangsung setahun sekali, dan belum tentu juga ketika panen mendapatkan hasil panen yang bagus dan melimpah, sehingga hal ini dianggap tidak menjanjikan untuk menjamin kehidupan kedepannya. Maka dari itu banyak warga yang beralih ke ternak dan menjadikan ternak sebagai sandaran mencari penghidupan. Rata-rata setiap orang hanya memiliki lahan kopi sekitar 1-2 Ha, sementara sebagian lagi bahkan tidak sampai 1 Ha dan hanya ratusan meter.

Jumlah ternak yang semakin banyak juga telah menjadikan lahan kopi semakin berkurang setiap tahunnya. Lahan dialih fungsikan menjadi kebun rumput karena pasokan pakan ternak yang semakin banyak dan jumlah rumput yang kurang. Bahkan ketika musim kemarau datang, pasokan rumput di Desa Kalipucang sering mengalami kekurangan sehingga masyarakat memiliki inisiatif untuk melakukan penanaman pohon pisang.

Pohon pisang dimanfaatkan pelepahnya untuk pakan ternak sebagai ganti rumput ketika jumlah pasokan rumput tidak mampu memenuhi kebutuhan pakan ternak yang ada. Pohon pisang ini sebagai tanaman tumpang sari atau tanaman yang ditanam di sela sela lahan kosong yang berada di kebun kopi ataupun rumput. Selama ini sebagian besar masyarakat menjual kopi dalam bentuk gelondongan baik basah ataupun kering. Kopi dijual kepada kelompok tani ataupun tengkulak.

Ketika dikaitkan dengan BUM Desa tidak banyak masyarakat yang beranggapan perlu adanya campur tangan pemerintah dalam perawatan dan budidaya pohon kopi. Karena masyarakat sudah memahami dari turun temurun terkait pembudidayaan kopi, dan informasi tambahan sudah cukup dari gapoktan yang ada di desa. Sementara terkait diversifikasi olahan kopi masih kurang, sehingga masyarakat lebih banyak membutuhkan tambahan pengetahuan tentang pengolahan hasil kopi itu sendiri.

*Kedua*, variabel X1.2 (Peternakan). Seperti yang telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa mayoritas masyarakat Kalipucang adalah peternak sapi perah. Ternak yang dimaksud disini adalah ternak murni. Tidak semua masyarakat memiliki jumlah sapi yang sama banyak, pun tidak semua yang memiliki sapi banyak menghasilkan produksi susu perah yang sama banyaknya. Beberapa sapi yang masih di ternak biasanya masih berupa anakan atau dengan nama lain disebut *pedet*, sementara beberapa lagi berupa sapi jantan. Sapi yang mengalami masa bunting juga tidak dapat diperah susunya secara optimal, karena sudah mulai mengalami kekeringan. Sehingga masa pemerahan sapi hanya berlangsung selama masa sapi menyusui.

Selama ini pengelolaan susu sapi perah dilakukan oleh pihak KPSP (Koperasi Peternak Susu Sapi Perah). Masyarakat melakukan penyeteran susu perah selama dua kali dalam sehari yaitu pagi sekitar pukul tujuh pagi sampai dengan delapan pagi, dan sore setelah ashar atau sekitar pukul setengah empat sore. Pemberian makan pada ternak sapi juga dilakukan dua kali yaitu setelah subuh sebelum setor pagi dan setelah duhur sebelum setor sore.

Sementara aktivitas peternak setelah setor pagi adalah mencari rumput untuk pakan ternak. Bahkan pencarian tidak hanya dilakukan di area Desa Kalipucang, sebagian dari mereka juga mencari diluar Desa Kalipucang, karena

tidak semua peternak memiliki lahan yang cukup untuk menanam rumput guna pakan ternak. Pakan ternak sendiri tidak hanya terdiri dari rumput melainkan ada beberapa tambahan seperti polar dan combor. Tambahan pakan ternak ini dapat diperoleh dari koperasi yang sudah menjadi potongan rutin setiap sepuluh hari sekali saat pengambilan uang upah dari setor susu, selain itu juga dapat diperoleh dari toko kelontong ataupun tengkulak yang menjualkannya.

Sementara selama ini dalam perawatan ternak, masyarakat tidak pernah memperhitungkan secara rinci biaya habis pakai yang digunakan untuk perawatan ternak, terlebih lagi persoalan rumput dan tenaga kerja. Rumput yang diambil dari ladang sendiri utamanya dianggap tidak berbiaya tinggi karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli rumput. Pada segi tenaga kerja dimana rata-rata masyarakat hanya memiliki jumlah sapi kisaran 1-5 ekor, dengan posisi yang dapat diperah satu sampai dengan tiga ekor sapi. Maka dari itu tenaga kerja yang digunakan adalah cukup menggunakan tenaga pribadi, sehingga mereka beranggapan bahwa beban tenaga kerja tidak termasuk biaya perawatan sapi.

Maka jika dikalkulasikan secara rinci keuntungan para peternak relative kecil, dimana biaya perawatan jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi susu yang dihasilkan.

Harga susu per liter yang di setorkan ke koperasi adalah kurang lebih senilai Rp.5500 /liter . satu sapi mampu menghasilkan susu paling sedikit 5-15 liter, dan ketika masa subur setelah melahirkan baru bisa menghasilkan 30 liter atau lebih. Desa kalipucang sendiri setiap harinya dapat memproduksi sekitar 12.000 liter susu yang disetorkan kepada pihak koperasi.

Pengelolaan yang sudah rapi melalui koperasi menjadi salah satu alasan sebagian masyarakat menganggap bahwa untuk susu sapi perah murni tidak perlu campur tangan lagi dari pihak lain termasuk dari pemerintah desa atau pun BUM

Desa. Masyarakat lebih membutuhkan olahan dari pada ternak sendiri yang masih sedikit, serta pemanfaatan dari adanya kotoran ternak yang masih perlu dioptimalkan.

*Ketiga*, variabel X1.3 (Olahan Hasil Alam). Adapun olahan hasil ternak contohnya adalah produk dari susu, baik susu murni yang kemudian diolah menjadi minuman siap minum ataupun menjadi makanan kering seperti permen susu, stik susu, dll. Sementara dari hasil pertanian contohnya yaitu olahan dari kopi yang sudah di ose ataupun bubuk kopi yang siap diseduh dan disajikan. Selain itu juga banyak olahan dari pisang seperti keripik pisang, stik pisang, sale pisang, dan lain-lain.

Komoditas pertanian ada di Desa Kalipucang selama ini belum dioptimalkan, hal itu terlihat masih sedikitnya aktivitas ekonomi produktif yang berasal dari pertanian. Selain itu juga masih inkonsistennya masyarakat dalam membuat produk-produk olahan dari pertanian. Padahal jika diketahui dengan adanya produk dari pertanian maka masyarakat akan memiliki pendapatan tambahan dimana produk itu menambah nilai tambah dari suatu barang.

Terlebih lagi jika masyarakat terus melakukan inovasi pada produk mereka. Hal ini juga berlaku pada sektor peternakan, dimana selama ini masyarakat hanya menggunakan ternak sapi untuk diperah susunya yang kemudian disetor begitu saja ke koperasi. Sementara pada sisi inovasi masih sedikit. Hasil dari ternak sendiri ini juga banyak potensi yang masih harus digali yang kemudian diolah menjadi produk nilai tambah.

Selain dari susu sapi yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi berbagai macam produk, seperti produk makanan dan minuman. Tetapi juga diketahui kotoran sapi yang menumpuk juga belum termanfaatkan secara optimal, hal itu juga dapat dimanfaatkan sebagai penggunaan pupuk organik. Masyarakat

Kalipucang sendiri juga diharapkan dapat melakukan inovasi pembuatan makanan tambahan ternak, mengingat mayoritas masyarakat Kalipucang terdiri dari peternak.

Sebenarnya selain dari olahan hasil pertanian dan peternakan sendiri, diketahui bahwa kondisi alam Kalipucang masih cukup asri nan indah. Keelokan yang dimilikinya ini dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata. Adapun beberapa potensi wisata yang dimiliki yaitu terdapatnya sumber mata air, air terjun, perbukitan, kebun kopi, ternak sapi, dll.

Adanya berbagai potensi produk yang ada di Desa Kalipucang baik produk pertanian, peternakan ataupun pariwisata jika dimanfaatkan dan ditata secara baik maka akan menjadikan ekonomi Kalipucang semakin tumbuh. Adanya kegiatan ekonomi produktif ini dapat mendukung BUM Desa yang dimiliki oleh Desa Kalipucang, dimana dalam hal ini BUM Desa dapat bersinergi dengan masyarakat untuk mengembangkan berbagai usaha yang berasal dari potensi desa.

Selama ini masyarakat masih mengalami beberapa kesulitan, baik dalam proses pembuatan produk ataupun hasil ketika produk tersebut sudah jadi. Adapun beberapa kesulitan yang ditemui masyarakat diantaranya terkait pemasaran produk, inovasi yang terus perlu dilatih, kurangnya pengetahuan masyarakat.

Maka disini nantinya dengan keberadaan BUM Desa diharapkan mampu mengurangi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. Ketika kemampuan masyarakat sendiri semakin membaik, maka ini juga nantinya seiring berjalannya waktu akan meningkatkan kemampuan BUM Desa dalam mengelola potensi desa. Adapun hal-hal yang diharapkan masyarakat dari adanya BUM Desa terkait kondisi alam yaitu :

#### 6.2.1.4 Modal Sosial

Modal sosial adalah modal yang berasal dari sosial seperti jaringan sosial, organisasi, kepercayaan, dll. Sebelumnya perlu diketahui bahwa banyak tradisi yang sudah luntur diantaranya adalah tradisi upacara adat untuk mensyukuri hasil panen, wiwidan (syukuran menjelang panen yang bertempat di balai desa).

Selain itu tanggalan atau kalender jawa yang disebut mongso untuk menentukan tanggal tanam dan panen juga sudah lama tidak digunakan.

Hal tersebut tidak lain adalah karena berpindahnya masyarakat dari sektor pertanian komoditas pangan dan sayuran ke komoditas lahan kering dan peternakan sapi perah, cuaca yang sering berubah juga turut menjadi pendukung. Pada penelitian ini modal sosial terdiri dari empat variabel yaitu variabel X5.1 (Jaringan Sosial), X5.2 (Kepercayaan), X5.3 (Norma), dan X5.4 (Saluran Informasi).

*Pertama* variabel X5.1 (Jaringan Sosial). Jaringan sosial adalah kumpulan individu atau kelompok yang terikat oleh kepentingan atau tujuan yang sama, jaringan sosial sendiri dapat terbangun baik secara formal ataupun informal atas kesamaan suatu hal yang nantinya akan membentuk suatu kelompok sosial baik atas kepentingan politik, kepercayaan, dll (Arsyad 2015). Adapun contoh dari jaringan sosial adalah kelompok keagamaan seperti jamaah tahlil.

Pada Desa Kalipucang sendiri terdapat beberapa kelompok atau organisasi antara lain jamaah keagamaan seperti tahlil dan diba', PKK (Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga), Poktan (Kelompok Tani), SPR (Sekolah Peternakan Rakyat), Kopwan (Koperasi Wanita), Pokja (kelompok jaringan), Pokdarwis (Kolompok Sadar Wisata), Remas (Remaja Masjid), dll. Namun, banyaknya organisasi yang ada tidak semua masyarakat mengikutinya, dan ada beberapa organisasi yang baru berdiri serta sudah tidak aktif.

Sebagian besar masyarakat rata-rata hanya mengikuti satu sampai dua organisasi, kebanyakan organisasi yang diikuti adalah organisasi keagamaan seperti jamaah tahlil atau diba'. Tahlil atau diba' diadakan secara rutin seminggu sekali dengan keliling rumah bergiliran. Awal mula dibentuknya jamaah ini adalah untuk sambung silaturahmi namun seiring berjalannya waktu sedikit mengalami pergeseran yaitu hanya menjadi rutinitas, tempat arisan dan ajang untuk memamerkan seragam, memang ini memiliki tujuan baik agar lebih kompak, namun tanpa disadari sebagian dari mereka merasakan bahwa ini beban.

Selain dari itu adanya kelompok tani juga mengalami penurunan karena tidak semua aktif. Dari tujuh kelompok tani yang ada hanya terdapat empat yang aktif, itu pun ketika di telisik lebih mendalam, dari keempat yang ada dua yang mati suri alias masih vakum yaitu kelompok tani tunas mekar sari sejahtera dan arobusta 3, sementara yang aktif hanya dua yaitu kelompok tani dwi tunggal dan dodokan makmur (Buku Assesment PADI). Kelompok PKK juga begitu, baru akan mengadakan pertemuan ataupun kumpula bersama jika aka nada kegiatan acara, sehingga bisa dikatakan PKK berjalan aktif namun tidak rutin. Sementara pokja dan pokdarwis merupakan organisasi yang masih baru berdiri sekitar tahun 2017 sehingga aktivitasnya masih cukup terbatas.

Ketika dikaitkan dengan BUM Desa jaringan sosial ini merupakan hal yang cukup penting untuk mendukung kemajuan desa kedepannya. Khususnya masyarakat yang tergabung dalam organisasi pokja, pokdarwis, poktan dan PKK menganggap butuh adanya sinergitas dengan BUM Desa untuk saling bekerjasama dalam mengembangkan desa dan memperkuat kelembagaan yang ada. Sementara bagi sebagian besar yang hanya mengikuti organisasi keagamaan menganggap tidak berkepentingan untuk menjalin kerjasama dengan BUM Desa. (Perlu dikaji ulang)

Kedua variabel X5.2 (Kepercayaan). Kepercayaan masyarakat Kalipucang selama ini terhadap pemerintah desa cukup baik, dan sebagian besar dari mereka mendukung penuh keberadaan BUM Desa kedepannya karena menganggap adanya BUM Desa dapat memberikan manfaat yang cukup banyak baik ke desa ataupun masyarakat. Adapun beberapa harapan masyarakat Desa Kalipucang dengan adanya BUM Desa nantinya antara lain:

- Adanya BUM Desa dapat membuat masyarakat lebih berkembang dengan adanya kerjasama antara UKM (Usaha Kecil Menengah).
- Melakukan pemberdayaan untuk masyarakat yang tidak memiliki kemampuan.
- Turut membantu memasarkan produk unggulan desa.
- BUM Desa dapat berjalan dengan lancar sehingga keberadaannya dapat dirasakan oleh masyarakat.
- Sebagai jembatan untuk memajukan wisata yang ada di Desa.
- Memiliki pelayanan yang mudah untuk masyarakat
- Mengurangi pengangguran yang ada di desa.

Ketiga, Variabel X5.3 (Norma). Sementara untuk norma adalah hal yang berkaitan dengan tata kelola atau peraturan akan suatu hal. Pada penelitian ini norma tertuju pada peraturan terkait BUM Desa kedepannya. Diketahui masih sebagian kecil yang benar-benar mengikuti musdes (musyawarah desa) pada prosesi pendirian BUM Desa Kalipucang. Namun demikian, masyarakat memiliki pemahaman bahwa adanya keterlibatan masyarakat dalam turut serta pembuatan aturan BUM Desa merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Adapun alasannya yaitu agar masyarakat lebih bisa terbuka dan mudah dalam menyampaikan pendapat ataupun keluhan seperti halnya dari pihak UKM yang diharapkan dapat bersinergi dengan BUM Desa. Selain itu pada dasarnya

masyarakat masih belumbenar-benar mengetahui BUM Desa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga dengan adanya keterlibatan pada musdes juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat lebih jelas tentang apa itu BUM Desa? Programnya bagaimana? Pengurusnya siapa saja? Dll.

Tersampainya aturan BUM Desa dan adanya kesepakatan terkait aturan tersebut baik untuk pengelola BUM Desa dan masyarakat juga diperlukan agar transparan dan dapat bekerja sama dengan baik. Selain itu mengingat BUM Desa adalah lembaga bersama dari masyarakat dan kembali ke masyarakat diharapkan juga adanya sinkronisasi sehingga tidak ada kesalahpahaman dari berbagai pihak.

Salah satu contohnya yaitu ketika masyarakat mengetahui di BUM Desa memiliki sebuah usaha toko barang, masyarakat yang ingin menjualkan produknya dapat melakukan penitipan pada toko BUM Desa tersebut, sehingga antara masyarakat dan BUM Desa saling membantu satu sama lain, BUM Desa juga tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan dari masyarakat. Selain aturan BUM Desa, sanksi atas berbagai pelanggaran yang kemungkinan terjadi juga sebaiknya dibuat agar tertib, disiplin dan tidak saling menyalahkan.

*Keempat*, variabel X5.4 (Saluran Informasi). Dari sisi saluran informasi sendiri terkait BUM Desa masih belum merata tersebarnya informasi terkait BUM Desa Kalipucang ke seluruh masyarakat Desa. Hal itu juga dibenarkan oleh bapak kepala desa bahwa memang benar tidak semua masyarakat mengetahui soal rencana BUM Desa Kalipucang, sosialisasi sudah beberapa kali dilakukan dan masih dalam proses untuk sampai ke semua masyarakat.

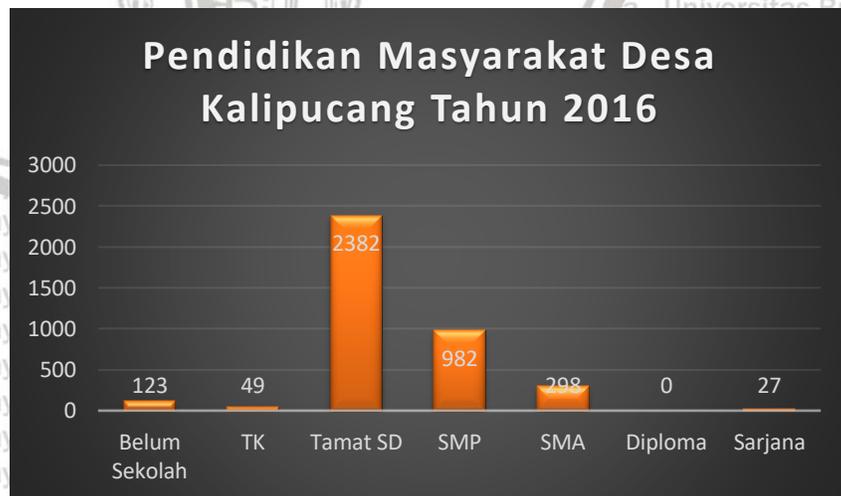
Namun demikian meskipun masyarakat sudah mengetahui soal BUM Desa Kalipucang, pemahaman terkait BUM Desa masih cukup kurang, tidak banyak masyarakat yang benar-benar memahami apa itu BUM Desa, hal itu terlihat dari

penejelasan masyarakat tentang BUM Desa yang msih mengawang. Hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat menjelaskan apa sebenarnya BUM Desa khususnya pada BUM Desa yang ada di Kalipucang. Bagi masyarakat BUM Desa adalah usaha milik desa untuk memajukan desa yang berada di bawah naungan desa.

### 6.2.1.5 Modal Manusia

Modal manusia adalah modal yang berasal dari sumberdaya manusia seperti tenaga kerja, usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, dll. Pada penelitian ini modal manusia dibagi kedalam tiga variabel yaitu X3.1 (Pendidikan), X3.2 (Kemampuan dalam mengelola BUM Desa), X3.3 (Kemampuan diluar BUM Desa). Jika bicara soal pendidikan, rata-rata dan mayoritas masyarakat Kalipucang masih memiliki pendidikan yang rendah yaitu SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah keatas) atau SMK (Sekolah Menengah Kejuruan).

**Gambar 6.2 Pendidikan Masyarakat Desa Kalipucang**



Sumber: Buku Profil Desa Kalipucang, 2017.

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa pendidikan masyarakat Kalipucang masih di dominasi oleh lulusan sekolah dasar yaitu sebanyak 2.382, TK (Taman Kanak-kanak) sebanyak 49 orang, belum sekolah sebanyak 123 orang, Tamatan SMP sebanyak 982 orang, Tamatan SMA sebanyak 298 orang, Diploma sebanyak nol dan tamatan sarjana masih sebanyak 27 orang. Sementara mata pencaharian masyarakat Kalipucang dengan pendidikan yang hanya tamatan SD/SMP/SMA sebagian besar adalah peternak murni dengan sampingan sebagai pedagang toko kecil atau serabutan seperti *ngoli* (istilah masyarakat Desa Kalipucang untuk pekerja serabutan seperti kuli bangunan, dll).

Kemampuan mengelola BUM Desa dilihat dari kemampuan masyarakat dalam berorganisasi yang sudah diikuti beserta manajemen dalam usaha yang pernah dijalaninya. Adapun syarat dalam menjadi pengurus BUM Desa antara lain (Dikutip dari pasal 14 permendesa No.14 Tahun 2015) :

- *pertama* yaitu warga desa yang memiliki jiwa wirausaha mengingat BUM Desa adalah sebuah lembaga usaha.
- *Kedua* Berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya selama dua tahun.
- *Ketiga* berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan peduli atau perhatian terhadap usaha ekonomi desa, BUM Desa dituntut transparan atau terbuka dalam menjalankan kegiatannya sehingga kejujuran menjadi indikator utama.
- *Keempat* Berpendidikan minimal setingkat SMU/SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat, syarat ini berlaku bagi pengurus utama atau pengelola harian BUM Desa. Sedangkan bagian yang menyangkut proses atau unit di bawah BUM Desa seperti unit usaha jasa, usaha retail, pengelolaan sampah, dsb nya tidak mengharuskan pengelolanya adalah lulusan SMA, asalkan dianggap mampu maka memiliki kemungkinan untuk menjadi pengurus pada unit usaha

BUM Desa tersebut. (<http://www.berdesa.com/syarat-menjadi-pengurus-bumdes/>).

Ceritakan soal berbagai potensi masyarakat tentang pengelolaan BUM Desa.

Sementara kemampuan diluar BUM Desa yaitu kemampuan masyarakat dalam pekerjaannya sehari-hari. Kemampuan yang paling banyak dimiliki masyarakat adalah terkait peternakan dan pertanian dimana ini telah menjadi kegiatan sehari-hari. Rata-rata mereka yang peternak juga seorang petani, yaitu petani rumput baik untuk ternaknya sendiri ataupun untuk dijual. Beberapa diantaranya juga seorang petani kopi, karena kebanyakan dahulunya adlah seorang petani kopi yang kemudian lambat laun berpindah ke peternak, dan mengganti lahan kopi menjadi lahan rumput. Beberapa lagi juga petani cengkeh namun tidak banyak karena cengkeh juga tidak dibudidayakan secara khusus.

### 6.3 Strategi dalam Pendirian BUM Desa melalui SLA (Sustainable Livelihood Approach).

Sebelum melangkah ke strategi ada yang perlu diketahui bahwa dalam menerapkan lima modal yang telah terpaparkan diatas ada beberapa konsekuensi yang harus di terima oleh Desa Kalipucang. Ketika lima modal tersebut semuanya ditangani dengan serius maka baik secara langsung ataupun tidak kelima modal tersebut akan mendukung proses berjalannya BUM Desa kedepannya. Kelima modal yang juga dapat digunakan untuk mengelompokkan Aset desa dapat berguna untuk desa dalam hal mengembangkan desanya berdasarkan portensi yang dimiliki desa.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Totok dalam bukunya Eko,et all (2015) bahwa ketika semua desa dapat memanfaatkan lahan dan Aset yang ada dengan berbagai sumber serta jenis komoditas, maka pendapatan desa serta masyarakat akan meningkat dengan cepat. Selain itu keberlanjutan dari suatu usaha yang berdasarkan

Aset yang dimiliki lebih dapat diukur karena bersumber dari internal desa dan bukan dari luar, maka dalam penggunaan ataupun pemanfaatan masyarakat lebih memahami serta dapat menguasai sektor yang akan dikelola.

Namun demikian ketika pemilihan lima modal tersebut tidak dibarengi dengan pengawasan yang cukup, maka akan ada modal yang semakin tinggi dan ada yang tertinggal. Sehingga itu tidak baik bagi usaha desa seperti BUM Desa karena akan ada tumpang tindih, serta ketidak seimbangan antara kelima modal tersebut. Begitu juga ketika kelima modal sudah ada dan diaplikasikan namun pada sisi pengelolaannya tidak serius dan focus, keberadaan lima modal tersebut juga tidak akan dirasa ada kemanafaatannya dan dirasa tidak membantu bagi BUM Desa khususnya bagi kesejahteraan masyarakat desa.

- **Konteks Kerentanan**

Konteks kerentanan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kerentanan trend dimana kerentanan terjadi karena faktor fluktuasi atau trend yang sedang terjadi seperti adanya migrasi, harga relative ekonomi, perubahan teknologi, ketidak pastian pasar, dll; dan kerentanan *shock* (kejutan) yaitu kerentanan yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak diduga seperti adanya bencana alam seperti banjir, longsor, tsunami, dll; dan terjadinya konflik ataupun perang.

Pada Desa Kalipucang sendiri ditemukan beberapa kerentanan yang terjadi atau memungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang, diantaranya yaitu :

- Kurangnya lapangan pekerjaan di desa khususnya bagi non petani/peternak, sehingga bagi mereka yang memiliki bakat lain diluar sektor tersebut merasa tidak terwadahi.

- Lahan rumput yang semakin sempit juga telah menjadikan minat untuk menjadi peternak menurun, dimana jumlah peternak semakin banyak sementara lahan rumput semakin sempit.
- Adanya hujan abu dari Bromo yang tidak bisa diantisipasi, namun hal ini jarang terjadi.
- Adanya perang atau konflik yang terjadi di tengah masyarakat karena kecemburuan sosial atau kesalahpahaman akan suatu hal.
- Kelangkaan sumber daya seperti air yang tidak sebebaskan dan semelimpah dulu dan juga rumput yang semakin berkurang.
- Adanya perubahan cuaca yang semakin tidak menentu.
- **Hambatan dan Peluang yang terjadi pada kelima modal dalam pembentukan BUM Desa Kalipucang.**

Pada kelima modal ditemukan beberapa peluang beserta hambatan yang terjadi di Desa Kalipucang khususnya yang mengarah pada pendirian BUM Desa.

*Pertama* pada modal keuangan memiliki hambatan yaitu (i) Masyarakat yang masih ketergantungan akan kredit bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak memiliki minat untuk saving ataupun berinvestasi seperti penambahan modal; (ii) masih banyaknya bank thitil atau rentenir yang berada desa; (iii) manajemen keuangan rumah tangga yang buruk. Sementara peluang yang ada yaitu (i) perputaran uang yang tinggi masuk dan keluar desa; (ii) adanya peluang untuk bersinergi dengan BANK jika hendak mendirikan BUM Desa; (iii) banyak pihak yang mendukung dan tawaran kerjasama baik dari dalam atau luar desa untuk berinvestasi.

*Kedua* modal fisik memiliki hambatan terkait akses pelayanan sarana prasarana yang masih kurang baik, dikarenakan lemahnya sumberdaya manusia; namun demikian banyak peluang yang ditemukan yaitu (i) pembangunan secara

kondisi fisik sudah bagus baik jalan ataupun sarana prasarana umunya, dimana ini nantinya dapat menunjang jalannya roda perekonomian yang ada di desa, khususnya ketika BUM Desa berdiri dan bergerak maka juga akan mendukung jalannya kerja yang ada pada unit-unit BUM Desa; (ii) memudahkan mobilisasi baik orang desa ataupun orang luar desa yang melakukan kunjungan; (iii) menambah kepercayaan masyarakat.

*Ketiga* modal alam. Adapun hambatan pada modal alam yaitu (i) adanya konflik yang mulai terjadi karena kecemburuan sosial perihal pemanfaatan alam; (ii) masih adanya pemahaman akan potensi yang kurang; (iii) perlu terus berinovasi; (iv) pemasaran yang masih menjadi kendala; (v) perlu adanya diversifikasi produk. Sementara peluang yang dapat dilihat yaitu (i) dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat; (ii) dapat menjadi tambahan pendapatan/pemasukan; (iii) Pemanfaat SDA yang lebih lestari dan berkelanjutan; (iv) banyaknya potensi yang belum optimal; (vi) terdapat pasar yang bisa dijadikan sasaran.

*Keempat* modal sosial. Adapun hambatannya yaitu (i) beberapa organisasi tidak aktif; (ii) didominasi oleh organisasi keagamaan; (iii) informasi yang tersebar dan diterima oleh masyarakat tidak merata; (iv) aturan terkait BUM Desa belum dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Sementara peluangnya yaitu (i) mulai terbentuknya organisasi yang mendukung BUM Desa seperti POKJA dan POKDARWIS; (ii) gerakan pemuda mulai kembali aktif; (iii) tingkat kepercayaan masyarakat ke pemdes baik terlihat dari adanya harapan yang tinggi dan dukungan penuh kepada pembentukan BUM Desa; (iv) sudah terbentuknya perdes terkait BUM Desa.

*Kelima* modal manusia. Adapun hambatan yang ada yaitu masih rendahnya sumberdaya manusia yang ada di Desa Kalipucang. Sementara

peluang yang dapat dilihat yaitu (i) terdapatnya sumber daya manusia yang dapat diasah; (ii) adanya potensi sumber daya manusia yang mampu tapi belum optimal; (iii) minat belajar yang tinggi.

Adapun strategi yang digunakan untuk pembentukan BUM Desa yaitu pertama membahas persoalan kerentanan yang kemungkinan terjadi di Desa Kalipucang; kedua melihat dari kelima modal berdasarkan hasil dari analisis statistic diatas yang focus dimulai dari modal paling ekstrim yaitu modal keuangan dan modal manusia; ketiga kemudian didialogkan dengan kebijakan yang telah ada dan mendukung pembentukan BUM Desa beserta akses yang dilakukan oleh masyarakat; dan keempat memaparkan dampak yang kemungkinan terjadi dari adanya kegiatan strategi tsb.

Pendialogkan dengan kebijakan – kebijakan yang ada dilakukan baik di tingkat Desa Kalipucang ataupun tingkat Kabupaten Pasuruan. Sehingga diharapkan nantinya strategi yang digunakan dapat sesuai dengan kondisi factual yang ada serta berkelanjutan karena didukung dan sesuai dengan peraturan pemerintah setempat.

Adapun strategi dimulai dengan focus pada modal yang paling ekstrim, dilihat dari sub bab sebelumnya diketahui bahwa modal yang paling lemah adalah modal manusia, sementara modal yang paling kuat adalah modal keuangan. Maka Strategi pertama yang harus dilakukan adalah dengan penguatan kepada modal yang paling lemah yaitu modal manusia. Kemudian yang kedua yaitu focus pada modal yang paling kuat yaitu modal keuangan. Sementara ketiga yaitu penguatan pada ketiga modal lainnya yaitu modal sosial, modal alam, dan modal fisik. Kelima modal sebenarnya memiliki posisi yang sama, jadi diharapkan dari kelima modal seimbang dan saling menopang serta menguatkan satu sama lain.

#### Modal Manusia

Modal manusia adalah modal paling lemah, diketahui bahwa di Desa Kalipucang masih banyak yang berpendidikan rendah, selain itu selama ini pembangunan desa juga

lebih terfokus pada pembangunan dan lebih sedikit untuk pemberdayaan. Maka diharapkan kedepannya agar konsep ini mulai dirubah dan digeser, bahwa adanya pemberdayaan kepada masyarakat desa itu juga hal yang perlu di perhatikan.

Bentuk daripada pemberdayaan sendiri ada beberapa macam diantaranya dapat berupa pendampingan ataupun pelatihan serta workshop mengenai tambahan informasi ataupun keterampilan yang mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat. Khususnya yang menyangkut soal pertanian ataupun peternakan mengingat mayoritas masyarakat Kalipucang memenuhi kehidupannya dari dua profesi tersebut.

Adanya pemberdayaan yang tersalurkan kepada masyarakat diharapkan nantinya mampu meningkatkan kemampuan mereka baik *soft skill* ataupun *hard skill*. Ketika kemampuan masyarakat semakin meningkat itu juga akan membantu dalam mengelola dan mengembangkan BUM Desa, sehingga nantinya BUM Desa dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat dan sebagai bentuk dari penguatan kelembagaan itu sendiri.

Sedangkan yang kedua yaitu modal keuangan. Modal keuangan adalah modal yang paling tinggi, hal yang paling menopang yaitu ada disisi kredit dimana hampir seluruh masyarakat desa Kalipucang menyukai dan memiliki kredit baik di koperasi atau bahkan di bank thitil. Maka tugas BUM Desa selanjutnya adalah untuk mengurangi kebiasaan masyarakat agar tidak bergantung lagi kepada bank thitil, sehingga tidak terjerat hutang yang semakin larut akan merugikan bagi kehidupannya.

Keberadaan bank thitil pada dasarnya membuat sebagian masyarakat tidak nyaman dikarenakan bunga yang terlalu tinggi. Meskipun cicilan dilakukan pada setiap minggu namun jika terus-terusan hal ini masih terjadi masyarakat sebenarnya juga mengalami kerugian dari kredit yang dilakukan tersebut. Maka disini tugas BUM Desa nantinya adalah dapat mengurangi keberadaan bank thitil yang menjerat masyarakat.

Meskipun focus pada kedua hal tersebut, namun tidak mengabaikan akan ketiga modal lainnya yaitu modal sosial, modal alam dan modal fisik. Adapun modal sosial maka

penguatan juga harus dilakukan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BUM Desa nantinya agar saat perjalannya mendapatkan dukungan dan sokongan dari masyarakat sehingga dengan begitu maka BUM Desa akan lebih kuat dan percaya diri untuk memajukan desa.

Informasi yang sempurna dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat juga akan mendukung untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah desa. Begitu juga pada sisi jaringan sosial yang harus diperlebar, sehingga akan dapat tambahan masukan atau suntikan untuk terus memperbaiki lembaga atau pun mengembangkannya.

Sementara pada modal alam yang perlu dikuatkan khususnya adalah pada bagian olahan hasil pangan yang dianggap mampu meningkatkan nilai tambah pada potensi alam yang dimiliki. Maka keberadaan BUM Desa nantinya harus mampu menopang adanya berbagai produk olahan alam yang diproduksi oleh warga tersebut. Sehingga dengan adanya wadah yang jelas diharapkan menjadi tempat pertama untuk mengembangkan aset dan potensi desa.

Pada modal fisik sendiri diketahui sudah cukup bagus kondisinya, namun pada faktanya dilapangan masih ditemui adanya aksesibilitas pada pelayanan yang masih kurang. Hal ini ada kaitannya dengan modal manusia, maka ini berkesinambungan dengan modal manusia tadi, bahwa diketahui modal manusia yang ada di Desa Kalipucang memang masih lemah. Maka dengan adanya perbaikan dan penguatan modal manusia nantinya akan berimbas pada penguatan modal fisik dari segi aksesibilitas pelayanan yang semakin baik dan ramah terhadap masyarakat.

Pelayanan yang semakin baik ini nantinya juga akan turut meningkatkan kepercayaan masyarakat pada proses berjalannya BUM Desa. Masyarakat yang merasakan kenyamanan secara tidak langsung akan betah dan mendukung penuh kinerja

BUM Desa kedepannya dan mereka juga kan turut serta memajukan desa melalui BUM Desa tersebut.

Maka dengan memperbaiki modal yang ekstrim kemudian diseimbangkan kepada modal lainnya merupakan hal yang digunakan untuk memperbaiki Aset desa yang sudah dimiliki guna keberlanjutan kehidupan khususnya melalui usaha desa yang disebut BUM

Desa. Adanya pembentukan usaha desa ini senada dengan peraturan Kabupaten Pasuruan pada pasal 26 UU No.1 Tahun 2017 tentang pemerintah desa bahwa desa diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul kewenangan lokal desa. Selain itu pada pasal no.4 juga dijelaskan bahwa keuangan desa juga meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Pendirian BUM Desa oleh desa berdasarkan Aset yang dimiliki juga diperkuat oleh UU Desa No.6 Tahun 2014. Pada pasal 4 disebutkan bahwa adanya UU Desa tersebut salah satunya bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Pasal 87 juga menyebutkan bahwa BUM Desa dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan, perekonomian ; serta potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun proses masyarakat dalam mendirikan BUM Desa sendiri meliputi adanya sosialisasi namun itu juga masih ruang lingkup kecil karena belum semua masyarakat mendapatkan sosialisasi tersebut. Begitu pula dengan adanya musdes (musyawarah desa) yang masih dipahami oleh sebagian masyarakat saja. Serta sudah ditetapkannya perdes (peraturan desa terkait BUM Desa. Adanya peraturan ini pun belum sepenuhnya diketahui ataupun dipahami oleh masyarakat secara luas. Keberadaan perdes ini juga turut mendukung dan memperkuat pendirian BUM Desa Kalipucang. namun demikian BUM

Desa Kalipucang masih tergolong cukup baru dan masih perlu banyaknya masukan agar lebih kuat baik dari kelembagaan ataupun lainnya.

**Tabel 6.3 Tabel Potensi dan Rekomendasi Usaha pada BUM Desa Kalipucang**

Potensi	Kondisi	Jenis Usaha	Harapan
Air yang melimpah	Belum tertata dengan baik. Masih belum merata pemanfaatannya di masyarakat	Bisnis Sosial “Pengelolaan Air Bersih”	Agar semua masyarakat mendapatkan air bersih yang sama, mengingat air adalah kebutuhan kehidupan serta pada bisnis ini lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada keuntungan usaha.
Perputaran uang yang tinggi di desa baik masuk ataupun keluar	Masyarakat masih terjerat bank thitil	Bisnis Keuangan	Perputaran uang kembali ke desa dan melaluai satu pintu. Ketergantungan akan bank thitil berkurang.
Listrik yang ada di masyarakat	Belum terwadahi dalam satu pintu untuk pembayarannya	Bisnis Perantara	Masyarakat tidak kebingungan lagi melalui orng ketiga, karena dikelola oleh satu pintu/BUM Desa
Mulai tumbuhnya UKM yang ada di desa. Hasil ternak. Hasil pertanian.	Belum terwadahi Ada beberapa kendala seperti pasar dan pemasaran. Belum termanfaatkan secara optimal	Usaha perdagangan	Menjadi sebuah wadah untuk usaha masyarakat serta mengembangkan potensi yang ada.
Pemandangan alam yang indah nan asri	Masih alami	Usaha bersama wisata desa	Agar termanfaatkan adanya keelokan alami yang dimiliki oleh desa sehingga dapat dinikmati oleh orang luar desa atau wisatawan didukung dengan mulai tumbuhnya

			UKM yang ada di desa
--	--	--	----------------------

Sumber : Diolah oleh Penulis

Melihat adanya berbagai kerentanan serta lima modal Aset yang terdapat di desa untuk mendirikan BUM Desa, maka ada beberapa unit usaha yang dapat dijadikan rujukan untuk mengurangi kerentanan tersebut serta lebih memanfaatkan peluang yang ada seperti yang telah tertulis pada tabel diatas, adapun penjelasannya sebagai berikut:

- **Bisnis Sosial** : diketahui sebelumnya bahwa masyarakat Kalipucang tidak mendapatkan sumber daya air yang merata maka disarankan agar memiliki unit usaha pengelolaan air bersih, sehingga harapannya masyarakat selanjutnya dapat merasakan air bersih secara merata. Bisnis sosial ini tidak menargetkan keuntungan tetapi lebih mengutamakan aspek sosial yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Maka tujuan dari usaha pengelolaan air bersih yaitu agar tiap rumah warga dapat merasakan air bersih yang sama dan tidak bertujuan untuk mendapatkan laba dari pelayanan pemanfaatan air tersebut.
- **Bisnis Keuangan** : Perputaran keuangan yang ada di desa Kalipucang cukup tinggi mengingat hal itu maka usaha keuangan cocok untuk dijadikan salah satu unit BUM Desa Kalipucang. Terlebih lagi banyaknya warga desa yang bergantung akan sisi kredit khususnya pada pihak rentenir yaitu bank thitil. Adanya unit usaha tersebut mungkin bisa menjadi alternative solusi dalam mengantisipasi adanya bank thitil. Jika BUM Desa mampu mengelola usaha unit tersebut maka diharapkan nantinya lambat laun akan mengurangi keberadaan bank thitil tersebut. Sehingga masyarakat juga lebih merasakan aman dan nyaman dan tidak perlu jauh-jauh keluar desa atau bisa dikatakan sebagian perputaran uang yang ada di masyarakat berputar di desanya sendiri dan kembali untuk desa. Selain dapat menyelamatkan nasib warga yang bergantung pada bank thitil, adanya usaha keuangan ini juga dapat

mendorong produktivitas usaha yang ada di masyarakat yaitu dengan akses permodalan yang lebih mudah karena berada di desa dan dengan bunga yang cukup rendah.

- Lembaga Perantara: desa dapat mendirikan jasa pembayaran listrik, dalam hal ini jika pembayaran listrik terwadahi dalam satu pintu yaitu BUM Desa, maka akan meningkatkan PADes yang ada di desa, karena perputaran uang pembayaran listrik berputar di desa .

- Usaha perdagangan: Usaha ini dapat berproduksi ataupun berdagang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk dipasarkan pada pasar yang lebih luas. Mulai tumbuhnya UKM yang ada di desa Kalipucang dan masih kesulitan dalam hal pemasaran, maka bisnis ini dirasa cocok karena dapat membantu dan memudahkan masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk menyalurkan produknya. Selain itu juga ada beberapa hasil alam seperti hasil ternak yang butuh inovasi maka, usaha ini cocok digunakan untuk melakukan produksi pada Aset yang masih belum dimanfaatkan.

- Usaha bersama: melihat banyaknya potensi yang dimiliki dari hasil alam yang ada baik dari pemandangan yang dapat dilestarikan serta didukung dengan adanya berbagai usaha masyarakat, maka usaha ini cocok didirikan di Desa Kalipucang yaitu dengan membangun desa wisata yang mengatur serta mengorganisir berbagai jenis usaha yang ada di desa, selain itu pada usaha ini BUM Desa dapat membuka akses terbuka dan luas bagi siapapun masyarakat yang ingin mengambil peran pada kegiatan wisata tersebut.

Adapun secara ringkas, *market assessment* untuk BUM Desa Kalipucang dijabarkan pada penjelasan di bawah ini;

**a. Market Assesment**

**Segmen Pasar** yaitu masyarakat baik dalam ataupun luar Desa Kalipucang.

**Target Pasar** yaitu masyarakat desa Kalipucang yang membutuhkan produk baik jasa ataupun barang seperti air bersih, usaha simpan pinjam, jasa pembayaran listrik, beberapa produk olahan (UKM) dan wisata yang diperuntukan bagi masyarakat lokal ataupun luar desa.

#### b. Permintaan

Dari penelitian yang telah dilakukan, Sebagian besar masyarakat membutuhkan keberadaan usaha yang terdapat di BUM Desa karena, sebagian besar masyarakat membutuhkan pengelolaan air bersih, usaha simpan pinjam, jasa pembayaran listrik, beberapa produk olahan (UKM) dan juga beberapa wisata yang telah dibangun untuk pengembangan ekonomi Desa Kalipucang.

#### c. Penawaran

Keberadaan usaha yang ada di BUM Desa ini tidak boleh menyaingi usaha masyarakat Desa Kalipucang. Sementara jika dari luar Desa Kalipucang banyak pesaing bermunculan khususnya dari segi UKM dan wisata desa.

#### d. Rencana Penjualan

Jika sebagian besar hanya masyarakat Desa Kalipucang saja, dan untuk usaha UKM dan wisata itu diperuntukan untuk masyarakat luas.

### A. BISNIS SOSIAL

#### Strategi Pemasaran Perusahaan dan Pesaing

**Strategi Pemasaran Perusahaan** dilakukan berdasarkan analisa 7 P dengan alat analisis SWOT menurut Kottler dalam Radif (2014) yang terdiri atas :

##### 1. Product

Berupa air bersih yang diperuntukan bagi sebagian besar masyarakat Desa Kalipucang karena semakin padatnya penduduk penggunaan air bersih semakin

besar sehingga dibutuhkannya pemerataan air agar setiap masyarakat dapat merasakan manfaat yang sama.

## **2. Price**

Harga lebih murah dibandingkan harus membangun PDAM, perhitungan secara meteran. Sehingga masyarakat dapat mendapatkan air bersih tanpa harus mengeluarkan biaya tinggi.

## **3. Promotion**

Strategi yang digunakan yaitu dengan cara offline seperti sosialisasi kepada masyarakat Desa Kalipucang.

## **4. Placement**

Penyebaran air bersih melalui pipa-pipa yang dihubungkan ke rumah-rumah warga.

## **5. People**

Masyarakat Desa Kalipucang dan untuk generasi masyarakat selanjutnya.

## **6. Process**

Berawal dari kelangkaan air yang terdapat di pegunungan Desa Kalipucang sehingga masyarakat saling berebut untuk mendapatkan air bersih. Kemudian muncullah usaha penyaluran air bersih oleh BUM Desa agar dikelola oleh satu badan usaha yang terfokus pada unit bisnis sosial.

## **7. Physical Evidence**

Masyarakat dapat merasakan adanya pemerataan air bersih.

## **B. BISNIS KEUANGAN**

**Strategi Pemasaran Perusahaan** dilakukan berdasarkan analisa 7 P dengan alat analisis SWOT menurut Kotler dalam Radif (2014) yang terdiri atas :

### 1. **Product**

Berupa jasa simpan pinjam keuangan kepada masyarakat Desa Kalipucang.

### 2. **Price**

Tingkat bunga yang rendah bagi masyarakat yang akan melakukan pinjaman, sehingga diharapkan masyarakat yang semula meminjam kepada pihak lain khususnya *bank thitil*, beralih ke simpan pinjam yang ada pada BUM Desa. Selain itu pada segi tabungan juga diberikan tingkat bunga yang cukup tinggi atau imbalan yang nyata sehingga masyarakat tertarik untuk memiliki tabungan atau simpanan pada usaha ini.

### 3. **Promotion**

Strategi yang digunakan yaitu dengan cara offline seperti sosialisasi kepada masyarakat Desa Kalipucang.

### 4. **Placement**

Pedistribusian secara langsung oleh pihak pengelola BUM Desa bagian unit usaha simpan pinjam.

### 5. **People**

Masyarakat Desa Kalipucang dan untuk generasi masyarakat berikutnya, khususnya masyarakat yang memiliki kebiasaan melkaukan hutang piutang baik di dalam ataupun luar desa.

### 6. **Process**

Berawal dari maraknya dan kebiasaan masyarakat dalam melakukan hutang piutang baik diluar desa seperti koperasi atau bank *thitil* ataupun di dalam desa seperti ke perorangan, atau organisasi. Sehingga dirasa perlu didirikannya usaha simpan pinjam untuk mengurangi ketergantungan masyarakat khususnya pada *bank thitil* yang memiliki bunga tinggi, karena dirasa telah menjerat dan merugikan

masyarakat. Perputaran uang yang tinggi di Desa Kalipucang harapannya akan tetap berputar dan kembali ke desa.

### 7. **Physical Evidence**

Masyarakat dapat merasakan pinjaman dari pihak desa tanpa harus pinjam melalui *bank thitil* yang bunganya memberatkan dan membebani masyarakat.

Begitu pula dengan masyarakat yang ingin menabung dapat melakukan simpanan pada usaha simpan pinjam desa.

## C. **BISNIS PERANTARA**

**Strategi Pemasaran Perusahaan** dilakukan berdasarkan analisa 7 P dengan alat analisis SWOT menurut Kottler dalam Radif (2014) yang terdiri atas :

### 1. **Product**

Berupa jasa pembayaran listrik kepada masyarakat Desa Kalipucang.

### 2. **Price**

Tingkat harga yang terjangkau dan murah sehingga masyarakat dapat menikmati keuntungan dari membayar listrik lewat desa.

### 3. **Promotion**

Promosi dilakukan secara offline melalui sosialisasi.

### 4. **Placement**

Pedistribusi secara langsung oleh pihak pengelola BUM Desa bagian unit usaha listrik.

### 5. **People**

Masyarakat Desa Kalipucang dan untuk generasi masyarakat berikutnya yang memiliki listrik jenis token atau pra bayar.

### 6. **Process**

Berawal dari sebagian masyarakat yang memiliki listrik jenis token atau pra bayar.

## 7. **Physical Evidence**

Masyarakat dapat membeli token tanpa harus keluar Desa Kalipucang seperti ke Nongkojajar atau Kecamatan Tutur yang membutuhkan waktu beberapa menit.

## D. **BISNIS PERDAGANGAN**

**Strategi Pemasaran Perusahaan** dilakukan berdasarkan analisa 7 P dengan alat analisis SWOT menurut Kottler dalam Radif (2014) yang terdiri atas :

### 1. **Product**

Berupa perdagangan ataupun sesuatu yang diproduksi oleh masyarakat Desa Kalipucang yang menjadi kebutuhan mereka.

### 2. **Price**

Tingkat harga untuk barang kebutuhan masyarakat yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pembelian yang dilakukan diluar desa. Sementara untuk barang produksi dari masyarakat seperti UKM dengan sasaran wisatawan harga disesuaikan dengan biaya habis yang digunakan untuk produksi barang tersebut serta disesuaikan dengan barang luar desa dengan jenis yang sama dengan harapan mampu bersaing kedepannya.

### 3. **Promotion**

Promosi dilakukan secara offline dan online baik secara mouth to mouth, sosialisasi, atau media online seperti sosial media facebook, instagram, youtube,dll.

### 4. **Placement**

Pedistribusian secara langsung oleh pihak pengelola BUM Desa bagian unit usaha perdagangan ataupun oleh perantara pokdarwis dan pokja bagian wisata desa untuk digabungkan dalam paket wisata.

## 5. *People*

Masyarakat Desa Kalipucang dan untuk generasi masyarakat berikutnya

## 6. *Process*

Berawal dari masyarakat yang harus membeli beberapa kebutuhan keluar desa seperti ke Nongkojajar atau Kecamatan Tutut, serta mulai tumbuhnya UKM yang ada di Desa Kalipucang, dimana produk dihasilkan dari potensi yang terdapat di desa.

## 7. *Physical Evidence*

Masyarakat dapat membeli kebutuhan tanpa harus keluar Desa Kalipucang seperti ke Nongkojajar atau Kecamatan Tutur yang membutuhkan waktu beberapa menit. Selain itu masyarakat yang memiliki ketrampilan usaha dagang ataupun UKM dapat memasarkan produk mereka melalui desa sehingga ada tempat pemasaran yang jelas yang digunakan sebagai wadah.

## E. BISNIS BERSAMA

**Strategi Pemasaran Perusahaan** dilakukan berdasarkan analisa 7 P dengan alat analisis SWOT menurut Kottler dalam Radif (2014) yang terdiri atas :

### 1. *Product*

Berupa wisata desa yang ada di Desa Kalipucang. Adapun wisata tersebut antara lain; (i) Sumber Telaga, (ii) Air Terjun Sumber Nyonya, (iii) Kampung Susu, (iv) Kebun Kopi, dan (v) Bukit Tumang dan juga terdapatn (vi) Homestay bagi wisatawan yang ingin menginap di desa.

### 2. *Price*

Tingkat harga untuk wisata sebesar Rp.5000 dengan parkir Rp.2000, harga dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan dengan bertambahnya fasilitas yang

dimiliki oleh wisata terkait. Sementara pada homestay sebesar Rp.100.000 dengan fasilitas menginap serta makan dua kali.

### **3. Promotion**

Promosi dilakukan secara offline dan online baik secara mouth to mouth, sosialisasi, atau media online seperti sosial media facebook, instagram, youtube,dll.

### **4. Placement**

Pedistribusian secara langsung oleh pihak pengelola BUM Desa bagian unit usaha bersama ataupun oleh perantara pokdarwis dan pokja bagian wisata desa.

### **5. People**

Masyarakat Desa Kalipucang dan untuk generasi masyarakat berikutnya

### **6. Process**

Berawal dari banyaknya potensi wisata yang ditemukan di desa. Keberadaan wisata yang mulai dikembangkan dimana terdapat lebih dari satu wisata sehingga memunculkan inisiatif untuk pengembangan homestay. Jadi bagi wisatawan luar kota yang jauh dan ingin menikmati seluruh wisata yang ada di Desa Kalipucang dapat sekaligus menginap di desa dan beristirahat di desa tsb.

### **7. Physical Evidence**

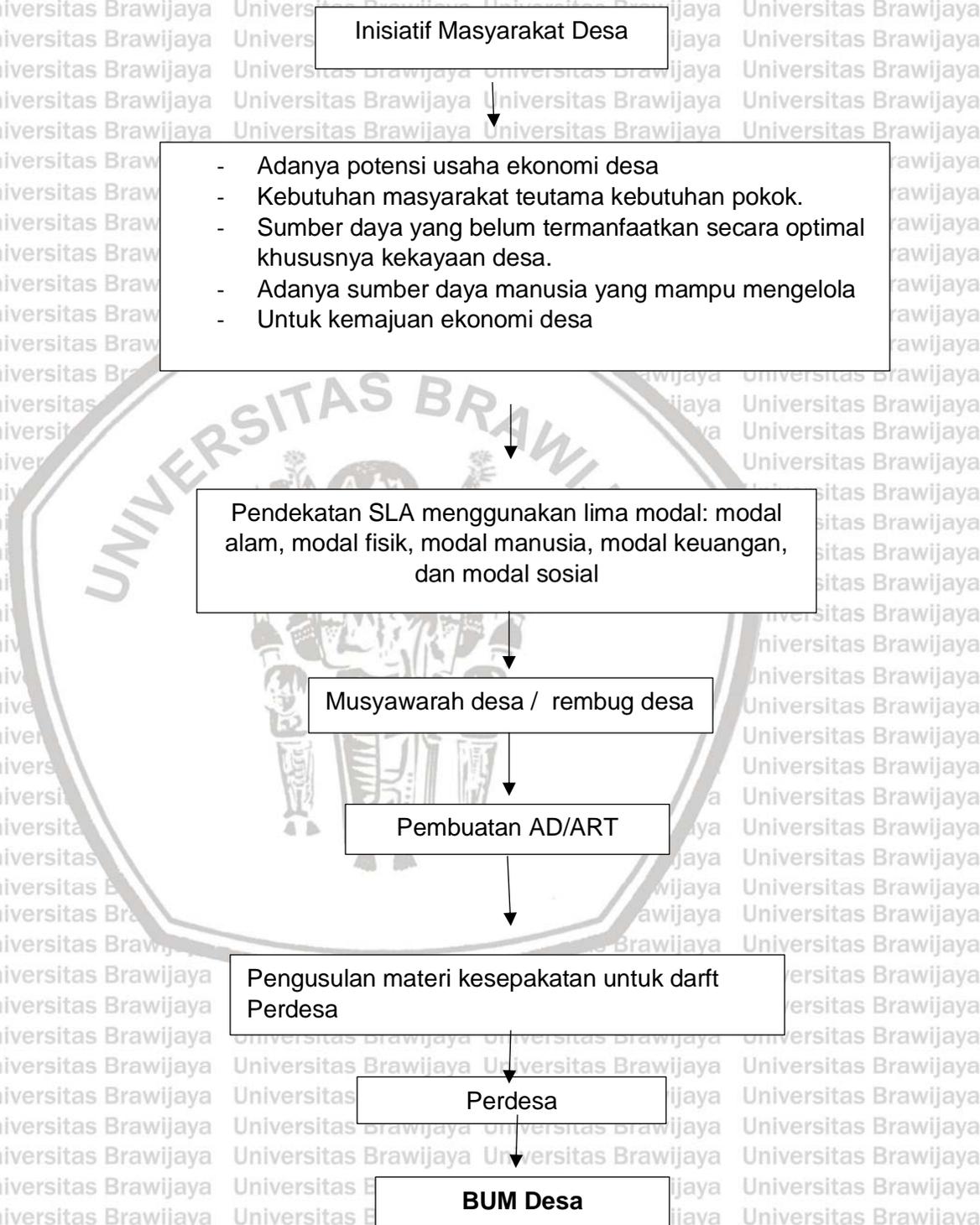
Wisata berasal dari keelokan alam Kalipucang yang kemudian di permak sedemikian rupa sehingga dapat dinikmati dan dikunjungi baik masyarakat lokal Desa Kalipucang ataupun wisatawan luar kota. Adapun wisata terdapat di beberapa dusun yang berbeda. Wisata Sumber Telaga berada di Dusun Dodokan, wisata Sumber Nyonya berada di Dusun Jelag, wisata Kebun Kopi berada di Dusun Cikur, wisata Kampung Susu dan Bukit Tumang berada di Dusun Kuntul Utara.

Adapun dampak yang diharapkan dari adanya upaya tersebut yaitu:

1. Peningkatan pendapatan baik individu/masyarakat ataupun PADes
2. Peningkatan pendapatan masyarakat.
3. Peningkatan keterampilan dan wawasan masyarakat
4. Menambah link, kenalan dan teman baru.
5. Memperkenalkan desa ke khalayak ramai.
6. Membuka lowongan pekerjaan
7. Menjadi desa yang lebih mandiri dari sebelumnya.
8. Penggunaan sumber daya alam yang lebih dilestarikan
9. Memiliki wadah untuk menyaurkan bakat, produk serta potensi yang dimiliki oleh desa.
10. Peningkatan manajemen keuangan keluarga.
11. Mengurangi ketergantungan pada tentenir.
12. Penguatan kelembagaan desa.

Sementara adapun tahapan yang dapat dilakukan dalam strategi penyusunan BUM Desa sebagaimana berikut:

**Gambar 6.3 Strategi Tahapan Pembentukan BUM Desa Kalipucang**



Sumber: Diolah oleh Penulis

Adapun penjelasannya sebagai berikut bahwa pembentukan BUM Desa harus berasal dari inisiatif warga atau masyarakat setempat, dan bukan dari pihak lain atau ketiga diluar desa. Inisiatif tersebut dapat muncul atas berbagai pertimbangan seperti dirasakannya adanya sebuah potensi yang ada di desa untuk membuat usaha ekonomi desa, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya pada kebutuhan pokok, adanya sumberdaya yang belum dimanfaatkan secara optimal khususnya kekayaan desa, adanya sumberdaya manusia yang mampu mengelola, serta keinginan untuk memajukan desanya.

Pada pencarian berbagai alasan di atas hal tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan SLA (*Sustainable Livelihood Approach*) yaitu melihat kekayaan desa dengan lima modal antara lain modal alam, modal fisik, modal manusia, modal keuangan dan modal sosial. Setelah itu masyarakat bisa mulai mengadakan rembuk atau musyawarah desa (musdes) mengenai pembentukan BUM Desa. Pada musdes ini masyarakat juga dapat menyampaikan temuan yang mereka dapat berdasarkan lima modal tersebut sembari mendiskusikan terkait pembentukan BUM Desa.

Setelah musdes selesai dilakukan, maka selanjutnya adalah menyusun pembuatan AD/ART (Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga), kemudian dilanjutkan dengan pengusulan materi kesepakatan untuk draf perdesa (peraturan desa) tentang BUM Desa. Maka ketika usulan itu selesai dan diterima, perdesa disahkan, yang kemudian dengan resmi dapat mendirikan BUM Desa, pendirian ini juga dilakukan secara musyawarah, seperti musdes sebelumnya.

## BAB VII PENUTUP (KESIMPULAN DAN SARAN)

Pada hasil penelitian ini dapat diambil beberapa kesimpulan dari tiga rumusan masalah yang dicari. Kemudian nantinya dari berbagai kesimpulan tersebut dibuatlah sebuah rekomendasi sebagai rujukan untuk stakeholder terkait.

### 7.1 Kesimpulan

Adapun beberapa kesimpulannya sebagai berikut;

1. Dana Desa masih digunakan untuk pembangunan fisik, seperti untuk pembangunan gedung, perbaikan jalan, dll. Sementara masih sedikit yang difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat, Hal ini dikarenakan masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa kemajuan sebuah desa dilihat dari pembangunan fisik.
2. Modal yang paling kuat di Desa Kalipucang yang berkaitan dengan BUM Desa yaitu modal keuangan sebesar 60.6, kedua modal fisik sebesar 56.0, ketiga modal alam sebesar 54.8, keempat modal sosial sebesar 53.4, dan yang paling lemah yaitu modal manusia sebesar 41.8. Aksesibilitas dalam memperoleh modal keuangan lebih mudah didapatkan oleh masyarakat dan selama ini masyarakat fokus pada akses keuangan yang berputar di desa, begitu pula dengan modal fisik yang menjadi perhatian dari segi pembangunan infrastruktur. Pada modal alam sendiri masyarakat hanya fokus pada pekerjaan mereka, namun tidak melihat kekayaan alam bentuk lainnya dan belum ada fikiran untuk melestarikan alam itu sendiri, sementara pada modal sosial banyak ditemukan organisasi sosial yang tidak aktif, sementara pada modal manusia minat untuk memiliki pendidikan masih kurang ataupun rendah.
3. Strategi yang digunakan yaitu dengan mengadopsi dari hasil yang didapat dari kelima modal, dimana perhatian pertama yaitu pada modal keuangan yaitu

mengurangi keberadaan bank *thitil* dengan keberadaan BUM Desa, setelahnya fokus kedua yaitu pada pengembangan kapasitas modal manusia melalui berbagai bentuk pemberdayaan, kemudian dilanjutkan dengan memperbaiki ketiga modal lainnya. Selain itu juga ditemukan beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Desa Kalipucang, Maka keberadaan BUM Desa kedepannya diharapkan mampu menghadapi kerentanan yang dapat merugikan lembaga atau masyarakat. Tahapan pendirian BUM Desa sendiri dimulai dari adanya inisiatif masyarakat, yang kemudian melihat kekayaan desa berdasarkan lima modal ( modal alam, modal fisik, modal manusia, modal keuangan dan modal sosial)., setelah itu musdesa, pembuatan AD/ART, pengusulan penetapan perdesa, setelah perdesa disahkan, maka BUM Desa juga dapat didirikan secara resmi.

## 7.2 Rekomendasi

Adapun dari hasil dan kesimpulan yang telah didapat di atas, ditemukan beberapa rekomendasi, khususnya untuk stakeholder terakit:

1. Pemerintah desa sebaiknya mulai menyeimbangkan antara pembangunan dan pemberdayaan. Sehingga dari keduanya saling mendukung satu sama lain untuk kemajuan desa, mengingat sisi pembangunan telah menjadi perhatian utama selama ini yang terlihat dari banyaknya insfrastruktur dan sarana dalam kondisi yang bagus, maka langkah selanjutnya dana desa dialokasiakan ke sisi pemberdayaan jauh lebih tinggi, sehingga ada peningkatan kemampuan SDM yang kedepannya dapat menjadi bekal untuk mencari penghidupan.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, diketahui bahwa modal yang paling tinggi yaitu modal keuangan, kedua modal fisik, ketiga modal alam, keempat modal sosial dan kelima modal manusia. Maka langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah yaitu perhatian difokuskan

dahulu pada modal yang paling kuat dan lemah yaitu modal keuangan dan modal manusia. Pada modal keuangan harapannya keberadaan BUM Desa kedepannya mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada bank *thitil*, karena dirasa telah merugikan masyarakat. Sementara pada modal manusia dengan adanya BUM Desa diharapkan mampu menjadi sebuah tempat atau wadah untuk menampung kreativitas serta bakat masyarakat yang tidak tersalurkan, selain itu juga dapat digunakan sebagai jalan untuk mengembangkan serta mengasah kemampuan masyarakat untuk mencari penghidupan. Selanjutnya pemerintah fokus kepada ketiga modal lainnya, pertama modal alam, jika selama ini masyarakat hanya fokus mencari penghidupan berdasarkan hasil alam secara alami dan mentah, maka berdasarkan penelitian diketahui bahwa olahan hasil alam justru memiliki pengaruh pada kemauan penghidupan mereka, sehingga sebaiknya BUM Desa nantinya fokus kepada olahan hasil alam yang dimiliki oleh desa seperti UKM yang ada di desa yang membuat produk berasal dari kekayaan alam desa. Ketika modal manusia sudah mendapat perhatian sebelumnya, maka ketika akan menangani olahan modal alam akan lebih mudah, karena dari segi SDM sudah mendapatkan bekal atau kemampuan untuk mengembangkan desanya. Selanjutnya pada modal sosial adanya organisasi yang telah mati perlu diaktifkan kembali serta berjejaring terus perlu dilakukan, keberadaan BUM Desa ini juga menjadi pintu semangat masyarakat dalam aktif kembali berorganisasi dan berjejaring, keberadaan pokja dan pokdarwis yang baru muncul harus tetap dijaga eksistensinya sehingga terus mendorong kemajuan BUM Desa. Sementara pada modal fisik yang sudah baik ini perlu dipertahankan dengan melakukan perawatan yang baik oleh masyarakat desa, sehingga kondisinya tetap terjaga, dan ini akan mendukung BUM Desa khususnya dari segi infrastruktur yang berkaitan dengan pengelolaan wisata desa.

3. Melihat berbagai potensi, hambatan serta beberapa kerentanan yang mungkin terjadi, maka berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran terkait usaha yang dapat dilakukan oleh BUM Desa Kalipucang, antara lain :

- Usaha air bersih : hal ini mempertimbangkan kemungkinan terjadinya kelangkaan di masa yang akan datang, sehingga perlu dikelola dari sekarang sehingga masyarakat generasi selanjutnya tetap dapat mengakses air bersih, selain itu juga agar masyarakat dapat merasakan air bersih secara merata, jadi manfaat yang didapat sama antara satu dengan yang lainnya.

- Usaha listrik : selama ini di Desa Kalipucang petugas yang keliling untuk pembayaran listrik hanya pada listrik pasca bayar, sementara pada pra bayar belum ada. Maka keberadaan usaha listrik pada BUM Desa diharapkan memudahkan masyarakat yang memiliki listrik jenis pra bayar atau token dengan harga yang tentunya terjangkau bagi masyarakat Desa Kalipucang.

- Usaha dagang : mulai tumbuhnya UKM yang ada di desa yang belum memiliki tempat untuk melakukan pemasaran, maka BUM Desa dapat menjadi sebuah pintu untuk mengembangkan UKM yang ada. Selain itu mengingat hasil penelitian yang menyebutkan bahwa olahan hasil alam dapat mendukung kemajuan desa melalui BUM Desa, maka usaha dagang ini tepat jika digunakan sebagai wadah untuk kreatifitas masyarakat terakit produk oalahn hasil alam yang mereka miliki.

- Usaha bersama : Banyaknya potensi wisata yang ada di Desa Kalipucang dapat dimanfaatkan sebagi usaha bersama berbentuk wisata desa yang berada di bawah naungan BUM Desa. Wisata desa ini juga telah didukung dengan keberadaan insfrastrktur desa yang

memiliki kondisi yang baik, selain itu tumbuhnya UKM juga turut mendorong jalannya wisata kedepannya.

4. Penelitian ini hanya menggunakan tahapan strategi secara sederhana serta analisis swot 7 P untuk usaha pada BUM Desa Kalipucang, maka sebaiknya pada desa yang ingin mendirikan BUM Desa selain menyusun strategi juga melakukan analisis *business plan* secara menyeluruh agar lebih mendetail.

5. Bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian hingga tahap pengelolaan BUM Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. "Pembangunan Perdesaan Pendekatan Partisipatif, Tipology, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan." In Yogyakarta: Graha Ilmu, 174.
- Alkhdafi (2015) "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015", Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Allison, E. H., & Ellis, F. (2001). The Livelihoods Approach and Management of Small-Scale Fisheries The livelihoods approach and management of small-scale fisheries. *Marine Policy*, 25(September), 377–388. [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(01\)00023-9](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(01)00023-9)
- Allison, E. H., & Horemans, B. (2006). Putting the principles of the Sustainable Livelihoods Approach into fisheries development policy and practice. *Marine Policy*, 30(6), 757–766. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2006.02.001>
- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2016. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta." *Modus* 28(2): 155–67.
- BAPPEDA (2015) 'Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal Kota Surakarta Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta'.
- Carney, D. (2003) *Sustainable Livelihoods Approaches : Progress and Possibilities for Change, Secretary*. Canada: DFID Departement for international development. doi: ISBN 1 86192 491 7.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, S. (2013) 'No Title No Title KEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 53(9), pp. 1689–1699. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Eko, Sutoro et al. 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Cetakan Pe. Yogyakarta: ACCES. [http://suryaden.com/sites/default/files//unduh/buku\\_desa\\_membangun\\_indonesia\\_sutoro\\_eko.pdf](http://suryaden.com/sites/default/files//unduh/buku_desa_membangun_indonesia_sutoro_eko.pdf).
- Hastowiyono dan Suharyanto (2014) *Penyusunan Kelayakan Usaha dan Pengembangan Usaha BUM Desa*. cetakan pe. Yogyakarta: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS).
- Kementerian koordinator pembangunan dan kebudayaan RI, K. K. (2016) *Pengelolaan Buku Bantu Pembangunan Desa*. Desember 2.
- Krantz, L. 2001. "The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction." *Division for Policy and Socio-Economic Analysis* (February): 44.
- Messner, A. (2009) 'Needs assessment and analysis methods', *Journal of Human Capital Development*.
- Ministry of Education and Sports Serbia (2007) 'Training Programme for Senior Staff of the Ministry of Education and Sports'. serbia: European Agency for Reconstruction. Available at: [www.serbia.edu.yu](http://www.serbia.edu.yu).

Morse, S., McNamara, N. and Acholo, M. (2009) *Sustainable Livelihood Approach: A critical analysis of theory and practice*, *Geographical Paper*. doi: 10.1007/978-94-007-6268-8.

Muin, F. (2014). Otonomi Daerah Dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah. *Fiat Justisia*, 8(1), 70–80.

M Zulkarnaen, Reza. 2016. "Kondisi Masyarakat Sebelum BUMDES Pendirian BUMDES Sebagai Lembaga Ekonomi Guna Mengelola Aset , Jasa Kesejahteraan Masyarakat Desa." 5(1): 1–4.

Nugroho, D. (2017) *Potret Politik & Ekonomi Lokal di Indonesia*. cetaakan p. Edited by Z. Anang, Yogyakarta.

Oline. [http://www.avds.com/images/WhatIsSocialBusiness\\_SideraWorks.pdf](http://www.avds.com/images/WhatIsSocialBusiness_SideraWorks.pdf). Diakses pada 20 januari 2018.

Pembangunan manusia dan kebudayaan RI, Kementerian Koordinator bidang. 2016. *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. pertama. Jakarta.

Permendagri. 2010. "Permendagri No.39 Tahun 2010." : 7. [jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Permen-No.39-20101.doc](http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/03/Permen-No.39-20101.doc).

Putra, Fadillah. 2016. "Indonesia Village Reform and Development Outlook 2019." In Jakarta Selatan: Direktorat Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 164. <http://www.kiarasari.desa.id/wp-content/uploads/2017/04/outlook-desa-2019.pdf>.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. "Buku Panduan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya."

Rahma, H. (2012) *Acuan Pengembangan Ekonomi Lokal untuk kota dan kabupaten*. Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Ramadaka,dkk. 2013. "No Title No TitleKEBERADAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) SEBAGAI PENGUATAN EKONOMI DESA (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 53(9): 1689–99.

Zulkarnain,Ridlwana.. 2014. "Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa." *fFat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8 no. 3: 424–40. [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=358798&val=6694&title=URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=358798&val=6694&title=URGENSI%20BADAN%20USAHA%20MILIK%20DESA).

Sukasanto. 2014. *Rancangan Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUM Desa*. pertama. Yogyakarta.

Sumantra, K. yuesti, anik. Suryatmaja, IB. SUDiana.AA. 2016. "PEMBERDAYAAN KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF PENDUKUNG BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) DI DESA." (11): 26–34.

Sukasanto (2014) *Rancangan Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa*. pertama. Yogyakarta.

Sumantra, K. yuesti, anik. Suryatmaja, I. Su. A. (2016) 'PEMBERDAYAAN KELOMPOK

EKONOMI PRODUKTIF PENDUKUNG BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) DI  
DESA'; (11), pp. 26–34.

Susanti, dkk (2013) 'PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DALAM SEKTOR PERTANIAN  
(Studi pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang)', 1(4), p. 10.

Zamroni, Anwar, Yulianto, Rozaki, E. (2015). *Desa Mengembangkan Penghidupan  
Berkelanjutan*. Yogyakarta: INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT (IRE)  
YOGYAKARTA

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

